

DR. SUHARYONO, M.Si.

PERSPEKTIF EKONOMI INDONESIA PROYEKSI TAHUN 2050



Dr. Suharyono, S.E.,M.Si

**PERSPEKTIF EKONOMI INDONESIA
PROYEKSI TAHUN 2050**



Perpustakaan Nasional RI : *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*
Copyright : **Dr. Suharyono, S.E.,M.Si**

PERSPEKTIF EKONOMI INDONESIA PROYEKSI TAHUN 2050

Editor : Dr. Suharyono,S.E.,M.Si
Penata Letak/Cover : Dr. Suharyono, S.E.,M.Si

Cetakan : 2020
ISBN : **978-623-7376-34-7**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Penerbit :
Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
Jl. Sawo Manila, No. 61. Pejaten. Pasar Minggu.
Jakarta Selatan. 12520. Telphon : 021-78837310/021-7806700
(hunting). Ex. 172. Fax : 021-7802718
Email : bee_bers@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap hasil studi yang dilakukan oleh John Hawsworth mengenai peta kekuatan ekonomi dunia ditahun 2050, termasuk didalamnya perspektif ekonom Indonesia.

Ada ketertarikan penulis terhadap hasil studi John Hawsworth, karena dalam studi itu diestimasikan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2050 memiliki kemajuan yang sangat pesat hingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan potensi pasar terbesar. Hal tersebut sangat kontradiktif dan sulit dibayangkan jika mengacu pada keadaan ekonomi Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, walaupun secara deskriptif tulisan ini mencoba menjelaskan kondisi nyata ekonomi Indonesia saat ini dan menjelaskan perspektif penulis dengan mengacu pada referensi dan hasil penelitian ilmiah sebelumnya. Dari sinilah, kemudian penulis mencoba memberikan rekomendasi yang paling mungkin dilakukan pemerintah untuk dapat mencapai perspektif Indonesia ditahun 2050.

Variabel – variabel ekonomi yang meliputi investasi, tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam tulisan ini diformulasikan sebagai variabel penggerak (*predictor variable*), sementara itu *Gross Domestic Product* (GDP) yang merupakan representasi dari kondisi ekonomi yang diinginkan menjadi variabel responsif.

Dengan demikian, memberikan kebijakan yang tepat guna mendorong meningkatnya kinerja dan daya saing dari variabel Investasi,

Tenaga Kerja, Modal, dan variabel Teknologi akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan GDP.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran sehingga dapat selesai penulisan buku ini.

Jakarta, Juli 2020

Penulis

Dr. Suharyono, SE., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAGIAN 1 : Studi John Hawsworth Terhadap Peran EE Dan OECD Pada Ekonomi Dunia Tahun 2050	1
1.1 Negara-Negara yang Menjadi Obyek Studi.....	1
1.2 Tujuan Studi.....	1
1.3 Asumsi-Asumsi yang Digunakan Dalam Studi.....	2
1.4 Model yang digunakan Dalam Studi.....	6
1.5 Keterbatasan Studi.....	7
1.6 Ekonomi EE, OECD dan Indonesia Pada Tahun 2050.....	7
1.6.1 Pertumbuhan Investasi.....	7
1.6.2 Petumbuhan Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja.....	9
1.6.3 Kemajuan Teknologi.....	12
1.6.4 Proyeksi <i>Gross Domestic Product</i> (GDP).....	14

BAGIAN II : Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Indonesia-ASEAN 2025	19
2.1. Indonesia dan Permasalahanya	21
2.2. Kajian Ekonomi dan Pengukuran Daya Saing.....	27
2.3. Mengapa Kebijakan Pemerintah Mengalami Kegagalan.....	29
2.4. Strategi Peingkatan Daya Saing.....	32
2.5. Strategi Pembangunan Yang Berpihak Pada Rakyat dan Konstitusi	34

2.5.1.Strategi Meningkatkan Produktifitas.....	35
2.5.2.Strategi Pengembangan Wirausaha Dapat dilakukan.....	36
2.5.3.Strategi Perbaikan Sistem Manajemen dan Birokrasi dapat Dilakukan dengan cara	37
2.5.4.Strategi Melakukan Inovasi Teknologi dan Engineering dapat Dilakukan dengan cara	38
2.5.5. Srtaregi Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat Dilakukan dengan cara	38
2.5.6. Strategi Pengembangan Budaya Produktifitas dapat Dilakukan dengan cara	39

BAGIAN III. Indonesia Dalam Perdagangan ASEAN : Sebuah Tinjauan Ekonomi Internasional..... 41

3.1. Integrasi Ekonomi Sebagai Prasarana	44
3.2.Peran Strategis Indonesia Dalam Kerja Sama ASEAN	48
3.3.Kerjasama Indonesia dengan Intra Negara ASEAN	52

BAGIAN IV : Manfaat Integrasi Ekonomi..... 65

4.1. Aliran Modal dan Peningkatan Ekspor	69
4.2. Dampak Negatif Arus Modal Yang Lebih Bebas	71
4.3. Daya Saing Industri dan Tingkat Perkembangan Ekonomi	72

BAGIAN V : Analisis Perpektif Ekonomi Indonesia Tahun 2050

5.1. Metode Analisis	79
5.2. Analisis Terhadap Variabel Ekonomi Menuju Tercapainya Perspektif Ekonomi Indoneisa 2050.....	80

5.3. Analisis Terhadap Variabel Investasi	81
5.4. Analisis Terhadap Variabel Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja	85
5.5. Analisis Terhadap Variabel Modal	100
5.6. Analisis Terhadap Variabel Teknologi	111

BAGIAN VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan	119
6.2. Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

No. Urut	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Projected Relative Income Percapita Levels in 2005 and 2050 (in Cpmstamt 2004 \$ Terms)	143
Tabel 2	Projected Relative Size of Economies in 2005 and 2050 (Indeces with USA = 100)	144
Tabel 3	Projected Real Growth in GDP and Income percapita: 2005 – 2050 (%p.a)	145
Tabel 4	Investment Rate Assumptions	146
Tabel 5	Results of Sensitivity Analysis	147
Tabel 6	Perpektif Ekonomi Indonesia Tahun 2050	15
Tabel 9	Trend Pertumbuhan Daya Saing Indonesia Periode 2001 s/d 2005	148
Tabel 10	Peringkat Iklim Bisnis Indonesia, 2004 - 2005	149
Tabel 11	Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Melakukan Bisnis Tahun 2005	150
Tabel 12	Perkembangan Angkatan Kerja dan Pengangguran (Jutaan Orang)	151
Tabel 13	Perkembangan PMDN dan PMA Menurut Sektor 2000-2004	90
Tabel 14	Beberapa Faktor yang Dapat Menjelaskan Rendahnya Minat Investor Untuk Menanamkan Modalnya di Indonesia tahun 2005	91

Tabel 15	Peringkat Good Corporate Gevernance di Asia Selama tahun 2000 s/d 2003	95
Tabel 16	Perkembangan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah, Defisit APBN dan Penarikan Utang Baru Tahun 1999 s/d 2005 (milyar USD)	102
Tabel 17	Komposisi Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1998 s/d 2003 (Milyar USD)	104
Tabel 18	Peringkat Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Periode 1998-2005	152

DAFTAR BAGAN

No.Urut	Judul Bagan	Halaman
Bagan 1	Modal Hubungan Antara Investasi, Tenaga Kerja, Modal dan Teknologi Terhadap GDP	79
Bagan 2	Alur Strategi Pembangunan Nasional Untuk Mencapai Tujuan Negara Republik Indonesia	142
Bagan 3	Alur Strategi Mendapatkan dan Memanfaatkan Investasi, Tenaga Kerja, Modal, dan Teknologi untuk Mencapai Target GDP 2050	141

BAGIAN I

STUDI JOHN HAWSWORTH TERHADAP PERAN EE DAN OECD PADA EKONOMI DUNIA 2050

1.1 Negara-Negara yang Menjadi Obyek Studi

Di dalam laporan studi yang ditulis John Hawsworth pada Maret 2006 disebutkan bahwa peneliti ini melakukan studi terhadap peran ekonomi 17 negara terhadap ekonomi dunia pada tahun 2050 dengan menggunakan data 2005. Tujuh belas negara yang menjadi obyek studi, oleh John Hawsworth dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam G7, terdiri atas 7 negara, yaitu: Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia dan Kanada, plus Spanyol, Australia dan Korea Selatan (Organization of Economic Cooperation Development atau OECD).
2. Kelompok negara-negara yang tumbuh sebagai emerging market economics (EE) terbesar, terdiri atas 7 negara yaitu Brazil, Rusia, India dan Cina (BRIC), plus Indonesia, Meksiko dan Turki.

1.2 Tujuan Studi

Studi yang dilakukan oleh John Hawsworth dilakukan untuk melakukan proyeksi jangka panjang 2005 – 2050 terhadap beberapa proyeksi parameter ekonomi makro, yaitu:

1. Proyeksi Rate Pertumbuhan Ekonomi

Studi ini dilakukan dengan mengukur pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Market Exchange Rate* (MER) dan GDP

terhadap *Purchasing Power Parity* (PPP), baik pada kelompok G7 maupun kelompok E7 secara individual. (tabel 1)

2. Proyeksi Ukuran Ekonomi Relatif

Dalam hal ini, studi ditujukan untuk mengukur secara relative GDP terhadap MER maupun terhadap PPP dengan parameter yang sama yang terjadi di Amerika Serikat (US = 100). Oleh karena itu studi yang dilakukan John Hawsworth menggambarkan urutan (Ranking) untuk tiap negara yang diamati, pada GDP dalam MER dan GDP dalam PPP yang terjadi di Amerika Serikat (USA).(Tabel 2)

3. Proyeksi Income Percapita.(Tabel 3)

John Hawsworth mencoba melakukan studi yang ditujukan untuk mengukur pertumbuhan GDP yang dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Rasio antara GDP dengan jumlah penduduk merupakan income percapita. Dalam hal ini akan dilakukan urutan (Ranking) dan mencoba disimak perubahannya untuk tiap individu (negara) yang diamati.

1.3 Asumsi-Asumsi Yang Digunakan Dalam Studi

Studi yang dilakukan oleh John Hawsworth merupakan studi proyeksi jang panjang (2005 – 2050) yang sulit dibayangkan ketercapainnya karena mengandung unsur ketidakpastian yang sangat tinggi. Peneliti ini melakukan studi dengan membuat asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kurs rate PPP diasumsikan tetap konstan dalam kondisi nyata, sementara itu kurs rate pasar untuk ekonomi pasar yang muncul diasumsikan meningkat pada kondisi nyata produktivitas relative, yang sesuai dengan pengalaman historis. Asumsi tersebut mengacu

pada Winston & Purushotaman (2003) bahwa rate nilai tukar real ekonomi pasar yang muncul, akan tumbuh yang relative proporsional terhadap pertumbuhan produktivitas buruh yang terjadi di Amerikas Serikat setiap tahun. Pertumbuhan buruh tersebut akan tunduk pada rate tukar pasar dan tidak akan bergerak diatas level PPPnya. Disamping itu bagi ekonomi OECD, diasumsikan bahwa pemenuhan rate nilai tukar real terhadap rate PPPnya terjadi secara bertahap dan tetap selama kurun waktu 2005 – 2050.

2. Digunakan model Cobb-Douglas dengan skala pengembalian yang konstan, sehingga Shares (bagian) income nasional yang terdistribusi kepada buruh diasumsikan konstan.
3. Pertumbuhan stock capital fisik yang ditentukan oleh ivestasi modal baru, lebih sendikit mengalami depresiasi terhadap stock capital yang ada yaitu rata-rata 50% per tahun, yang seragam baik realisasi mapun proyeksi.
4. Pertumbuhan kualitas buruh, diasumsikan berhubungan dengan tingkat pendidikan rata-rata yang diproyeksikan dan sesuai kebutuhan pasar kerja.
5. Kemajuan teknologi yang berlangsung diasumsikan akan mendorong produktivitas faktor produksi.
6. Sehubunngan dengan trend yang terjadi pada periode sebelumnya (masa lalu), rata-rata tahunan shooling diasumsikan meningkat pada rata-rata yang paling lambat di Amerika, mengacu pada starting point yang tinggi.
7. Rata-rata pertumbuhan tercepat diasumsikan terjadi dengan India dan Indonesia, yang konsisten dengan trend periode baru dan merupakan faktor penting dalam melakukan proyeksi.

8. Disamping itu, studi yang dilakukan John Hawsworth tersebut mempunyai asumsi-asumsi yang dibuat secara spesifik dalam bentuk asumsi-asumsi kunci, yaitu:
- a) Parameter studi diformat sesuai dengan nilai-nilai yang dipakai pada studi-studi akademik masa lalu.
 - b) Rate catch-up tersebut akan bertemu pada 1,5% pertahun untuk seluruh ekonomi E& untuk jangka panjang. Sesuai dengan typical 1% - 2% estimasi yang ditemukan oleh studi akademik masa lalu. Tetapi untuk jangka pendek speed catch-up lebih rendah sekitar 0,5% - 1% pertahun bagi emerging economic yang diduga memiliki cara tertentu sebelum mencapai framework politik, ekonomi dan institusional yang sepenuhnya mendukung pertumbuhan convergence pertahun. India, Brazil, Indonesia, Mexico dan Turki hingga tahun 2020 sebesar 1%. Sementara itu, China dan Rusia memiliki speed catch-up sebesar 1,5% pertahun.
 - c) Estimasi stock capital inisial (k) pada pertengahan 1980an diperoleh dari Levine dan King (1994). Update hingga 2004 dengan menggunakan data pada investasi terhadap ratio GDP dari pen World Tables (V.6.I) dan IMF. Ratio investasi ini (I/Y) diproyeksikan maju dengan asumsi kontinyu trend yang baru hingga 2010, diikuti oleh slow convergence hingga 20% dari 2025 dan seterusnya, dengan pengecualian China (25%) dan Indonesia (22%).
 - d) Estimasi inisial level pendidikan rata-rata (s) diperoleh dari Barroo dan Lee (2001) dan diproyeksikan maju terhadap kontinyuasi trend selama 5 – 20 tahun (menggunakan judgement

atas apa yang akan diambil sesuai pada masing-masing kasus) kasus. Fungsi labour-quality-adjustment (s) mengacu kepada pendekatan yang dilakukan oleh Hall dan Jones (1998).

- e) Proyek populasi usia kerja (N) adalah kasus sentral dari proyeksi dasar PBB 2004 untuk usia 15 – 59 tahun. Employment Rate (e) diasumsikan constan sepanjang waktu.
- f) Rate nilai tukar PPP diasumsikan tetap constan pada kenyataannya sepanjang waktu, sementara MER converge terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu untuk jangka panjang.
- g) Bagi ekonomi OECD (tidak termasuk Meksiko) hal ini diasumsikan sebagai proses linear sederhana selama beberapa periode hingga 2050. Bagi ekonomi E7, perubahan rate nilai tukar pasar real relative terhadap dolar diasumsikan proporsional terhadap pertumbuhan produktivitas buruh setiap tahunnya antara negara-negara yang berhubungan dengan Negara Amerika Serikat (USA).
- h) Teori efek Ballasa-Samuelson digunakan untuk membuat model tunggal dengan asumsi-sederhana:
 - (1) Seluruh produktivitas differensial relative terhadap USA terfokus kepada sector tradable.
 - (2) Sector-sektor tradable dan nontradable ukurannya harus sama, sesuai dengan asumsi sederhana yang dibuat dalam model Goldman Sachs (2003) terhadap pertumbuhan jangka panjang ekonomi BRIC.

1.4 Model yang Digunakan Dalam Studi

Model yang digunakan dalam studi mengacu pada mainstream teori pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan pada akhir tahun 1950-an. Dalam hal ini, output dimodelkan dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dengan pengembalian tetap terhadap skala dan share faktor constan. Output khususnya (GDP yang dinyatakan sebagai Y) dibuat dengan rumusan berikut:

$$Y = AK^aL^{1-a}$$

Dimana A = total faktor produktivitas, yang ditentukan oleh kemajuan teknologi pada negara-negara maju (asumsi disini adalah USA) plus negara dengan faktor specific-catch up yang dihubungkan dengan gap produktivitas inisial bersus USA.

a = Share capital dalam total income nasional, yang mana (1 – a) adalah share tenaga kerja, keduanya diasumsikan constan dalam model ini

K = Stock capital fisik, yang tumbuh berdasarkan formula standar

$$K_t = K_{t-1} (1 - d) + I_t$$

Dimana : d = rate depresiasi

I_t = investasi gross pada tahun t

L = input tenaga kerja yang disesuaikan – kualitas.

Dalam hal ini dapat dipecah menjadi:

$$L = h(s) e N$$

Dimana: h (s) adalah penyesuaian kualitas yang berhubungan dengan rata-rata tahun pendidikan populasi usia kerja; e adalah rate tenaga kerja yang didefinisikan sebagai share populasi usia kerja; dan N jumlah orang usia kerja.

1.5 Keterbatasan Studi

Studi yang dilakukan oleh John Hawsworth adalah suatu studi perpektif jangka panjang yang mengandung beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Tidak menghiraukan fluktuasi yang terjadi diantara trend long-term, dengan alasan bahwa penjelasan sejarah akan signifikan untuk short-term, khususnya bagi emerging ekonomi.
2. Mengabaikan shock perlawanan umum (seperti : revolusi politik, bencana alam atau konflik militer) yang dapat membawa suatu bangsa kedalam keseimbangan tahap-tahap pertumbuhan untuk periode yang lama.
3. Model yang digunakan dalam studi ini juga mengabaikan kemungkinan terjadinya lompatan yang pesat pada teknologi modern, karena sulit membayangkan adanya inovasi teknologi secara besar-besaran.
4. Studi ini nampaknya juga belum memperhatikan secara mendalam adanya unsur ketidakpastian yang secara signifikan akan terjadi dalam suatu studi yang mempunyai perspektif jangka panjang.

1.6 Ekonomi EE, OECD, dan Indonesia Pada Tahun 2050

1.6. 1 Petumbuhan Investasi

Studi ini dimulai dengan estimasi dari Ring & Levine (1994) rasio investasi terhadap output pada tahun 1980-an. Rasio ini diproyeksikan dengan tahun dasar 2004 dan menggunakan data ivestasi dari GDP table Penn World (V.6.1) pada database sampai tahun 2000, yang pada tahun-tahun belakangan ini disajikan oleh IMF. Dinyatakan bahwa rata-rata depresiasi tahunan 5% seragam terhadap stock capital

yang ada, baik realisasi maupun proyeksi forward-looking, yang konsisten dengan 4% - 6% memakai rata-rata depresiasi yang secara umum diasumsikan dalam literature akademik. Hasil rating output capital pada tahun 2004 beragam mulai dari 2,1% - 2,2% di India dan Brazil, data hingga 4,1% di Jepang. Perspektif kedepan, dimungkinkan bahwa rasio investasi terhadap GDP akan beragam mulai 17% di Inggris, dan hingga 30% di Cina. Hal itu akan terus berlanjut hingga tahun 2010. Adjust (penyesuaian) secara bertahap menuju level investasi jangka panjang setelah tahun 2025 memberikan hasil yang beragam dari 17% di Inggris dan hingga 25% di Cina (lihat Table 2, Lampiran 1), meliputi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini merefleksikan pandangan bahwa telah terjadi penurunan pengembalian marginal pada investasi dari waktu ke waktu. Rasio investasi terhadap GDP yang sangat tinggi terlihat di Cina dan pasar emerging Asia lainnya. Hal ini tersebut cenderung menurun untuk jangka panjang karena memang kondisi ekonominya yang sudah matang (seperti terjadi pada Jepang sejak awal 1990-an).

Sehubungan dengan beberapa studi akademik masa lalu, dapat dinyatakan bahwa share investasi pada income nasional adalah 1/3 (33%). Hal ini akan sesuai dengan data income nasional bagi Negara OECD.

Pada Tabel 4 diasumsikan bahwa investment rate terhadap GDP untuk Indonesia adalah 28% pada tahun 2005 – 2010 dan menjadi 22% mulai tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat investasi terhadap GDP untuk Indonesia pada dekade 2005 – 2010 dan tahun 2025 berada di urutan ke empat sesudah Cina (36% & 25%), Korea (32% & 25%) dan Jepang (30% & 25%).

Selanjutnya, John mencoba memproyeksikan parameter-parameter yang sensitive terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat net investment rate serta hal-hal lain yang menyangkut kebijakan dan institusional. Dengan menggunakan teknik analisis sensitifitas, perubahan-perubahan parameter tersebut digunakan untuk meneropong perubahan GDP pada MER dan GDP pada PPP dengan menggunakan model Likelihood. John tetap meyakini bahwa berdasarkan analisis sensitifitas tersebut tidak akan mengubah kesimpulan mengenai terdapatnya pergantian yang signifikan dalam hal GDP dunia dari G7 ke E7 pada tahun 2050 (Grafik 1).

1.6.2 Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

Studi ini menggunakan proyeksi PBB yang terbaru (Revisi 2004) untuk populasi usia 15 – 59 tahun sebagai wakil bagi pertumbuhan angkatan kerja. Sebagaimana ekonomi mungkin dapat mencapai pertumbuhan lebih cepat, jika dapat mencapai tingkat pertumbuhan angkatan kerja paling besar. Namun demikian, berbagi efek tersebut sulit diprediksi dan itulah sebabnya studi ini tidak memasukkannya dalam estimasi.

Seluruh negara-negara yang dipertimbangkan dalam studi ini, kecuali India diproyeksikan oleh PBB untuk melihat penurunan share dari populasi total negara yang bersangkutan, yaitu antara usia 15 – 59 tahun kurun waktu 2005 dan 2050 (Grafik 2).

Ini adalah counterpart dari fakta bahwa 17 negara diatas (termasuk India) diproyeksikan memiliki share yang muncul pada populasi penduduk yang berusia diatas 60 tahun atau lebih. Korea, Spanyol, Rusia, Jepang, Italia dan Cina diharapkan mempunyai

penurunan tertinggi dalam hal share kelompok usia kerja utama pada periode 2050.

Jika kita melihat pertumbuhan yang diharapkan dalam hal usia kerja, utamanya 15 – 59 tahun (figure 3), ada beberapa negara dengan rate pertumbuhan positif karena rata-rata tingkat kelahiran yang tinggi (seperti India dan Turki) atau rate imigrasi (seperti Amerika).

Negara-negara OECD di Eropa menghadapi penurunan populasi usia kerja (kecuali Amerika yang diproyeksikan statis) begitupun halnya dengan Jepang, Korea, Cina dan khususnya Rusia. Pengaruh penurunan pada populasi usia kerja cukup signifikan dalam membatasi kemampuan Rusia meningkatkan share GDP dunia, demikian juga bagi ekonomi pasar yang baru muncul. Populasi usia kerja juga bisa menjadi penahan pertumbuhan pengangguran sebagaimana yang terjadi di Cina untuk jangka panjang dibandingkan dengan India.

Sama dengan beberapa studi akademik masa lalu, studi ini mendasarkan estimasi stock kapital manusia (tenaga kerja) pada data rata-rata tahunan yang dikelompokkan dalam usia populasi 25 tahun atau lebih (oleh Barro & Lee tahun 2001). Mengikuti pendekatan Hall & Jones (1998) yang pada gilirannya didasarkan kepada survey estimasi internasional pengembalian kepada pengelompokkan negara-negara pada level yang berbeda pembangunan ekonominya oleh Psacharepoulus (1994). Empat tahun pendidikan pertama, diestimasikan bahwa rate pengembalian adalah 13,4% mengacu kepada estimasi rata-rata bagi sebagian Negara sahara Afrika. Untuk 4 tahun selanjutnya, diestimasikan bahwa rate pengembalian adalah 10,1% mengacu kepada rata-rata seluruh dunia. Untuk pendidikan melweati tahun ke-8, diestimasikan bahwa rata-rata pengembalian pada OECD adalah 6,8%.

Pendekatan ini mengacu kepada estimasi stock capital manusia per pekerja pada tahun 2004 sebagai index relative terhadap Amerika, yang memiliki tingkat schooling rata-rata tinggi menurut database Barro & Lee, sebagaimana pada Grafik 3.

Dinyatakan bahwa rata-rata tahunan schooling populasi penduduk berusia diatas 25 tahun meningkat beberapa waktu pada tiap Negara dengan rate yang didorong oleh perhitungan maju dari trend selama 5 – 20 tahun antara negara yang tergantung kepada pertimbangan kita untuk menjadi indikator terbaik dari trend dalam hal tingkat pendidikan pada setiap negara.

Sehubungan dengan trend selama periode masa lalu, rata-rata tahunan schooling diestimasikan meningkat pada rata-rata yang paling lambat di Amerika, mengacu kepada starting point yang tinggi. Hal ini memungkinkan negara lain untuk mengejar dengan rata-rata estimasi rata-rata level yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam grafik 3 untuk tahun 2050. Rata-rata pengejaran tercepat diestimasikan terjadi dengan India dan Indonesia, yang konsisten dengan trends periode baru dan merupakan faktor penting dalam proyeksi relative yang kuat.

Selain itu, Johan sangat yakin bahwa penduduk yang besar akan memberikan peluang terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Paradigm yang dikembangkan oleh John tentu saja harus ditanggapi secara hati-hati dan arif. Sebab kesalahan dan ketidak mampuan suatu negara untuk mengoptimalkan produktivitas pendudukannya akan mengakibatkan turunnya produktivitas nasional yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berpegang pada proyeksi pertumbuhan penduduk (Trend Demography), maka John memprediksikan bahwa India memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun 2050. Lebih lanjut John mengemukakan bahwa pada tahun 2050, India dan Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cepat, bahkan lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Cina dan Jerman (Tabel 3).

1.6.3 Kemajuan Teknologi

Faktor ini diperkirakan berhubungan dengan negara-negara yang teknologinya dibelakang negar yang memimpin teknologi (Amerika) serta negara yang berpotensi mengejar melalui transfer teknologi. Kondisi ini berdasarkan pada tingkat investasi kapital manusia dan fisik, serta faktor institusional lain seperti stabilitas politik, keterbukaan terhadap perdagangan, investasi asing, kekuatan aturan hukum, kekuatan system finansial dan sikap budaya entrepreneurship. Faktor institusional yang terakhir ini belum bisa di-quantitible melalui single incex, tetapi dapat difleksikan terhadap kecepatan kemajuan teknologi tiap negara.

Usaha-usaha market massa akan memaksa berkembangnya teknologi untuk dapat menurunkan unit cost produksi dan mengoptimalkan prinsip efisiensi. Disisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan untuk mengoperasikan dan melakukan inovasi teknologi. sejumlah loser dan pesaing baru akan muncul diberbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi yang memerlukan ivestasi yang sangat besar diproyeksikan akan menumbuhkembangkan lembaga keuangan dan perbankan, antara lain dinegara Cina dan India, bahkan mungkin Indonesia. Teknologi, juga akan berperan dalam

mendorong berkembangnya sector perdagangan internasional (pekerja migran dan ekspor komoditi) yang dapat berkompetisi secara global.

Selanjutnya, hasil studi John menunjukkan adanya kecenderungan negara-negara maju yang tergabung dalam G7 menjadi market leader yang dapat menguasai pasar dan menentukan harga, sementara itu, pada tahun 2050 munculnya ekonomi E7 akan menciptakan kesempatan pasar bagi negara-negara maju G7 dan meningkatkan income OECD karena memperoleh surplus keuntungan akibat impor biaya rendah E7 dan emerging ekonomi lainnya. Pada tahun 2050 akan tercapai keseimbangan kepentingan dan kesamaan kekuatan tawar (bargaining) antara E7 dan G7, sehingga akan terjadi proses kerjasama yang sama-sama menguntungkan sebagaimana dipolakan pada “Game Theory Analysis”. (Tabel 5)

Dalam beberapa kasus (seperti: India, Indonesia, Brazil), diperkirakan akan terjadi kemajuan teknologi yang berlangsung rata-rata lebih lambat dalam untuk jangka pendek, tetapi akan dapat meningkatkan akselerasinya untuk jangka panjang setelah negara-negara ini menguatkan framework institusionalnya. Dalam jangka panjang, rate of catch up-nya diestimasikan akan memenuhi annual rate 1,5% dari factor total gap produktivitas dengan Amerika. Hal ini dengan hasil riset akademik masa lalu yang menjelaskan catch-up rate jangka panjang sekitar 1% - 2% per tahun. Sebagaimana sudah dinyatakan diatas bahwa peningkatan sebesar 2% rata-rata pertahun pada sektor real, mengacu pada trend historis yang baru, karena invasi besar dibidang teknologi belum terbayangkan.

1.6.4 Proyeksi Gross Domestik Product (GDP)

Penulis *The World in 2050* (John Hawsworth, 2006) secara meyakinkan dan optimis mengemukakan analisis perspektif terhadap ekonomi dunia di tahun 2050. Dalam hal ini, John membayangkan bahwa tahun 2050 akan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dari Negara-negara maju G7 (Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia dan Kanada) plus Negara-negara lain yang saat ini juga tergolong maju yaitu Spanyol, Australia dan Korea Selatan (OECD) ke-7 negara yang baru muncul dan memiliki ekonomi pasar terbesar (E7) yaitu Cina, India, Brazil, Rusia, Indonesia, Meksiko dan Turki,

Disamping modeling pertumbuhan GDP yang konstan dengan mata uang domestik, studi ini telah mencoba membuat model bagaimana level real rate nilai tukar yang terjadi beberapa waktu. Hal ini konsisten dengan riset akademik yang menunjukkan bahwa keseimbangan daya beli diperkirakan akan bertahan untuk jangka panjang dan bukan jangka pendek. Seperti terlihat pada Figure 4 yang memperkirakan bahwa telah terjadi beberapa penyesuaian penurunan dalam rate nilai tukar real jangka panjang di Jepang, Inggris, Jerman & Prancis secara relative kepada Amerika, dan hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Ekonomi OECD dan negara lain yang ekonominya telah establish (Australia Italy dan Canada) diperkirakan sudah mendekati rate PPP-nya tahun 2004 dan tidak diproyeksikan untuk mengalami perubahan signifikan apapun dalam rate nilai tukar real mark terhadap dollar pada periode hingga 2050. Dua anggota OECD yang relative baru yaitu Korea Selatan dan Meksiko diproyeksikan akan mengalami apresiasi rate nilai tukar secara riil pada periode yang sama.

Figure 4 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap rasio nilai tukar pasar terhadap PPP bagi Indonesia, yang pada tahun 2004 berada pada urutan ke 14, maka pada tahun 2050 diproyeksikan mampu menempatkan diri pada urutan ke 7.

Perspektif atau tampilan ekonomi Indonesia pada tahun 2050 secara optimal ditunjukkan dalam laporan studi yang dilakukan John Hawsworth (2006). Peneliti ini mengestimasi bahwa pada tahun 2050, pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) dan Income percapita Indonesia dari 17 negara yang diteliti, berada pada urutan kedua setelah India. Bahkan dalam studi tersebut terlihat bahwa ranking pertumbuhan GDP dan Income percapita Indonesia berada di atas Cina dan Jepang. Ringkasan hasil studi John Hawsworth yang memperlihatkan perspektif ekonomi Indonesia pada tahun 2050 nampak pada tabel berikut:

Tabel 6
Perspektif Ekonomi Indonesia Tahun 2050

No Urut	Variabel Ekonomi	2005	2050	Perubahan	Rangking
1	Gross Domestic Bruto	5,60%	7,30%	1,70%	2
2	GDP in Currency or at PPPs	3,52%	4,80%	1,28%	2
3	Relative Size GDP At Market Exchange Rate in usterms (US = 100)	2,00%	19,00%	17,00%	6
4	GDP in PPP terms	7,00%	19,00%	12,00%	6
5	GDP per capita at market Exchange rate (2004 = 100)	1,249 USD	23,097 USD	21,8484 USD	16
6	GDP per capita in PPP terms (2004 = 100)	3,702 USD	23,686 USD	19,984 USD	16

Spirce : Price Waterhouse Coopers estimates (ranked in order 07 GDP percapita in PPP term in 2005), based on World Bank estimates of PPP rates for 2004. (in process)

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa perspektif ekonomi Indonesia 2005 - 2050 menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Diukur dengan GDP absolute, diestimasikan mengalami kenaikan 1,70% sedangkan GDP dalam mata uang domestic (GDP – PPPs) estimasi kenaikannya adalah 1,28%. Menggunakan kedua variable ekonomi tersebut, di tahun 2050, Indonesia menempati urutan (rangking) ke-2 sesudah India di atas Cina dan Brazil.

Jika diukur secara relative, dengan menggunakan mata uang Internasional (USD) dan menjadikan Amerika sebagai dasar perhitungan (US = 100), maka GDP – MER dan GDP – PPP Indonesia di tahun 2050 berada diurutan ke-6, dengan kenaikan masing-masing 17% - 12%. Dengan menggunakan kedua variable ekonomi tersebut, di tahun 2050 ekonomi Indonesia Nampak lebih baik dibandingkan, antara lain dengan Mexico, Jerman dan Perancis.

Pada akhirnya, dengan menggunakan ukuran GDP – MER dan GDP percapita – PPP dan menggunakan tahun dasar 2004; Indonesia di tahun 2050 berada diurutan ke-16 dari 17 negara yang disurvei; dan hanya berada di atas India. Namun dengan secara absolut tahun 2005 – 2050 untuk kedua variable ekonomi tersebut diestimasikan akan mengalami lonjakan yang sangat signifikan dan sulit dibayangkan.

Jika GDP – MER tahun 2005 sebesar 1,249 USD maka di tahun 2050 diperkirakan akan mencapai angka 23,097 USD atau mengalami kenaikan 21,848 USD atau (1750%) dan GDP percapita – PPP diestimasikan akan naik dari 3,702 USD (2005), menjadi 23,686 USD (2050) atau naik hampir 600%. (Tabel 1)

Tentu saja perspektif ekonomi Indonesia tahun 2050 yang menyajikan hasil studi John Hawsworth, akan dicoba ditanggapi secara

optimis, walaupun keadaan itu sangat sulit dibayangkan ketercapainya jika kita berpijak dengan menggunakan kondisi riil yang ada pada saat ini.

BAGIAN II

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDONESIA, ASEAN 2025

Globalisasi mendorong meningkatnya hubungan ketergantungan antar bangsa dan antar negara di seluruh dunia. Hubungan ketergantungan ini meliputi berbagai bidang, baik bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, politik maupun sosial budaya. Hubungan ketergantungan ini semakin dibutuhkan antara satu negara dengan negara lain untuk menciptakan masa depan dunia sebagaimana yang diimpikan bersama; yaitu dunia dengan tatanan kehidupan yang baru, yang aman, sentosa dan sejahtera.

Stiglitz (2003) menjelaskan bahwa globalisasi telah mengurangi perasaan terisolasi yang dirasakan di banyak negara-negara berkembang dan telah memberikan akses kepada masyarakat negara berkembang akan pengetahuan yang mungkin di luar jangkauan orang-orang paling kaya sekalipun di semua negara pada satu abad yang lalu.

Dalam menanggapi masalah globalisasi terdapat banyak pendapat, namun kita dapat menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proses alamiah dalam aspek sosial dan budaya seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain untuk mewujudkan tatanan kehidupan baru yang membiaskan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat di antara negara-negara di dunia.

Pada prinsipnya, perkembangan ekonomi dunia telah mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk kerjasama ekonomi. Hal ini dimulai dengan disyahrkannya deklarasi Bangkok

tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Pada akhirnya, dalam menghadapi perkembangan ekonomi global, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan untuk membentuk komunitas ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*). Kemudian ternyata *AEC* yang mulai dicanangkan pada tahun 2015 dapat berjalan relatif lebih cepat dibandingkan kerjasama di bidang keamanan, politik dan sosial budaya (Bustami, 2015).

Pada saat ini, Indonesia harus mempersiapkan diri dan berpacu dengan waktu dalam menghadapi Pasar Bebas Asia Tenggara / AFTA yang merupakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah bergulir sejak tahun 2015. Beberapa sektor barang industri menjadi basis dalam perdagangan MEA. Barang-barang tersebut antara lain golongan produk pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif dan produk berbasis kayu. Di samping produk industri terdapat lima sektor jasa dalam wilayah perdagangan MEA, yaitu transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, pariwisata dan jasa logistik.

Keinginan negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk MEA didorong oleh perkembangan kebutuhan di antara anggota negara Asia Tenggara. Di sisi lain perkembangan ekonomi dunia yang maju dengan pesat akibat perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan sistem informasi menyebabkan batas-batas suatu negara menjadi bias dan kebutuhan untuk membentuk komunitas semakin mendesak.

2.1 Indonesia dan Permasalahannya

Indonesia menjadi tempat dilaksanakannya KTT ASEAN ke-9 pada tahun 2003 di Bali yang menghasilkan *Bali Concord II* yang menyepakati pembentukan ASEAN Community. Komunitas ini dibentuk guna mempererat integrasi di antara anggota negara ASEAN melalui tiga komunitas yang disesuaikan dengan visi ASEAN 2020, yaitu komunitas pada bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), dalam bidang ekonomi (*ASEAN Economic Community / AEC*) dan dalam bidang sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*).

Wangke (2015) menjelaskan bahwa untuk membantu integrasi ekonomi ASEAN dibuat *blueprint AEC* yang memuat empat pilar utama, yaitu :

- (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal akan didukung oleh elemen aliran bebas, barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
- (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce;
- (3) ASEAN dengan kawasan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah / UKM, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam; dan
- (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global memiliki elemen pendekatan yang koheren dalam

hubungan ekonomi di luar kawasan ASEAN dan meningkatkan peran serta jejaring produksi global.

Posisi Indonesia dalam komunitas ekonomi ASEAN berperan penting, bahkan sangat menentukan. Kekuatan ekonomi ASEAN yang didukung India, Tiongkok dan negara-negara ASEAN memiliki kekuatan ekonomi dengan nilai GDP sebesar 3,36 triliun USD dan laju pertumbuhan 5,60%, serta memiliki jumlah penduduk 617,68 juta orang. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, dengan luas wilayah mencakup 43% dari seluruh wilayah ASEAN, jumlah penduduk Indonesia mencapai 40% dari jumlah penduduk ASEAN dan memiliki porsi GDP 38% dari total GDP ASEAN (Kuntadi, 2015).

Di sisi lain, kondisi Indonesia dalam era perdagangan bebas ASEAN (*AFTA*) harus dilindungi melalui regulasi perdagangan. Dalam hal ini terdapat regulasi perdagangan yang cukup penting yaitu UU No. 7 Tahun 2014 tentang “Strategi perdagangan sebagai salah satu strategi Indonesia untuk membendung membanjirnya produk impor yang masuk ke Indonesia”. UU No. 7 Tahun 2014 mengatur ketentuan umum tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, agar menggunakan bahasa Indonesia di dalam pelabelan dan penggunaan produk dalam negeri. Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2014 tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu pemerintah juga berkewajiban menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional.

Regulasi di bidang perdagangan sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 7 Tahun 2014 tersebut di latar belakang oleh posisi ekspor

Indonesia ke pasar ASEAN yang pada akhir tahun 2014 baru mencapai sekitar 23% dari nilai ekspor Indonesia keseluruhan. Tujuan ekspor Indonesia sampai saat ini ternyata masih difokuskan pada pasar tradisional, antara lain Amerika, Tiongkok dan Jepang.

Dalam aspek kemampuan bersaing yang diukur dengan *global competitiveness index*, Indonesia masih berada posisi yang memprihatikan. Dari 148 negara, Indonesia berada pada urutan ke-38, hanya lebih baik dari posisi Filipina dan Vietnam. Berdasarkan *global competitiveness index*, Singapura menempati posisi ke-2, Malaysia di posisi ke-24, Thailand di posisi ke-37, sedangkan Indonesia di posisi urutan ke-38, sementara itu Philipina dan Vietnam, masing-masing di posisi 59 dan 70.

Akibat ketatnya persaingan di pasar ASEAN, menyebabkan transaksi perdagangan Indonesia mengalami defisit dagang dengan Thailand hingga mencapai 1,048 miliar USD padahal *global competitiveness index* Indonesia hanya berselisih satu point dengan Thailand. Namun demikian, secara menyeluruh neraca perdagangan Indonesia pada bulan Februari 2014 masih surplus sebesar 843,4 juta USD dan turun menjadi 673,2 juta USD pada bulan Maret 2014, serta pada Jan-Sep 2015 mencapai surplus perdagangan sebesar 7,13 Miliar USD atau rata-rata 781,11 juta USD per bulan.

Surplus perdagangan Indonesia tersebut ternyata belum mencerminkan kekuatan struktur ekspor Indonesia. Industri atas produk-produk yang diekspor oleh Indonesia (selain produk pertanian), sebagian besar masih bergantung dengan bahan baku impor. Kondisi ini sangat rentan karena ekspor Indonesia akan bergantung dengan ketersediaan bahan baku dunia yang harganya akan menjadi mahal jika

terjadi pelemahan kurs rupiah khususnya terhadap USD. Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN, namun kenyataannya hanya mempunyai 450.000 wirausaha atau 0,18% dari total penduduk Indonesia padahal jumlah wirausaha yang ditargetkan pada tahun 2015 hanya 2% dari total penduduk Indonesia (Nazara, 2014).

Dibandingkan Amerika yang memiliki wirausaha sebanyak 12% dari total penduduk Amerika dan Singapore 7,20%, serta Malaysia 3%, sungguh jumlah wirausaha Indonesia jauh dari ideal untuk mendorong daya saing Indonesia dalam kancah ekonomi dunia, bahkan di ASEAN sekalipun. Belum lagi jika kita bicara tentang kualitas wirausaha Indonesia yang berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Hasil Sakernas (2007) memperlihatkan bahwa dari lulusan perguruan tinggi, hanya 26,29% yang menjadi wirausaha, sedangkan lulusan SLTA dan di bawahnya mencapai 73,71%. Inilah data yang mengindikasikan bahwa di Indonesia, semakin tinggi pendidikannya semakin rendah jiwa kewirausahaannya. Walaupun ada beberapa kasus yang unik dimana beberapa wirausahawan terkaya di dunia bukanlah berasal dari mereka yang berkemampuan akademik optimal, misalnya Wareen Buffet (pemilik pialang saham terkemuka) dan Bill Gate (pemilik Microsoft).

Kajian dari aspek jumlah penduduk, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar jika tidak dikelola secara baik tidak akan memberikan nilai tambah yang berarti dalam perekonomian. Penduduk yang berprofesi sebagai pekerja, jika tidak memiliki tingkat produktivitas yang memadai akan menjadi kendala dalam menghadapi pasar yang bersaing secara ketat.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia berdasarkan proporsi terhadap *Product Domestic Bruto (PDB)* per tenaga kerja, jauh lebih rendah dibandingkan Singapore, Malaysia, Thailand dan ASEAN. Dalam hal ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan ukuran PDB adalah 9,50%, jauh di bawah Singapore yang mencapai 92,00%, Malaysia 33,30%, Thailand 15,40% dan ASEAN 10,70%. Dalam hal produktivitas dengan ukuran PDB, Indonesia hanya sedikit lebih unggul dibandingkan Philipinnes (9,20%) dan unggul secara meyakinkan terhadap Vietnam (5,50%), Laos (5,00%), Cambodja (3,60%) dan Myanmar (3,40%).

Dari sisi liberalisasi perdagangan, produk Indonesia praktis tidak mengalami hambatan. Bahkan sektor usaha yang berbasis pada ekonomi kerakyatan (UMKM) berpeluang untuk menembus pasar ASEAN. Pemerataan pembangunan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan memang telah dilakukan oleh pemerintah. Mulai tahun 2011 pemerintah Indonesia telah mengarahkan investasi Indonesia ke wilayah-wilayah di luar pulau Jawa dengan memberikan *tax holiday*. Melalui upaya ini diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat di pulau Jawa, melainkan menyebar di luar wilayah pulau Jawa.

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk kluster untuk melakukan pembinaan UMKM agar daya saingnya meningkat. Sektor-sektor yang akan menjadi sektor unggulan Indonesia dalam pasar MEA 2015 harus pula ditempatkan secara benar sehingga memiliki tingkat kompetensi yang memadai, antara lain sektor Sumber Daya Alam, Informasi Teknologi dan Ekonomi Kreatif (Khususnya UMKM). Kesepakatan MEA juga mendorong masuknya tenaga kerja

asing ke Indonesia. Kondisi ini semakin memojokkan posisi ketenagakerjaan Indonesia, kecuali jika pemerintah memberikan persyaratan yang memadai bagi tenaga kerja asing yang masuk Indonesia (misalnya harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar).

Menurut Saparini (2015), posisi Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yang perlu mendapatkan perhatian khusus antara lain adalah (1) Indonesia berpotensi sekedar sebagai pemasok energi dan bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam akan minimal, sementara itu defisit neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN akan semakin bertambah; (2) melebarkan defisit neraca perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang; (3) membebaskan aliran tenaga kerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya tenaga kerja asing; dan (4) masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN.

Permasalahan dunia usaha di Indonesia dikemukakan oleh Simanjuntak dalam seminar Segmen Integrasi Ecosoc di Jakarta pada Februari 2015. Pemrasaran ini merilis hasil survei terhadap faktor-faktor yang menjadi permasalahan utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia, yaitu :

Korupsi	15,40%
Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien	14,30%
Ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur	9,50%
Ketidakstabilan kebijakan	7,40%

Akses keuangan	7,20%
Kurangnya tenaga kerja terdidik	6,40%
Etika kerja yang buruk pada ketenagakerjaan nasional	6,20%
Pemerintahan yang tidak stabil	6,10%
Inflasi	6,10%
Peraturan perpajakan	6,00%
Tarif pajak	4,20%
Regulasi pembatasan tenaga kerja	3,60%
Kriminalitas dan pencurian	2,80%
Buruknya kesehatan masyarakat	2,50%
Regulasi nilai tukar valuta asing	2,30%

2.2 Kebijakan Ekonomi dan Pengukuran Daya Saing

Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di antara tekanan perekonomian global dalam menghadapi MEA 2015, stimulus fiskal sebagai pendukung pertumbuhan jangka pendek sangat dibutuhkan. Peningkatan daya saing Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan dengan di luncurkannya beberapa kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang dimulai pada September 2015.

Kebijakan ekonomi 9 September 2015 di gulirkan pemerintah untuk empat aspek sasaran, yaitu

- (1) *akselerasi penyerapan anggaran* dengan mendorong program-program prioritas pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) *peningkatan daya beli* dengan mendorong tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan menjaga stabilitas harga;

- (2) *insentif dunia usaha* dengan memberikan stimulus pertumbuhan sektor prioritas melalui pertumbuhan investasi, penguatan daya saing produk dalam negeri dan insentif penunjang lainnya;
- (3) *memperkuat daya saing* dengan memperkuat daya saing potensi lainnya dan menstimulus perkembangan potensi baru.

Kebijakan ekonomi 29 September 2015 digulirkan pemerintah dengan 4 (empat) aspek sasaran, yaitu

- (1) *persetujuan tax allowance dan tax holiday* dengan cara mempercepat layanan investasi dalam bentuk memangkas perizinan investasi di kawasan industri;
- (2) *Insentif PPN Impor barang-barang tertentu* dengan memberikan keringanan PPN tidak dipungut untuk beberapa industri alat transportasi (utamanya untuk galangan kapal, kereta api, pesawat dan suku cadangnya);
- (3) *pembentukan pusat logistik berikat* yaitu Cikarang, terkait manufaktur dan Merak, Banten, terkait Bahan Bakar Minyak (BBM); (4) insentif pajak deposito dengan menurunkan pajak deposito bagi eksportir yang melaporkan Devisa hasil Ekspor (DHE) kepada Bank Indonesia (BI).

Kebijakan ekonomi 7 Oktober 2015 digulirkan pemerintah dengan 3 (tiga) aspek sasaran, yaitu

- a. *penyesuaian harga BBM* dengan menurunkan harga BBM, listrik dan gas untuk industri;
- b. perluasan penerima KUR dengan memperbesar kriteria penerima KUR, dan

- c. penyerdahaan izin pertanahan dengan melakukan smplifikasi persetujuan investasi.

Kebijakan ekonomi 15 Oktober 2015 yang digulirkan pemerintah dengan 3 (tiga) aspek sasaran, yaitu (1) *peningkatan kesejahteraan pekerja* dengan pemberian jaring pengaman melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula untuk memastikan pekerja / buruh tidak jatuh ke dalam upah murah; (2) *kebijakan KUR yang lebih murah dan meluas* dengan menurunkan tingkat bunga dari 22% menjadi 12%; dan (3) mendorong *ekspor untuk mencegah PHK* dengan cara memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah yang berorientasi ekspor maupun terlibat pada kegiatan yang mendukung ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Pengukuran daya saing di dasarkan pada 3 (tiga) kelompok pilar yang terdiri atas 12 pilar, yaitu : *Pertama*, pilar yang menjadi kunci faktor pendorong ekonomi, yaitu kelompok pilar dasar yang terdiri atas (a) kondisi makro ekonomi, (b) infrastruktur, (c) kesehatan, dan (d) pendidikan. *Kedua*, kelompok pilar efisiensi yang terdiri atas (a) pendidikan dan pelatihan (b) efisiensi pasar barang, (c) efisiensi pasar tenaga kerja, (d) pengembangan pasar uang, (e) kesiapan teknologi dan (f) ukuran pasar; *Ketiga*, kelompok pilar inovasi, yang terdiri atas (a) ketersediaan teknologi dan (b) kemudahan berusaha.

2.3. Mengapa Kebijakan Pemerintah Mengalami Kegagalan

Pemerintah yang terpilih untuk mengemban amanat rakyat haruslah pemerintah yang diisi oleh orang-orang yang berjiwa pemimpin dan bukan penguasa. Pemerintah yang berjiwa pemimpin

selalu melihat keluar (*out-work looking*) yaitu untuk kepentingan rakyat. Sementara pemerintah yang berjiwa penguasa akan selalu melihat kedalam (*in-work looking*) yaitu melihat kepentingan kelompoknya dan kepentingan dari golongan yang dibutuhkan untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kebijakan pemerintah dari seorang yang berjiwa pemimpin, jika diterapkan adalah dalam rangka melakukan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah di dalam pergerakan ekonomi nasional dibutuhkan karena adanya beberapa alasan, antara lain (1) untuk memenuhi perintah konstitusi negara, (2) mengatur persaingan usaha, (3) mengatur barang-barang publik, (4) mengatur masalah eksternalitas, (5) mengatasi ketimpangan ekonomi dan informasi pasar, serta (6) mengatasi pengangguran, inflasi dan ketidak merataan dalam pembangunan ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan menghadapi ekonomi global dan MEA adalah kemungkinan adanya kegagalan dari kebijakan pemerintah walaupun bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa kebijakan pemerintah gagal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, antara lain adalah (1) tidak mendapat dukungan dari seluruh *stakeholder*, (2) kebijakan utama tidak disertai dengan kebijakan pendukung yang komprehensif dan dilakukan bersamaan dengan kebijakan utama, (3) kebijakan yang benar namun dilakukan pada waktu yang salah, (4) kebijakan yang salah dilakukan pada waktu yang salah, dan (5) masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah (*public distrust*).

Di Indonesia sendiri sudah dijelaskan secara tegas dalam UUD 1945 khususnya pasal 33, mengenai peran negara dalam perekonomian dan bangun ekonomi kerakyatan. Makna pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah bahwa perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasar azas kekeluargaan; ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu bangun ekonomi kerakyatan dipertegas pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945 yang memastikan diterapkannya ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan ciri-ciri (1) mengembangkan koperasi dan BUMN, (2) memastikan pemanfaatan kekayaan nasional untuk kemakmuran rakyat, (3) menjaga stabilitas moneter, (4) menjaga hak setiap warganegara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Praktek ekonomi Indonesia yang mengganggu kesetiakawanan nasional dan menurunkan gairah masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan adalah adanya indikasi kuat bahwa praktek ekonomi Indonesia adalah “Neoliberal” yang terselubung dalam ekonomi Kerakyatan. Hal ini dapat diindikasikan dari ciri-ciri praktek ekonomi Indonesia yang berlaku hingga saat ini, antara lain (1) selalu mengandalkan mekanisme pasar sebagai pilar untuk menjaga stabilitas harga, (2) mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN sebagai prioritas utama, (3) memacu laju pertumbuhan ekonomi

dengan investasi asing, (4) anggaran ketat dengan menghapuskan subsidi, (5) lebih memprioritaskan stabilitas pasar uang daripada pasar barang.

2.4. Strategi Peningkatan Daya Saing

Strategi peningkatan daya saing harus diartikan sebagai upaya agar negara Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal (lingkungan MEA dan Global). Ansoff (1990) dengan tegas menyatakan bahwa “ organisasi yang sukses bukanlah organisasi yang besar, melainkan organisasi yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Jika lingkungan internal menunjukkan posisi kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal akan menunjukkan adanya peluang dan tantangan (David, 2015).

Strategi peningkatan daya saing sebenarnya sudah didukung oleh aturan yang jelas yang mengatur perilaku usaha para pengusaha. Dalam hal ini, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Di samping itu harus dilakukan peningkatan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan iklim usaha kondusif. Hal ini dilakukan dengan mengatur persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil ((Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 2-3).

Grant (1995) menjelaskan adanya empat penentu sukses dalam melaksanakan suatu strategi, yaitu (1) sasaran yang jelas, (2) pemahaman yang jelas dan akurat tentang lingkungan eksternal, (3) pemahaman yang jelas dan akurat tentang kekuatan dan kelemahan organisasi, serta (4) implementasi yang efektif. Sementara itu proses pelaksanaan strategi dijelaskan oleh Wheelen dan Hunger (2006) bahwa strategi harus dimulai dari pemetaan informasi lingkungan pembuat strategi, kemudian dilanjutkan dengan membuat formulasi strategi, melakukan implementasi dari strategi terpilih dan pada akhirnya melakukan evaluasi dan kontrol terhadap kinerja setelah strategi tersebut diimplementasikan. Sementara itu, Hrebiniak (2005) menjelaskan bahwa orang-orang yang sukses harus memiliki motivasi, kemampuan, komitmen dan mampu menciptakan, serta mengikuti rencana-rencana dalam sebuah tindakan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan atas pelaksanaan dari kerja kerasnya.

Selanjutnya, dengan memahami pendapat para ahli tersebut, maka praktek kebijakan di suatu negara tidak terlepas dari kemampuan para pembuat kebijakan terhadap apa yang harus diputuskan dengan memahami semua faktor yang masuk dalam pertimbangan ketika akan membuat kebijakan. Sementara itu implementasi dan segala konsekuensi dari dikeluarkannya kebijakan harus pula dipahami mulai saat merencanakan kebijakan dan tidak diputuskan secara parsial dan sporadis hanya ketika implementasi kebijakan tersebut mengalami masalah.

2.5 Strategi Pembangunan Yang Berpihak Pada Rakyat dan Konstitusi

Strategi pembangunan ekonomi yang dipilih oleh pemerintah Indonesia akan mendapat dukungan partisipasi penuh masyarakat dalam pelaksanaannya jika strategi tersebut mempertimbangkan secara utuh bangun ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan mengacu UUD 1945 pasal 33 dan pasal 27 ayat 2 serta pasal 34. Walaupun berselubung pada sistem ekonomi kerakyatan, namun dalam kenyatannya indikasi praktek ekonomi “Neoliberal” jelas terlihat terlihat dari aspek pilihan strategi yang dijalankan. Strategi yang menitik beratkan pengembangan pasar keuangan (pasar modal) yang jauh melampaui pasar barang dan pasar tenaga kerja mengindikasikan keberpihakan strategi tersebut kepada pemilik modal dan bukan masyarakat pada umumnya.

Dalam pasar modal, maka kelompok tertentu saja yang memiliki akses cukup dan mampu memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara sebagian besar masyarakat tidak dapat melakukannya. Jika perkembangan pasar modal yang selalu diikuti dengan perkembangan industri besar memiliki daya saing yang memadai, untuk pasar domestik maupun pasar global, maka strategi tersebut berpihak pada usaha besar yang dimiliki oleh sebagian kecil rakyat Indonesia, dan sebagian besar dari industri besar tersebut dimiliki oleh investor asing.

Rakyat Indonesia yang menurut bangun ekonomi sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 adalah berada pada tatanan usaha koperasi dan usaha kecil. Sayangnya, kelompok ini tidak mempunyai kemampuan cukup untuk melakukan akses pada pasar modal dan bahkan sering membutuhkan bantuan pemerintah hanya untuk memanfaatkan fasilitas perbankan.

Pengembangan pasar modal dan usaha besar memang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, jika dibandingkan strategi yang berpihak pada ekonomi tradisional (UKM) dan koperasi. Namun strategi yang berorientasi pada pertumbuhan saja akan memicu adanya kesenjangan ekonomi yang tajam. *Trade off* antara strategi pertumbuhan dan pemerataan perlu dicarikan jalan keluar secara bijaksana. Sejarah telah membuktikan bahwa strategi pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan konstitusi, pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Hasil strategi tersebut pasti tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan hanya akan menghasilkan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Oleh sebab itu, strategi pembangunan untuk meningkatkan daya saing harus dipilih dengan mengacu pada pembangunan berkesinambungan dan pembangunan manusia seutuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yaitu (1) pertumbuhan berbasis modal yang mengandalkan *trickle-down effect* tidak dapat dilanjutkan dan perlu diganti dengan *trickle-up effect*, (2) menempatkan masyarakat sebagai sasaran pembangunan harus diakhiri dan diganti dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama-sama pemerintah.

2. 5.1 Strategi Meningkatkan Produktivitas

Strategi meningkatkan produktivitas adalah strategi untuk meningkatkan kinerja usaha melalui peningkatan produktivitas SDM yang ada dalam usaha tersebut. Strategi untuk meningkatkan produktivitas dipahami sebagai suatu strategi yang mampu mengelola *input* dalam jumlah yang sama untuk menghasilkan *output* yang lebih

besar. Di samping itu strategi peningkatan produktivitas harus dapat memberikan pilihan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga dengan jumlah *input* yang lebih rendah, mampu menghasilkan *output* yang sama.

Strategi pengembangan produktivitas, hasilnya akan terlihat dari kemampuan negara dalam menghadapi persaingan dan kemampuan negara untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Strategi pengembangan produktivitas negara dapat ditempuh dengan melakukan strategi untuk (1) mengembangkan jumlah dan kualitas wirausaha Indonesia sehingga mendekati porsi yang ideal dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, (2) perbaikan sistem manajemen dan birokrasi, (3) melakukan inovasi teknologi dan *engineering*, (4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta (5) mengembangkan budaya produktif di semua lini usaha.

2.5.2 Strategi pengembangan wirausaha dapat dilakukan dengan cara :

1. Program pengembangan wirausaha dilakukan pemerintah melalui program-program pengembangan jiwa wirausaha di kalangan kampus. Strategi ini dilakukan dengan memberikan pembekalan konsep dasar wirausaha, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun CSR perbankan nasional. Selain itu diberikan pembekalan kepada dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan yang terdapat di dalam kurikulum operasional program studi, serta membiayai pelaksanaan praktek wirausaha di kampus-kampus.

2. Mendorong munculnya pengusaha pemula dengan memberikan kemudahan fasilitas usaha, kemitraan, dan kerjasama. Strategi memberikan akses pembiayaan melalui KUR, kemudahan akses pasar dan kemudahan berusaha juga dilakukan.
3. Memberikan kemudahan bagi UKM untuk masuk pada pasar ekspor dengan memberikan insentif ekspor dan keringanan pajak atas hasil ekspor.
4. Mengembangkan investasi dengan melakukan perluasan fasilitas investasi, fasilitas kepabeanan dan pengembangan kawasan industri, serta melakukan penataan dalam sistem logistik nasional dan penataan hubungan industri.

2.5.3 Strategi Perbaikan Sistem Manajemen dan Birokrasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk memudahkan pelayanan publik dan menekan biaya pengurusan izin usaha, sehingga dapat memperkecil *high cost economic* yang membebani pelaku usaha.
2. Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dengan memenuhi ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh jajaran birokrasi, mulai dari birokrasi yang paling rendah di tingkat kelurahan hingga birokrasi tertinggi di tingkat walikota dan gubernur, juga dalam lingkup kementerian.

2.5.4 Strategi Melakukan Inovasi Teknologi dan *Engineering* dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kemampuan perguruan tinggi untuk melakukan riset, serta mendorong pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian dana *CSR* guna melengkapi dana riset yang diberikan pemerintah secara terbatas.
2. Meningkatkan motivasi bagi para peneliti dengan memberikan sertifikasi hak kekayaan intelektual dan penghargaan lainnya bagi para peneliti yang menghasilkan temuan teknologi ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
3. Memberikan kemudahan fasilitas usaha yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya dengan memperhatikan faktor eksternalitas, melalui kegiatan perusahaan yang melestarikan lingkungan hidup di sekitar usahanya (misalnya membangun tempat pembuangan limbah pabrik), dan sebaliknya memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.

2.5.5 Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Mendirikan pusat penterjemahan nasional sehingga semua ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa dapat diserap oleh para pekerja, baik yang diserap melalui bacaan langsung maupun melalui pendidikan dan pelatihan yang telah dari para pendidik yang telah dibekali lengkap dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.

2. Mengembangkan standar kompetensi dengan memberikan sertifikasi ketenagakerjaan setelah melalui program pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, baik yang dilakukan oleh Diklat perusahaan maupun oleh pemerintah melalui Diklat pada kementerian atau instansi terkait.
3. Memberikan penghargaan yang memadai bagi tenaga kerja maupun tenaga profesi, seperti dokter dan tenaga pendidik, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya dengan dukungan fasilitas dan dana dari negara dengan mengikuti syarat dan prosedur yang ditentukan.
4. Meningkatkan kualitas hidup pekerja dengan perbaikan gizi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia seutuhnya.
5. Menciptakan iklim investasi UMKM untuk memberdayakan sektor informal guna mereposisi pengiriman tenaga kerja Indonesia karena sektor informal merupakan katup pengaman terjadinya pengangguran; Reposisi ini diperlukan untuk meningkatkan martabat bangsa dan pekerja itu sendiri di mata dunia dengan tidak mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, kecuali untuk teknisi.

2.5.6 Strategi Pengembangan Budaya Produktif dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan suasana kerja yang menjamin berlangsungnya budaya produktif, antara lain memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan fasilitas kerja yang memadai dengan memberikan jaminan kelangsungan pasokan listrik yang memadai dan berkesinambungan.

2. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan budaya organisasi yang menuntut para pekerja untuk produktif, dengan menerapkan sistem *punishment* dan *reward* yang jelas bagi para pekerja menggunakan *merit system* dalam menentukan jenjang karir bagi setiap pekerja.
3. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan sistem penggajian yang berbasis pada model remunerasi yang menentukan gaji berdasarkan produktivitas pekerja; ini harus dilakukan dengan memberikan contoh bahwa di instansi pemerintah yang menerapkan sistem remunerasi dapat mendorong produktivitas pejabat publik dalam melayani masyarakat.
4. Melalui manajemen pelaku usaha atau petugas penyuluh pada instansi terkait, dilakukan bimbingan bagi pekerja agar termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dengan meyakinkan dan mencontohkan bahwa pekerja yang produktif adalah pekerja yang bermartabat dan dibutuhkan oleh lingkungan usahanya, serta diperhitungkan dalam pergaulan dengan sesama pekerja.

BAGIAN III

INDONESIA DALAM PERDAGANGAN ASEAN :

SEBUAH TINJAUAN EKONOMI INTERNASIONAL

Memasuki Abad ke 20, Dunia internasional ditandai dengan perubahan isu internasional yang luar biasa, dari persaingan politik menjadi persaingan ekonomi internasional berbasis kawasan. Perubahan ini ditandai dengan muncul dan berkembangnya regionalisasi ekonomi di berbagai kawasan, tidak terkecuali kawasan Asia Pasifik, dan kawasan ekonomi Asean. Isu utama terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan perdagangan seiring dengan meningkatnya interdependensi global antar negara dan regionalisme ekonomi.

Hampir di setiap kawasan terdapat blok ekonomi dan perdagangan yang menyebutkan identitas regionalnya seperti *European Economic Community (EEC)*, *Latin America Free Trade Area (LAFTA)*, *North Amerika Free Trade Area (NAFTA)*, *Asean Free Trade Area (AFTA)* *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, dan lain-lain. Di samping itu penguatan fungsi organisasi atau lembaga internasional yang mengatur jalannya sistem perekonomian global semakin berperan penting antara lain: *World Trade Organization (WTO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, *Organization for Economic and Development (OECD)*.

Keberhasilan kerjasama ekonomi dari sistem internasional yang mengutamakan pemerintahan demokratis di negara-negara Barat telah berhasil melepaskan diri dari adanya *common threat* (ancaman

bersama), yaitu ancaman dan pengaruh ideologi komunisme. Berkurangnya faktor ancaman tersebut menunjukkan perkembangan dan kerjasama ekonomi yang kuat termasuk penanganan keterkaitan independensi ekonomi yang menjadi gejala utama di hampir setiap kawasan.

Globalisasi dan sistem ekonomi internasional memperkuat peranan neoliberalisme dengan menempatkan pasar bebas sebagai kekuatan utama. (*mainstream*). Akibatnya, negara-negara dituntut untuk mampu mengakomodasi sistem tersebut dengan mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju keterbukaan tata perekonomian dunia baru berdasarkan liberalisasi ekonomi. Hal ini diikuti dengan munculnya berbagai kesepakatan internasional di bidang ekonomi regional dan perdagangan berbasis kawasan dan geostrategis

Regionalisasi ekonomi dan perdagangan juga ditandai dengan persaingan antar kawasan dengan menghilangkan bentuk pemberian subsidi, kuota, lisensi, monopoli, serta tata niaga. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi di kawasan regional ASEAN, disepakati perjanjian yang akan meliberalisasi pasar dalam negeri secara signifikan. Perjanjian ini dikenal dengan ASEAN Free trade Area (AFTA) yang telah disepakati oleh anggota negara ASEAN, melalui forum pertemuan kepala Negara ASEAN atau ASEAN *Summit* ke-4 tahun 1992.

Tuntutan dan dinamika ekonomi regional mendorong perjanjian Asean summit ke 4 direvisi pada tahun 2007 dengan masuknya Cina pada tahun 2012 menjadi ASEAN-Cina Free trade Area (ACFTA) dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Kerjasama ini dilakukan untuk menjadikan kawasan ASEAN

basis produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global dan menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN (intra-ASEAN Trade).

Transformasi ini telah mendorong era baru dalam membangun kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat ASEAN. Seluruh masyarakat didorong menuju integrasi internasional untuk lebih memperluas hubungan dan kerjasama antar bangsa dunia. Pasar bebas merupakan dampak yang mengikuti globalisasi negara-negara ASEAN, dimana masyarakat ASEAN didorong untuk melakukan interaksi dan transaksi secara luas dalam berbagai bidang strategis.

Pemberlakuan dan pelaksanaan ACFTA dan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5 persen serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya. Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas dikawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong perkembangan positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain: pertama, mendorong pendapatan negara melalui ekspor dan impor. Kedua, membuka peluang industrialisasi baru di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Ketiga, memperluas lapangan kerja profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir diberbagai wilayah di ASEAN.

Namun pada saat yang bersamaan, kekhawatiran terhadap ekonomi pasar juga menjadi momok yang menakutkan bagi para pengusaha Indonesia, ditengah lemahnya daya saing industri lokal, lemahnya proteksi negara terhadap industri-industri lokal ditakutkan

mampu menggerus potensi pengusaha lokal dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih kekurangan dalam berbagai aspek ekonomi. Selain itu secara ekonomi, Indonesia tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Namun kegagalan ekonomi pasar lama telah membuka pasar bebas dalam cara pandang baru ekonomi pasar yang dibangun diatas otorisasi negara.

Negara menjamin berbagai macam sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan pasar, seperti stabilitas keuangan, keamanan domestik, serta penegakan hukum. Bila dibutuhkan, maka negara juga dapat menggunakan kekuatannya agar pasar dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Lebih jauh lagi, bila tidak terdapat pasar dalam area tersebut yang membutuhkan utilitas seperti tanah, air, listrik, pendidikan, jasa kesehatan, ataupun jaminan sosial..

Maka negara harus menyediakan pasar, karena dalam pandangan baru ekonomi pasar, peran negara akan dikurangi secara bertahap dan proporsional untuk menciptakan stabilitas pasa , sehingga peran negara tidak hilang seperti yang dipahami secara konvensional oleh paham ekonomi pasar yang lama, namun ekonomi pasar tetap menganut azas persaingan bebas yang mengharuskan semua pihak berkonsentrasi pada kualitas dan kecepatan dalam membaca kecenderungan pasar dan secara bersamaan negara memberikan proteksi yang mendukung pada dinamisasi pasar yang positif.

3.1 Integrasi Ekonomi Sebagai Prasarat

Hubungan ekonomi dan perdagangan yang semakin erat antar negara dalam kawasan ASEAN telah mendorong terjadinya saling ketergantungan serta keinginan untuk memperkuat hubungan intra

negara- negara ASEAN itu sendiri. Salah satu aspek penting yang mendorong dilakukannya perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN sebagai salah satu kebutuhan dalam memperkuat ekonomi kawasan Asean, adalah keuntungan ekonomi yang dapat didapatkan secara bersama melalui hubungan ekonomi dan perdagangan. Peningkatan hubungan serta keuntungan ekonomi yang terus berlanjut dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dalam mempererat hubungan, mendorong kesepakatan keinginan untuk mengintegrasikan ekonomi dengan cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini.

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Salvatore, menurutnya integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Kesepakatan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan hanya akan berlaku bagi negara-negara yang saling bersepakat, dan tidak berlaku atau diterapkan bagi negara-negara di luar itu.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Balassa dalam Wang, dia mengartikan integrasi ekonomi sebagai sebuah proses dan rancangan terukur yang merepresentasikan hilangnya segala bentuk diskriminasi ekonomi antar negara. Menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Negara-negara bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor

perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negaranegara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. Tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi itu dijelaskan oleh Balassa dan Salvatore, mereka berpendapat bahwa integrasi ekonomi dilakukan secara berurutan dari yang sangat longgar hingga yang paling dalam. *Pertama* ,adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya, namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tariff terhadap negara-negara non anggota

Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial atau *preferential trade arrangements* dan area perdagangan bebas menjadi tahap yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan (tidak menghilangkan) hambatan perdagangan antara negara yang bersepakat, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Kedua, persekutuan pabean atau *customs union*, penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat (layaknya area perdagangan bebas), ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan, seperti tarif, dengan negara non anggota, hal ini biasa disebut dengan *common external tariffs*; *Ketiga*, tingkatan ekonomi yang lebih tinggi berikutnya adalah pasar bersama atau *common market*. Menurut Balassa dan

Salvatore dalam pasar bersama ini, yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan

Faktor produksi seperti orang, dan modal. Selain itu saat ini, menurut Wang, berkembang apa yang disebut dengan pasar tunggal atau *single market*, menurutnya pasar tunggal memiliki tingkat integrasi yang sedikit lebih tinggi daripada pasar bersama, mengutip Peter Lloyd, pasar tunggal adalah prinsip atau hukum satu harga dalam barang, jasa, dan juga faktor-faktor pasar dalam suatu wilayah, sehingga dalam pasar tunggal dilakukanlah penyeragaman peraturan dan prosedur antara negara-negara anggota kesepakatan; *Keempat*, tingkat ekonomi yang paling tinggi, menurut Balassa dan Salvatore adalah persatuan atau uni ekonomi (*economic union*).

Dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Penyeragaman itu akan terjadi di bidang moneter, fiskal, finansial, dan juga penanggulangan permasalahan terkait ekonomi lainnya. Integrasi ekonomi dapat dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah ataupun tidak, beberapa ahli berpendapat integrasi ekonomi sama dengan regionalisme karena mereka tidak membedakan apakah integrasi itu terjadi dalam satu wilayah atau tidak ataupun juga bahwa regionalisme itu haruslah dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah.

Namun mengacu kepada pengertian regionalisme yang diberikan oleh WTO, yaitu bahwa regionalisme adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk melakukan liberalisasi atau

memfasilitasi perdagangan dalam lingkup regional, maka dapat disimpulkan bahwa regionalisme adalah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam wilayah yang sama atau negara-negara itu berdekatan letaknya. Integrasi ekonomi secara regional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan, atau yang biasa disebut dengan perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA) ataupun perjanjian perdagangan regional atau *regional trade agreement* (RTA). Kedua istilah ini sering dipakai bergantian karena dalam pandangan WTO pun, RTA tidak hanya sebatas perjanjian perdagangan bebas negara-negara dalam satu wilayah

3.2 Peran strategis Indonesia dalam kerjasama ASEAN

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah komunitas regional yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan ekonomi termasuk pasar semua negara anggota ASEAN. Terdapat 10 negara yang tergabung dalam MEA yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Mengetahui profil negara ASEAN sangat penting untuk mengukur kekuatan dan kelemahan masing-masing negara, sekaligus menggali peluang-peluang kerjasama bisnis/usaha dan menjadi persiapan dalam menghadapi tenaga kerja dan pelaku ekonomi dari negara-negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, sebagai persiapan jika sewaktu-waktu harus pergi, bekerja dan berusaha kenegara-negara anggota MEA.

Perdagangan bebas sebagaimana dimaksud dalam pilar pertama AEC Blueprint adalah menjadikan kawasan ekonomi ASEAN yang

bebas dari berbagai hambatan dan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Adapun capaian yang ingin diperoleh adalah pasar dengan aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga terampil dan terdidik, serta aliran modal yang lebih bebas di kawasan ASEAN. Tidak hanya pasar tunggal dan basis produksi saja yang disepakati dalam MEA tetapi MEA juga menyepakati tiga pilar lainnya, yakni ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi yang memiliki kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan intrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.

ASEAN sebagai kawasan yang pembangunan ekonominya merata dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah, serta prakarsa mengurangi kesenjangan pembangunan di ASEAN khususnya untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam). ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global melalui pendekatan ekonomi yang koheren dalam hubungan ASEAN dan mitranya di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produk global.

MEA dibentuk pada tahun 1997-1998, negara-negara anggota ASEAN menyadari pentingnya meningkatkan kerjasama, terutama saat terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara, sebagai bentuk sikap negara anggota ASEAN terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi serta persaingan global. Pada KTT ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur 15 Desember 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati.

ASEAN *Vision 2020*. ASEAN *Vision 2020* yaitu sebuah visi jangka panjang untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang stabil,

makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi merata yang ditandai oleh penurunan tingkat kemiskinan dan penghilangan perbedaan sosial ekonomi. Para Pemimpin ASEAN memprioritaskan dan mendeklarasikan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan mengusung tujuan integrasi ekonomi regional tahun 2020.

Konsep MEA ini mengalami kemajuan pada KTT ASEAN ke-10 di Laos, 2004, dengan disusunnya strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020. Para pemimpin ASEAN memperkuat upaya menuju MEA pada KTT ke-12 di Filipina, 13 Januari 2007, dengan menyepakati "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Disepakati juga percepatan implementasi *blueprint* MEA dari tahun 2020 menjadi 2015. Tepatnya, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terimplementasi secara penuh pada 31 Desember 2015 lalu.

Untuk memperkuat daya saing ASEAN dalam persaingan global agar mampu bersaing dengan kawasan perdagangan bebas lainnya termasuk dalam rangka bersaing dengan kemajuan ekonomi mitra perdagangan bebasnya seperti Tiongkok, India, Jepang, maupun di pasar Uni Eropa dan Amerika. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar dalam konteks perundingan ASEAN Plus 1 (Tiongkok, Korea, Jepang, Australia-New Zealand, India, Uni Eropa), dan sebagai respons atas kecenderungan terhadap regionalisme. Percepatan juga dilakukan karena beberapa hal berikut:

- i. Adanya potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi

- ii. Potensi meningkatnya kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan adanya persaingan.

Sasaran utama dari pembentukan MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang makmur dan berdaya saing dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. Masyarakat regional ini juga bertujuan agar masyarakat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk mempermudah implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah menjadi kesepakatan dalam mempercepat integrasi untuk sektor-sektor prioritas; mempermudah perpindahan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat; serta memperkuat mekanisme institusi ASEAN.

Harapan dari pelaksanaan MEA yaitu bergulirnya MEA diharapkan memberikan manfaat positif bagi perekonomian negara-negara anggotanya sekaligus sebagai upaya negara anggota ASEAN untuk saling menyesuaikan cara pandang di antara sesama negara Asia Tenggara agar lebih terbuka membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan. Keterbukaan tersebut tentunya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu, saling menghormati (mutual respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), konsensus, dialog dan konsultasi.

MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu :

- i. Pasar tunggal dan basis produksi;
- ii. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- iii. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata;

iv. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Keempat karakteristik tersebut saling berkaitan erat dan memperkuat satu sama lainnya. Hal ini dibutuhkan, mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain di luar kawasan. Juga menjadi kebutuhan MEA untuk tetap berwawasan ke luar ASEAN.

3.3 Kerjasama Indonesia dengan Intra negara ASEAN

a. Hubungan Indonesia-Singapura

Ekspor Indonesia dengan Negara anggota ASEAN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Volume ekspor terbesar Indonesia adalah dengan Singapura, Malaysia, dan kemudian di ikuti oleh Thailand. Ekspor Indonesia dengan Singapura pada tahun 2011 sebesar US\$ 18,4 meningkat tahun disbanding tahun sebelumnya 2010 yang hanya S\$ 13,7 dengan share 43,81 %. Besarnya peran tersebut didominasi oleh minyak mentah, gas alam, timah, karet, kopra dan elektronik untuk memenuhi kebutuhan industri di Singapura. Sementara untuk produk yang di ekspor Singapura ke Indonesia meliputi hasil sulingan minyak bumi, kapal, pakaian jadi, tekstil, pipa besi dan baja dan bahan kimia. Namun pada tahun 2012 (18, 4 Miliar) ekspor Indonesia ke Singapura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya 17,1 miliar. Sementara untuk impor dari Singapura ke Indonesia untuk tahun 2008 hingga 2010 mengalami fluktuasi dan stabil di tahun 2011 hingga 2012. Neraca perdagangan Indonesia-Singapura selama 5 tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan posisi defisit dengan ketiga negara dan defisit terbesar di alami dengan Singapura.

b. Indonesia-Malaysia

Malaysia pun menjadi urutan ke 2 , negara ASEAN yang siap dalam menghadapi AFTA. Ekspor Indonesia ke Malaysia pada tahun 2010 mengalami peningkatan, tercatat sebesar US\$ 19,36 milyar, meningkat 27,66 % dibanding dengan tahun 2009 (US\$ 6,81 milyar). Ekspor Indonesia ke Malaysia tahun 2009 hanya meningkat 3 % dari tahun sebelumnya, namun hingga tahun 2012 ekspor terus meningkat. Tren perdagangan Indonesia dengan Malaysia selama 5 tahun (2008-2012) positif 15 %. Produk unggulan Indonesia yang di ekspor ke Malaysia di antaranya minyak sawit, karet alam, kertas, serta tekstil. Impor Indonesia dari Malaysia pada tahun 2009 sebesar US\$ 5,68 milyar menurun dari tahun sebelumnya sebesar US\$ 8,99 milyar. Penurunan impor ini tercatat pada *refined petroleum products, electronics & Electrical products, crude petroleum, manufactures of metal dan chemicals and chemical products*¹². Trend selama 5 tahun (2008-2012) positif 8 %.

Neraca perdagangan Indonesia-Malaysia pada tahun 2012 menunjukkan posisi defisit untuk Indonesia sebesar US\$ 12.2 Milyar, atau meningkat dibanding dengan defisit tahun 2011 (10,9 milyar). Selama 5 tahun terakhir (2008-2012) , neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi Malaysia. Pada periode tahun 2010-2011, neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi Indonesia sebesar US\$ 9,36 milyar dan US\$ 10,9 milyar.

c. Indonesia-Thailand

Negara 3 yang mendominasi perdagangan di kawasan ASEAN adalah Thailand. Dari grafik ekspor Indonesia ke Thailand dari tahun

2009-2012 mengalami peningkatan walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak signifikan. Trend selama 5 tahun (2008 - 2012) positif 16 %. Ekspor Indonesia ke Thailand di antaranya adalah kayu lapis dan minyak bumi. Sementara untuk Impor dari Thailand ke Indonesia meningkat tipis dari tahun 2008-2012 dengan share 15,5% di tahun 2008 dan share 21,3 % di tahun 2012. Produk impor Thailand yang membanjiri Indonesia di antaranya beras dan gula. Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras Thailand dikarenakan Indonesia mengalami krisis ketahanan pangan nasional. Dari beberapa literatur, kini Thailand mampu mengekspor 2,3 juta unit mobil per tahun di kawasan ASEAN hal ini menandakan bahwa industri di Thailand cukup maju. Neraca perdagangan Indonesia - Thailand tahun 2012 menunjukkan defisit untuk Indonesia sebesar US\$ 6,63 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya.

Sedangkan neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi Thailand sehingga dapat dikatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia –Thailand selama 5 tahun mengalami defisit. Konflik geopolitik yang tengah dihadapi Thailand beberapa bulan ini memberi dampak baik positif maupun negatif bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN. Dampak positif bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN sekitarnya adalah seperti beralihnya tujuan wisatawan mancanegara dan mendorong sebagian pelaku usaha untuk memindahkan basis produksinya ke Filipina, Vietnam, atau Indonesia. Untuk Indonesia sendiri dampak yang paling terasa adalah ekspor elektronik dan otomotif ke Thailand menurun. Sementara impor dari Thailand ke Indonesia juga mengalami penurunan.

Kerjasama ASEAN dengan negara mitra strategis ASEAN – Jepang

Kerja sama ASEAN-Jepang, yang pada awalnya ditekankan pada hubungan kerja sama ekonomi, secara formal dimulai dari pembentukan Forum ASEAN-Jepang pada bulan Maret 1977. Forum ini kemudian diikuti dengan pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata yang saat ini lebih dikenal sebagai ASEAN-Japan Centre/AJC

Kerja sama ASEAN-Jepang memberikan prioritas pada bidang kontra terorisme, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, termasuk penanganan pembajakan laut, dan pertukaran pemuda/masyarakat. Jepang juga mendukung implementasi *Master Plan of ASEAN Connectivity* melalui kerja sama pengembangan konektivitas.

Pada KU ke-14 ASEAN-Jepang di Bali tanggal 18 November 2011, para pemimpin ASEAN dan Jepang membahas berbagai bidang kerja sama seperti *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*, *disaster management*, *ASEAN Connectivity*, *People-to-People Contact*, *Narrowing Development Gap*, dan isu politik mengenai Myanmar. Dalam KTT tersebut juga dikeluarkan dokumen *Joint Declaration for Enhancing ASEAN-Japan Strategic Partnership for Prospering Together (Bali Declaration)* dan *ASEAN-Japan Plan of Action 2011-2015* sebagai pedoman bagi kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, dan hubungan sosial budaya yang bermuara pada terbentuknya Komunitas ASEAN 2015. Disepakati bahwa implementasi kerja sama dituangkan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN*

Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus).

Kerja sama dalam bidang ekonomi antara ASEAN dengan Jepang pertama kali diwujudkan melalui penandatanganan *Joint Declaration of the Leaders on the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan*, Phnom Penh - Kamboja, 5 November 2002, dan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan*, Bali - Indonesia, 8 Oktober 2003. Dalam perkembangannya, ASEAN dan Jepang kemudian menandatangani kesepakatan *Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the ASEAN and Japan (AJCEP)* secara *ad-referendum* pada April 2008. AJCEP menyepakati ketentuan perdagangan barang (*trade in goods*).

ASEAN – Republik Rakyat Tiongkok

Hubungan kerja sama ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara informal dimulai pada tahun 1991 dan kemudian RRT dikukuhkan menjadi mitra wicara ASEAN pada tahun 1996. Kerja sama kemitraan ASEAN dan RRT memiliki 11 prioritas bidang kerja sama, yaitu pertanian, energi, informasi dan teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi bersama, pembangunan wilayah Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam dan energi. Di bidang ekonomi, perdagangan antara ASEAN dan RRT pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan setelah sempat turun pada tahun 2009 sebagai akibat krisis keuangan global. Ekspor ASEAN ke RRT yang meningkat sebesar 39,1% dan US\$ 81,6 miliar pada 2009

menjadi US\$ 113,5 miliar di tahun 2010, membuat RRT menjadi tujuan ekspor kedua terbesar ASEAN. RRT mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar ASEAN dihitung dan 11,3% total perdagangan ASEAN.

Sementara itu, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-4 RRT dihitung dan 98% total perdagangannya. Kerja sama ASEAN-RRT dalam kerangka area perdagangan bebas dimulai sejak penandatanganan *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* oleh Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT pada bulan November 2004. Sementara itu, *Agreement on Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement* ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Implementasi FTA ASEAN-RRT di bidang perdagangan barang telah dilakukan sejak 1 Januari 2010. Dalam menyikapi hal tersebut, ASEAN dan RRT telah meluncurkan *ASEAN-China FTA Business Portal* (BIZ Portal) pada penyelenggaraan Forum *ASEAN-China Free Trade Area* di Nanning City, Guangxi Zhuang tanggal 7 Januari 2010. BIZ Portal tersebut menyediakan informasi penting kepada para pelaku usaha dalam kerangka FTA ASEAN -RRT. Selanjutnya BIZ Portal diharapkan dapat berkembang menjadi *e-commerce* sebagai salah satu sarana transaksi bisnis antara perusahaan ASEAN dan RRT. Pada akhir rangkaian KTT ke-14 ASEAN-RRT, diresmikan pendirian ASEAN-China Centre (ACC) yang berfungsi sebagai pusat promosi kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan antara ASEAN dan RRT.

ASEAN – Republik Korea

Kemitraan ASEAN dan Republik Korea pertama kali terjalin pada bulan November 1989 dan sejak tahun 1991 Republik Korea menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, *ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement* (AKFTA) secara khusus dimulai dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* dan *Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership* di pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat sekaligus meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Tujuan itu dicapai dengan meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan rezim investasi yang transparan, bebas, dan fasilitatif. Perjanjian ini kemudian diikuti dengan penandatanganan *Agreement on Trade in Goods* (2006), *ASEAN-Republic of Korea Agreement on Trade in Services* (2007), dan *ASEAN-Republic of Korea Agreement on Trade in Investment* (2009). Guna memaksimalkan kerangka AKFTA khususnya dalam bidang perdagangan barang, para Menteri Ekonomi ASEAN dan Republik Korea telah menandatangani *Second Protocol to Amend Trade in Goods Under AKFTA* di sela-sela KTT ke-19 ASEAN pada 18 November 2011, Nusa Dua, Bali.

ASEAN-India

India menjadi Mitra Wicara ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya

menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. ASEAN dan India berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Perdagangan dan investasi, pengembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi, dan hubungan antar masyarakat. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan.

- (1) *ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity* dan
- (2) *Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and shared Prosperity (PoA)* pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004. Kedua dokumen tersebut merupakan dasar pelaksanaan kerja sama kemitraan ASEAN-India hingga saat ini. Kerja sama ekonomi ASEAN dan India diatur antara lain dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India* yang ditandatangani para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003.

Kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan penandatanganan *ASEAN-India Trade in Goods Agreement* enam tahun berselang, atau tepatnya pada 13 Oktober 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. *ASEAN-India Trade in Goods Agreement* mencakup liberalisasi sekitar 90% produk yang diperdagangkan di kedua kawasan, termasuk produk yang dikenal dengan sebutan “*Special Product*”, seperti minyak sawit, kopi, teh hitam, dan merica. Sekitar 4.000 tarif akan dihapus pada tahun 2016.

ASEAN-Australia

Kerja sama ASEAN-Australia dimulai pada tahun 1974, diawali dengan pembentukan *ASEAN-Australia Consultative Meeting* (AACM) yang kemudian diikuti dengan berbagai dialog ASEAN-Australia pada berbagai tingkatan al. *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN-Australia Forum* dan berbagai kelompok kerja seperti di bidang perdagangan dan investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup serta kebudayaan dan informasi. Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, ASEAN dan Australia serta Selandia Baru telah menandatangani persetujuan FTA ASEAN – Australia dan Selandia Baru(*ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area/AANZFTA*) di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand pada 27 Februari 2009. Kesepakatan AANZFTA itu mengamanatkan pengurangan tarif secara bertahap dimulai pada 1 Januari 2010. Kesepakatan AANZFTA merupakan FTA pertama ASEAN dengan mitranya yang mencakup berbagai elemen secara lengkap yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, jasa keuangan, telekomunikasi; *electronic commerce*, *Movement of Natural Person*, Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha, dan kerjasama ekonomi.

ASEAN-Amerika Serikat

Kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat yang berlangsung sejak tahun 1977 meliputi bidang kerja sama yang luas, antara lain di bidang politik dan keamanan: nonproliferasi senjata nuklir di kawasan, kejahatan lintas negara, kontra terorisme, pembangunan

kapasitas, penegakan hukum, dan promosi HAM. Sedangkan di bidang ekonomi meliputi: perdagangan, investasi, dukungan Amerika Serikat untuk implementasi konektifitas ASEAN, pembangunan tatanan ekonomi global, dan kerja sama keuangan. Landasan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan adalah *US-ASEAN Trade and investment Framework Agreement* (TIFA) yang ditandatangani pada tahun 2006 pada Pertemuan ke-38 AEM di Kuala Lumpur, tanggal 25 Agustus 2006 oleh Menteri Ekonomi Negara Anggota ASEAN dan *United States Trade Representative/USTR* yang khusus menangani kerja sama yang terkait dengan perdagangan dan investasi, Visi Pembangunan ASEAN untuk Memajukan Integrasi Ekonomi (*ASEAN Development Vision to Advance Economic integration/ADVANCE*).

ASEAN-Kanada

Kerja sama ASEAN dan Kanada pertama kali dimulai pada tahun 1977 saat itu Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN dan berkeinginan menjalin kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan. Dalam perkembangan kemudian kedua belah pihak juga menyepakati untuk bekerja sama di bidang kontra terorisme internasional, kejahatan lintas negara, keamanan kesehatan, dialog antar keyakinan, dan bantuan teknis serta pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN. Di bidang kerja sama ekonomi khususnya bantuan teknis dan pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal *ASEAN-Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP* (ACTIV) sebagai

fasilitas dukungan para ahli dan Kanada melalui Sekretariat ASEAN. Kemudian, pada KTT ke-14 ASEAN disahkan *Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015* yang kemudian ASEAN meminta Kanada untuk menyetujui merevisi *Terms of Reference (ToR) on ASEAN-Canada Technical Initiatives* yang sebelumnya didasarkan atas *Vientiane Action Program (yAP)*.

Pertemuan formal ASEAN dan Kanada pertama kali dilaksanakan melalui *ASEAN Standing Committee (ASC)*, Februari 1977. Pada Pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan *ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA)* pada tanggal 25 September 1981 di New York, Amerika Serikat. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan *ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (ICC)* pada tanggal 1 Juni 1982 yang berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada guna membahas kerja sama di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan.

Kemitraan ASEAN -Uni Eropa

Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (*European Union/EU*) secara informal dimulai tahun 1972. Adapun secara formal kemitraan dimulai tahun 1977 dengan pembentukan kerja sama perdagangan, ekonomi dan teknis, serta pembentukan *Joint Cooperation Committee (JCC)*. ICC bertugas untuk mengawasi kerja sama tersebut. Mekanisme kerja sama ASEAN -Uni Eropa dijalankan melalui dua skema, yaitu, *Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI)* untuk bidang

perdagangan dan investasi, yang diluncurkan tahun 2003; serta *Regional EU-ASEAN Dialog Instrument* (READI) yang disepakati tahun 2005 untuk bidang nonperdagangan. Peningkatan kerja sama ekonomi dilakukan dengan perundingan *ASEAN- EU Free Trade Agreement* (ETA) berdasarkan pendekatan *region-to-region approach*, dan memperhatikan tingkat perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN. Perundingan ASEAN -EU FTA diluncurkan pada Pertemuan ke-S *AEM-EU Trade Consultations* di Brunei Darussalam, tanggal 4 Mei 2007 melalui *Joint Ministerial Statement on the Launch of the ASEAN-EU FTA Negotiations*. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, telah dibentuk *joint Committee on ASEAN-EU Free Trade Agreement* (JCAEFTA) guna melakukan negosiasi FTA, yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juli 2007. Pada Pertemuan ke-7 JCAEFTA di Kuala Lumpur tanggal 4-5 Maret 2009, dibahas beberapa *pending matters* dalam negosiasi *ASEAN-EU FTA*, antara lain: lambatnya proses negosiasi, perbedaan tingkat ambisi antara ASEAN dan Uni Eropa, dan isu Myanmar.

BAGIAN IV

MANFAAT INTEGRASI EKONOMI

Kesediaan Indonesia bersama-sama dengan 9 (sembilan) Negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan ASEAN. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.

Pewujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlah penduduk ASEAN sudah mencapai 584 juta orang (ASEAN Economic Community Chartbook, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan usia mayoritas berada pada usia produktif. Pertumbuhan ekonomi individu Negara ASEAN juga meningkat dengan stabilitas makroekonomi ASEAN yang cukup terjaga dengan inflasi sekitar 3,5 persen³. Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN) tentu saja merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan.

Pada umumnya, konsentrasi perdagangan ASEAN masih dengan dunia meskipun cenderung menurun dan beralih ke intra - ASEAN. Data perdagangan ASEAN menunjukkan bahwa share perdagangan ke luar ASEAN semakin menurun, dari 80,8% pada tahun 1993 turun menjadi 73,2% pada tahun 2008, sedangkan share perdagangan di intra-ASEAN meningkat dari 19,2% pada tahun 1993 menjadi 26,8% pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi dengan Indonesia dalam 5 tahun terakhir, namun perubahannya tidak signifikan. Nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra - ASEAN.

Indonesia sudah mencatat 10 (sepuluh) komoditi unggulan ekspornya baik ke dunia maupun ke intra-ASEAN selama 5 tahun terakhir ini (2004-2008) dan 10 (sepuluh) komoditi ekspor yang potensial untuk semakin ditingkatkan. Komoditi unggulan ekspor ke dunia adalah minyak kelapa sawit, tekstil & produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet & produk karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang, dan kopi, sedangkan komoditi ekspor ke intra - ASEAN adalah minyak petroleum mentah, timah, minyak kelapa sawit, *refined copper*, batubara, karet, biji kakao, dan emas.

Disamping itu, Indonesia mempunyai komoditi lainnya yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai ekspornya ke dunia adalah peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan & produk perikanan, minyak atsiri, makanan olahan, tanaman obat,

peralatan medis, serta kulit & produk kulit. Tentu saja, Indonesia harus cermat mengidentifikasi tujuan pasar sesuai dengan segmen pasar dan spesifikasi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Kerjasama tersebut di atas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa ASEAN merupakan pasar dan memiliki basis produksi. Fakta fakta tersebut merupakan faktor yang mendorong meningkatnya investasi di dalam negeri masing-masing anggota dan intra-ASEAN serta masuknya investasi asing ke kawasan. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya. Dari segi peningkatan investasi, berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya *regional hub-production*.

Bagi Indonesia, salah satu faktor penyebab penting penurunan rasio investasi ini adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastruktur. Dalam rangka AEC 2015, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam meluncurkan program perbaikan infrastruktur domestik. Sedangkan, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menja di prakondisi untuk menyesuaikan peraturan invetasi sesuai standar kawasan.

Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi

di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

Di bidang jasa, ASEAN juga memiliki kondisi yang memungkinkan agar pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Sektor-sektor jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN dan kemudian akan disusul dengan logistik. Namun, perkembangan jasa prioritas di ASEAN belum merata, hanya beberapa negara ASEAN yang mempunyai perkembangan jasa yang sudah berkembang seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Kemajuan ketiga negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dan acuan untuk perkembangan liberalisasi jasa di ASEAN. Lebih lanjut, untuk liberalisasi aliran modal dapat berpengaruh pada peningkatan sumber dana sehingga memberikan manfaat yang positif baik pada pengembangan system keuangan, alokasi sumber daya yang efisien, serta peningkatan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi jumlah tenaga kerja,

Indonesia yang mempunyai penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015. Standardisasi yang dilakukan melalui *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

4.1 Aliran Modal dan Peningkatan Ekspor

Dari sisi penarikan aliran modal asing, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam. AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja berupa porsi dari portfolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA).

Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standarisasi, maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait. Sebagai contoh adalah penerapan *ASEAN Single Window* yang seharusnya dilakukan pada tahun 2008 (hingga saat ini masih dalam proses) untuk ASEAN-6 mengharuskan penerapan sistem *National Single Window (NSW)* di masing-masing negara.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Kinerja ekspor selama periode 2004 – 2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, merupakan tantangan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut.

Ancaman yang diperkirakan lebih serius lagi adalah perdagangan bebas ASEAN dengan China. Hingga tahun 2007, nilai perdagangan Indonesia dengan China masih mengalami surplus, akan tetapi pada tahun 2008, Indonesia mengalami defisit sebesar + US\$ 3600 juta. Apabila kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, nilai defisit perdagangan dengan China akan semakin meningkat. Akhir-akhir ini para pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik, menyampaikan kekhawatirannya dengan masuknya produk-produk sejenis dari China dengan harga yang relatif lebih murah dari produksi dalam negeri.

Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Populasi Indonesia yang terbesar di ASEAN membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerataan pendapatan, 3 (tiga) Negara ASEAN yang lebih baik

dalam menarik PMA mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Indonesia.

4.2 Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Bebas

Arus modal yang lebih bebas untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, proses liberalisasi arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan permintaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi. Selain itu, aliran modal yang lebih bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke Negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini kemudian dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitas makroekonomi.

Hal lain yang perlu dicermati adalah kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN, khususnya di sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik. Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra -ASEAN yang hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eskpornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara -negara ASEAN lainnya.

Tantangan lain yang juga dihadapi oleh Indonesia adalah peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi. Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan tingkat keunggulan yang terbatas.

Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi ketentuan dalam MRA yang telah disetujui. Pada tahun 2008-2009, Mode 3 pendirian perusahaan (commercial presence) dan Mode 4 berupa mobilitas tenaga kerja (movement of natural persons) intra ASEAN akan diberlakukan untuk sektor prioritas integrasi.

Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh, dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

4.3 Daya Saing Indonesia dan Tingkat Perkembangan Ekonomi

Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga saat ini masih beragam. Secara sederhana, penyebutan ASEAN-6 dan ASEAN-4 dimaksudkan selain untuk membedakan tahun bergabungnya dengan ASEAN, juga menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi. Apabila diteliti lebih spesifik lagi, tingkat kemajuan berikut ini juga terdapat diantara Negara Anggota ASEAN: kelompok

negara maju (Singapura), kelompok negara dinamis (Thailand dan Malaysia), kelompok negara pendapatan menengah (Indonesia, Filipina, dan Brunei), dan kelompok negara belum maju (CLMV). Tingkat kesenjangan yang tinggi tersebut merupakan salah satu masalah di kawasan yang cukup mendesak untuk dipecahkan agar tidak menghambat percepatan kawasan menuju MEA 2015. Oleh karenanya, ASEAN dalam menentukan jadwal komitmen liberalisasi mempertimbangkan perbedaan tingkat ekonomi tersebut. Dalam rangka membangun ekonomi yang merata di kawasan (region of equitable economic development), ASEAN harus bekerja keras di dalam negeri masing-masing dan bekerja sama dengan sesama ASEAN.

Menurut Kompas tanggal 25 November 2015 melansir berita bahwa *Institute of Management Development* (IMD) yang merupakan lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss melaporkan hasil penelitiannya berjudul *IMD World Talent Report 2015*. Penelitian ini berbasis survei yang menghasilkan peringkat tenaga berbakat dan terampil di dunia tahun pada tahun 2015. Tujuan dari diadakannya pemeringkatan oleh IMD adalah untuk menilai sejauh mana negara tersebut menarik dan mampu mempertahankan tenaga berbakat dan terampil yang tersedia di negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di suatu negara. Laporan ini terasa spesial karena Indonesia termasuk dalam salah satu dari 61 negara di dunia yang di survei. Namun demikian, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa peringkat Indonesia turun 16 peringkat dari peringkat ke-25 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Posisi Indonesia juga hanya sedikit lebih baik dari

Filipina. Peringkat ini dihitung dengan bobot tertentu dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu faktor pengembangan dan investasi, faktor daya tarik suatu negara, dan faktor kesiapan sumber daya manusia. Masing masing faktor terbagi lagi ke dalam beberapa rincian lainnya.

Dua faktor pertama Indonesia mempunyai peringkat yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk faktor ketiga yaitu kesiapan sumber daya manusia merupakan hal yang paling dominan menyumbang angka penurunan peringkat tenaga terampil Indonesia di tahun 2015. Pada tahun 2014, Indonesia masih menduduki peringkat ke-19 untuk faktor ini. Di tahun 2015, peringkat kesiapan tenaga kerja Indonesia terjerembab ke peringkat 42. Faktor kesiapan tenaga kerja Indonesia dirasa masih kurang bersaing dari negara lain di tahun 2015. Untuk faktor ini, Indonesia hanya unggul dalam pertumbuhan angkatan kerja saja dimana Indonesia menduduki peringkat kelima. Indikator lainnya seperti pengalaman internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan pada keterampilan bahasa berada pada peringkat di atas 30. Bahkan untuk keterampilan keuangan, Indonesia berada pada peringkat ke-44.

Hasil survei lain dari World Bank dengan judul *Ease of Doing Business* 2016 yang dirilis beberapa bulan lalu sedikit kontradiktif. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia meningkat sebelas peringkat dari sebelumnya peringkat ke-120 menjadi peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei oleh World Bank. Kemudahan bisnis di Indonesia akan mendorong para pengusaha dari dalam maupun luar negeri untuk memulai bisnis ataupun melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Di sisi lain, apabila

dikaitkan dengan IMD *World Talent Report* 2015, penulis berpandangan bahwa hal ini merupakan sinyal bahwa tenaga berbakat dan terampil Indonesia kurang bisa bersaing dengan baik dengan warga negara ASEAN lainnya khususnya Singapura, Thailand dan Malaysia. Jangan sampai kemudahan bisnis yang telah diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia justru lebih dimanfaatkan negara lain dalam berbisnis di Indonesia dengan tetap membawa tenaga kerja terampil dari negaranya sementara warga negara Indonesia tidak bisa bersaing dengan warga negara asing lainnya.

Survei tentang sisi positif Indonesia juga diungkap oleh Legatum Institute dalam *The Legatum Prosperity Index* 2015. Survei tersebut menceritakan kisah kemajuan manusia tidak hanya sekedar dari sisi ekonomi. Agar suatu negara tumbuh dengan baik, suatu negara harus memberikan kesempatan dan kebebasan kepada warganya. Survei ini juga menunjukkan bagaimana akses terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga negara tersebut bisa tumbuh menjadi negara yang lebih maju. Survei juga membuktikan bahwa pemerintahan yang efektif dan transparan akan mampu memberdayakan warga negaranya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Hal yang patut digarisbawahi dalam *Prosperity Index* 2015 adalah bahwa Indonesia berdiri sebagai negara dengan performa terbaik secara keseluruhan. Hal ini tercermin bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak tahun 2009, Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 21 peringkat dari peringkat ke-85 ke peringkat ke-64.

Terlepas dari hasil berbagai macam survei dengan berbagai rincian di dalamnya, penulis dan beberapa peneliti di bidang Pemantauan Sistem Keuangan di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal berpandangan bahwa Indonesia tidak seharusnya merasa berkecil hati ataupun terlalu berbangga diri dengan hasil survei tersebut. Indonesia harus kembali fokus pada perbaikan di dalam negeri. Masih begitu banyak ruang yang bisa digali untuk dilakukan perbaikan. Masih begitu banyak juga pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya. Namun demikian, hal ini sangat tidak mustahil apabila semua pihak bersungguh-sungguh mengusahakannya, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, sehingga cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur akan tercapai. Hal lain yang tak kalah penting adalah koordinasi antar berbagai pihak terkait. Koordinasi merupakan kata sederhana namun mahal harganya dan susah dikerjakan di negeri tercinta ini

Secara teoritis, perdagangan bebas antar kedua Negara akan membuat Negara yang memiliki keunggulan komparatif akan saling mengimpor atau mengekspor dan akibatnya volume perdagangan akan sama meningkat jika masing-masing mengambil spesialisasi dalam memproduksi barang. Dalam hal ini Indonesia sangat diuntungkan karena merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di kawasan ASEAN, ini merupakan suatu kesempatan bagi Indonesia dalam memajukan perekonomian jika Indonesia benar-benar berperan aktif dalam memanfaatkan momen ini. Tidak hanya sebagai Negara tujuan ekspor namun Indonesia juga diharapkan mampu menjadi raksasa yang mampu mengimpor produk ke seluruh kawasan ASEAN.

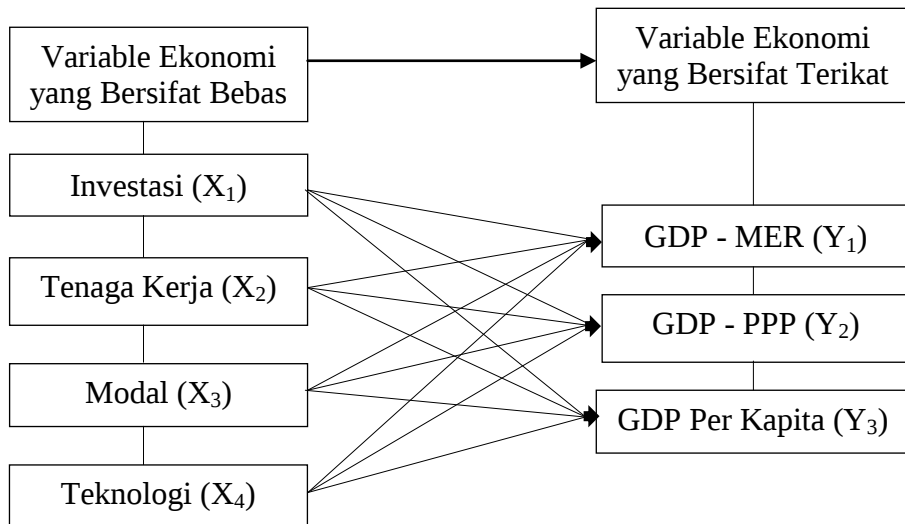
Secara umum Indonesia belum siap dengan diberlakukannya MEA karena masih ada sector yang vital dalam perdagangan bebas seperti infrastruktur dan logistic yang masih perlu dibenahi. Namun disisi lain sector jasa pariwisata sudah berbenah dan siap menghadapi pasar bebas ASEAN hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan sudah adanya sertifikasi SDM pariwisata sehingga tenaga kerja pariwisata sudah siap bersaing saat MEA diberlakukan.

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah, terutama yang berkaitan dengan wacana persiapan menghadapi realisasi MEA ditahun 2015, yaitu dengan peningkatan pengawasan terhadap perkembangan implementasi system yang terdapat dalam Blue Print AEC.

BAGIAN V
ANALISIS PERPEKTIF EKONOMI INDONESIA
TAHUN 2050

5.1 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan ini adalah metode analisis deskriptif. Kuncoro Mudrajad (2003) mengetengahkan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis suatu hasil studi. Dalam hal perspektif ekonomi Indonesia tahun 2050 dari hasil studi John Hawsworth dapat dikaji dengan menggunakan metode analisis dengan mentautkan data-data historis sebagai berikut:



Bagan 1

Modal Hubungan Antara Investasi, Tenaga Kerja, Modal dan Teknologi
Terhadap GDP

Dengan menggunakan bagan tersebut dapat diperoleh model hubungan antara variabel ekonomi yang bersifat bebas (X) dengan variabel ekonomi yang bersifat terikat (Y), yaitu:

1. $Y_1 = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + e_1$
2. $Y_2 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_2$
3. $Y_3 = c_0 + c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3 + e_3$

Dengan menggunakan ke-tiga model tersebut dapat diukur besarnya kontribusi X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 , terhadap masing-masing variabel ekonomi terikatnya (Y_1, Y_2, Y_3).

Besarnya kontribusi X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 berpengaruh nyata terhadap masing-masing Y_1, Y_2 , dan Y_3 yang merupakan replaksi ekonomi Indonesia 2050, maka analisis terhadap X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 yang tepat akan dapat mendorong tercapainya perspektif ekonomi Indonesia tahun 2050 sebagaimana yang kita cita-citakan.

5.2 Analisis terhadap Variabel Ekonomi Menuju Tercapainya Perspektif Ekonomi Indonesia 2050.

Perspektif ekonomi Indonesia tahun 2050 yang merupakan hasil studi John Hawsworth, akan dicoba ditanggapi secara optimis, walaupun keadaan itu sangat sulit dibayangkan ketercapainya, terutama jika kita berpijak pada kondisi riil yang ada saat ini.

Namun demikian, ajaran agama dan nilai budaya memberikan motivasi kepada kita bahwa:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam berfirman bahwa “Aku sesuai persepsi hamba-Ku dan setiap hamba-Ku akan memperoleh seperti apa yang dipersepsikannya terhadap-Ku.

2. Tidak ada sesuatu yang tidak dicapai jika Tuhan menghendaki.
3. Usaha yang tak kenal lelah, bersungguh – sungguh dan tawakal akan memberikan perspektif hari ini harus lebih baik dari kemari.
4. Nasib sesuatu bangsa ditentukan oleh perjuangan bangsa itu sendiri.
5. Sesuatu yang tidak mungkin menurut nalar dan logika manusia merupakan hal biasa bagi Tuhan semesta alam.
6. Kuat dan rapuhnya suatu Negara ditentukan oleh kepedulian pemuda dan pemudinya.
7. Tebar pesona, tebar kerja, dan tebar cinta adalah jawaban untuk mencapai cita-cita (semua hal ini dilakukan oleh seluruh khalifah Islam dan menjadi kebanggaan dunia pada saat dilakukan oleh Harun – Al Rasyid di Bagdad.

5.3 Analisis Terhadap Variabel Investasi

Investasi merupakan variabel ekonomi yang sangat menentukan perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2050. Dengan mengelola investasi secara benar kita memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sektor riil yang mempunyai peran terbesar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ukuran yang paling layak digunakan untuk membandingkan kontribusi investasi dalam perekonomian suatu negara adalah rasio antara Investasi dengan besarnya nilai GDP. Data pada Table 8 menunjukkan bahwa rasio investasi terhadap GDP di Indonesia selama kurun waktu 1998 hingga 2004 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu dari 16,77% di tahun 1998 menjadi 22,77% di tahun

2004. Namun demikian, secara relatif peringkat Indonesia sehubungan dengan rasio investasi terhadap GDP dikawasan Asia, hanya diatas Cambodia, sedangkan di tahun 2004 hanya sedikit diatas Malaysia dan Philipines. Padahal peluang investasi di Indonesia sangatlah besar karena Indonesia mempunyai keunggulan ekonomi dibidang pertanian, kelautan dan Sumber Daya Alam yang melimpah.

Oleh sebab itu strategi ekonomi yang harus ditempuh untuk mencapai perspektif ekonomi Indonesia di tahun 2050 harus mengacu pada pengelolaan investasi yang professional. Untuk itu harus dilakukan skala prioritas mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor dan meningkatkan investasi dibidang substitusi impor (Bagan 2).

Tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai dalam jangka pendek (Short Run) haruslah mampu mencapai target perolehan devisa dan penghematan devisa. Dalam rangka itu pembangunan ekonomi harus mengarah pada sektor riil dibidang pertanian dan kelautan dengan prioritas sektor pertanian.

Dengan mengembangkan sektor pertanian dalam bentuk agribisnis dan agroindustry maka ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai sesuai yang ditargetkan. Pada gilirannya di tahun 2050 rakyat Indonesia akan dapat menghemat devisa, meningkatkan ekspor produk pertanian dan menjamin adanya ketersediaan pangan. Tahun 2050, perspektif ekonomi Indonesia yang adil dan makmur gemah ripah loh jinawe tidak mustahil untuk dicapai.

Hasil studi John Hawsworth memproyeksikan bahwa sejak tahun 2025, tingkat investasi terhadap GDP, Indonesia berada di urutan ke empat (22%) sesudah Cina, Korea dan Jepang yang masing-masing

25%. Disisi lain, realisasi investasi di Indonesia belum mampu menjadi pilar yang menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun investasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, akan tetapi tidak cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Grafik 1 dan 2). Jangan-kan Indonesia dibandingkan dengan Cina, sedangkan dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand saja, investasi Indonesia masih jauh ketinggalan.

Perkembangan investasi Indonesia dimasa yang akan datang sangat tergantung dari perbaikan iklim investasi termasuk perbaikan iklim ketenagakerjaan. Masalah iklim investasi di Indonesia terkait dengan beberapa hal, yaitu:

- 1) Belum memiliki payung yang kuat secara legal guna melindungi investasi di Indonesia, dalam bentuk undang-undang penanaman modal.
- 2) Daya saing rendah dengan kualitas pertumbuhan yang rendah (Tabel 9).
- 3) Iklim bisnis yang buruk (Tabel 10).
- 4) Pajak Perijinan, kepastian hukum dan ketenagakerjaan merupakan penghambat utama pada investasi (Tabel 11).

Dengan demikian, perspektif investasi Indonesia di tahun 2050 sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah investasi dan mendorong perbaikan iklim investasi dengan perlakuan tindakan nyata, yaitu:

- a. Menciptakan stabilitas politik (*political stability*) dan kesempatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan (*economic opportunity*) bagi para investor (asing).

- b. Perlu kembali kepada visi dan misi yang mulia, jadikan pemerintahan ini sebagai pemerintah yang bersih, dalam kerangka *Good Corporate Governance*.
- c. Menuntaskan Undang-Undang investasi (Penanaman Modal), yang mencakup:
 - 1) Meratifikasi undang-undang penanaman modal sektoral yang dapat mendorong investasi sektoral bertumbuh sesuai target dan harapan.
 - 2) Memberikan arahan yang rinci, promotif dan informative tentang iklim dan perizinan investasi agar UU penanaman modal tidak memerlukan banyak peraturan turunan lainnya sehingga dapat dengan cepat diimplementasikan.
 - 3) Undang-undang penanaman modal hendaknya mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik lagi bagi para investor dan dapat menunjang pelaksanaan undang-undang penanaman modal sektoral antara lain: UU Migas, UU Perkebunan dan UU Perikanan. Kepastian hukum hendaknya tercipta dari sistim hukum yang dapat menciptakan predictability, stability dan fairness yang pasti bagi para investor. Oleh sebab itu sistem hukum harus mempunyai equality (kesamaan) perlakuan pada substansi, aparatur dan *legalculture*.
 - 4) Berfokus pada penanaman modal langsung karena portfolio investment memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda dengan direct investment.
 - 5) Pernyataan bahwa secara eksplisit tentang azas *equal treatment* dan national treatment untuk melindungi beberapa

bidang usaha yang bersifat strategis (UKM, pertahanan dan keamanan), pertimbangan modal dan kebudayaan, serta lingkungan hidup (ada kepastian bagi para investor mengenai bidang usaha yang tertutup dan hukum, diatur secara eksplisit dan rinci didalam Undang-Undang Penanaman Modal).

- 6) Pengaturan kelembagaan dirinci secara jelas dan tegas, untuk menghindarkan tumpang tindih dan konflik kebijakan investasi antar sektoral dan antar departemen (kebijakan mikro dan kebijakan makro).

5.4 Analisis Terhadap Variabel Angkatan Kerja Dan Tenaga Kerja

Pertumbuhan angkatan kerja dan tenaga kerja dari aspek ekonomi sangat menguntungkan, karena pelaku dan proses produksi di sektor riil sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terlibat didalamnya. Jika dikaitkan dengan investasi, maka “*economic opportunity*” bagi para investor juga ditentukan oleh para pekerja yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, sepanjang tahun 2005, perekonomian hanya mampu menyerap 1,23 juta tenaga kerja baru atau masih jauh dari seluruh angkatan kerja baru yang berjumlah 1,83 juta. Tingkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% di tahun 2006 diperkirakan dapat menyerap sekitar 1,70 juta hingga 1,80 juta angkatan kerja baru. Dalam kondisi ini masih terdapat pengangguran sebesar 300 ribu hingga 400 ribu angkatan kerja baru. Prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% (RAPBN 2007) diharapkan akan menyerap tenaga kerja baru 1,90 juta orang.

Pada tahun 2005, angka pengangguran terbuka mencapai 10,85 juta orang, bila ditambah pengangguran terselubung (disquised un employment) dan orang-orang yang bekerja tidak secara optimal (underunemployment), maka jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang.

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu indikator yang tercermin pada kondisi ekonomi pekerja, terutama yang berada dipedesaan pada sektor pertanian. Para pekerja di Indonesia bersedia dibayar dengan upah yang murah sehingga bagi para investor (produsen) Indonesia dapat menciptakan keunggulan komparatif (Comparative Adventage). Disisi lain upah pekerja yang rendah sebagai akibat kualitas tenaga kerja. Hal tersebut telah mengakibatkan rendahnya keunggulan kompetitif (Competitive Adventage) Baik pada produk yang dihasilkan maupun bagi para pekerja itu sendiri.

Mengenai kemiskinan, Badan Pusat Statistkik (BPS) menggunakan tolok ukur kemiskinan di Indonesia dengan mengacu pada upah minimum propinisi (UMP) dan kebutuhan hidup minimum (KHM).

Pada saat UMP di DKI Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia berkisar antar Rp 625.000,-/KK/bulan hingga Rp 875.000,-/KK/bulan atau sekitar Rp 25.000,-/KK/hari hingga Rp 35.000,-/KK/hari. Tolok ukur kemiskinan menurut Bank Dunia adalah 3 USD/orang/hari dengan kurs Rp 8.750,- untuk 1 USD, atau sekitar Rp 26.250,-/orang/hari.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 dengan tolok ukur BPS diperkirakan mencapai 124,10 juta jiwa. Sedangkan dengan tolok ukur Bank Dunia jumlah ini akan meningkat menjadi

sekitar 165 juta jiwa. Distribusi penduduk miskin di Indonesia antara desa dan kota sangat timpang, lebih dari 70% penduduk miskin Indonesia ternyata ada dipedesaan, dan hanya sekitar 27% yang ada diperkotaan.

Karakteristik penduduk miskin ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup, yang dicirikan (1) kekurangan gizi (2) pendidikan yang rendah, dan (3) kesehatan yang tidak terjamin. Akibat adanya kemiskinan dalam jumlah yang besar seperti di Indonesia, maka kita akan mewariskan “generasi yang bodoh dan lemah”. Salah satu sumber kemiskinan adalah tidak adanya pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan penduduk atau meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumlah pekerja yang di PHK pada tahun 2005 mencapai 5.411.000 orang (ILO, 2005). Ketimpangan pendapatan antara daerah dan perkotaan di Indonesia dapat diukur dengan koefisien gini yang merupakan Sen Poverty Indeks (SPI) yang merupakan indeks kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi selalu bertolak belakang dengan pemerataan. Dikotomi kedua hal tersebut akan nampak pada bertambahnya orang miskin dan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan diberbagai daerah. Selama kurun waktu 2000 hingga akhir tahun 2005, rasio gini di Indonesia berkisar antara 0,30 hingga 0,40, ini berarti selama kurun waktu tersebut ketimpangan pendapatan masih terjadi secara “Significant”.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selama ini memang sudah dilakukan, akan tetapi pengawasan dan tindakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan dana pengentasan kemiskinan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini nampak antara lain:

1. Sebagiaian besar (sekitar 73%) dana pengentasan kemiskinan (JPS) diselewengkan dari tujuannya dan diduga tidak sampai pada sasaran yang seharusnya. Upaya pemerintah untuk menghapus tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) yang mencapai sekitar Rp 5,7 triliun memang cukup menggembirakan asalkan ini dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab.
2. Data jumlah penduduk miskin yang dibuat oleh PEMDA seringkali bersifat duplikasi. Data penduduk miskin suatu daerah akan dilaporkan dalam jumlah yang lebih banyak jika diperlukan untuk mendapatkan bantuan dana pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. Sementara itu sebagai laporan pertanggung jawaban kinerja PEMDA, akan dilaporkan dalam kondisi yang sebaliknya.
3. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah padahal dalam konsep Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerinah daerah, terdapat prinsip perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian koordinasi antara Pusat dan Daerah sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (OTODA) dan mengangkat potensi daerah.

Disamping itu, Sidik Priadana HM (2006) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya, yaitu:

1. Termasuk 10 besar Negara penghasil Sumber Daya Alam.
2. Memiliki 325.350 jenis Fauna dan Flora.
3. Daerah strategiks untuk jalur pasar internasional karena terletak di antara 4 Benua dan 2 Samudra.
4. Pasar nomor 4 terbesar dunia (220 juta).

5. Pantai terpanjang nomor 2 didunia.

Dengan kekayaan alam dan peta geografis yang sangat strategis tersebut tidaklah berlebihan jika di tahun 2050 Indonesia diramalkan akan menjadi salah satu negara dengan pasar terbesar. Keadaan tersebut sangat berlawanan dengan kondisi saat ini. Sebagai negara besar yang berdaulat, Indonesia harus menguntungkan negara lain untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya pertanian – kelautan dan sumber daya alam karena keterpaksaan.

Kebijakan pemerintah terhadap penanaman modal asing telah memberikan keleluasaan yang sangat berlebihan kepada investor asing. Namun demikian hal tersebut tidak terlalu menarik investor asing. Hal yang memberikan indikasi kuat bahwa Indonesia kurang menarik bagi investor asing adalah turunnya nilai penanaman modal asing yang disetujui pemerintah, yaitu dari 15,413.1 juta USD (2000) menjadi 10.2773.3 juta USD atau turun 9,64% per tahun.

Disisi lain, investor dalam negeri juga tidak percaya bahwa melakukan investasi di Indonesia dapat memberikan keuntungan ekonomi (economics appoportunity). Akibatnya, pemilik modal di Indonesia lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dinegara lain. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika terjadi pertumbuhan nyata pada investor domestic (Penanaman Modal Dalam Negeri – PMDN). Jika nilai PMDN tahun 2000 mencapai 92,327.7 milyar rupiah atau mengalami penurunan sekitar 20,57 per tahun.

Dengan demikian selama kurun waktu 2000 – 2004, turunya PMDN jauh melampaui turunnya PMA. Hal ini telah memberikan petunjuk yang nyata bahwa iklim investasi Indonesia sangat tidak menarik bahkan bagi investor domestik.

Table 13

Perkembangan PMDN dan PMA Menurut Sektor 2000-2004

Tahun	PMDN (milyar Rp)	PMA (milyar USD)
2000	92.327,7	15.413,1
2001	58.674,0	15.043,9
2002	25.262,3	9.744,1
2003	48.484,8	13.207,2
2004	36.747,6	10.277,3

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol. VII No. 5 Bank Indonesia, (diolah)

Berdasarkan angka-angka tersebut, terlihat bahwa iklim investasi yang paling buruk terjadi pada tahun 2002, karena pada tahun tersebut nilai PMDN dan PMA berada pada angka terendah dibandingkan tahun-tahun yang lain.

Akibat turunnya investasi, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada tahun 2005 tidak dapat tercapai. Implikasi lain dengan turunnya investasi adalah meningkatnya jumlah pengangguran terbuka yaitu dari 5,8 juta orang pada tahun 2000 menjadi 10,85 juta orang ditahun 2005 (Tabel 12).

Pada akhirnya, rendahnya investasi di Indonesia dibandingkan beberapa negara lain akan menyebabkan turunnya daya saing negara (Tabel 9) yang akan berimplikasi pada menurunnya daya saing investasi.

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan sebab-sebab rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 14

Beberapa Faktor yang Dapat Menjelaskan Rendahnya Minat Investor
Untuk Menanamkan Modalnya di Indonesia tahun 2005

No. Urut	Jenis Faktor	Ranking Indonesia
01	Daya Saing Negara	74
02	Iklim Bisnis	45
03	Kemudahan Melakukan Bisnis	115
04	Memulai Bisnis	144
05	Mengurus Perijinan	107
06	Mengangkat dan Memecat Pegawai	120
07	Mendaftarkan Hak Milik	107
08	Mendapatkan Kredit	63
09	Perlindungan Investor	58
10	Pembayaran Pajak	118
11	Menerapkan Kontrak	145
12	Menutup Perusahaan	116

Sumber : Fadhil Hasan M. Indef (2006, diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa daya saing negara makin merosot dari urutan ke 64 (2001) menjadi urutan ke 74 (2005), sementara itu hal yang juga terjadi pada iklim bisnis. Dari sisi perlindungan investor, Indonesia menempati urutan yang ke 58 dari 145 negara lainnya. Dalam hal perlindungan investor, Indonesia hanya menang jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, akan tetapi

kalah jauh jika dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia, bahkan dengan Thailand.

Dengan mengacu pada kelemahan-kelemahan tersebut maka masalah iklim investasi di Indonesia meliputi:

1. Daya saing rendah dengan kualitas pertumbuhan yang rendah.
2. Iklim bisnis yang masih buruk.
3. Pajak, perijinan, kepastian hukum dan ketenagakerjaan yang masih buruk.

Penelusuran terhadap masalah iklim investasi di Indonesia, akhirnya kita sampai pada suatu dugaan bahwa hal yang melatarbelakangi munculnya masalah investasi di Indonesia adalah:

1. Birokrasi dan KKN yang tinggi.
2. Ego sektoral yang mengakibatkan pelayanan dan biaya tinggi serta lemahnya infrastruktur.
3. Belum selesainya Undang-Undang investasi yang memenuhi harapan.

Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa permasalahan investasi di Indonesia harus dikembalikan pada kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya.

Pada Bagan 2 disajikan Alur Strategi Pembangunan Nasional yang menjelaskan struktur makro perekonomian Indonesia yang diawali dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada kedudukan yang paling terhormat.

Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan mandat dari rakyat dan berpegang pada UUD 1945 harus menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab.

Pemahaman yang komprehensif dan sempurna terhadap Undang-Undang Dasar akan memberikan kearifan pemerintah dalam menyusun APBN, membuat Undang-Undang dan melakukan perjanjian dengan negara lain (misalnya dalam melakukan pinjaman).

Dengan APBN yang berpihak pada persetujuan rakyat diharapkan pemerintah akan menggunakan strategi pembangunan yang memberikan skala prioritas yang adil dengan mengatur pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas nasional yang Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk menimbulkan fundamental ekonomi yang kuat. Tanpa GCG yang baik, mustahil fundamental ekonomi yang kuat dapat terwujud. Dengan GCG dan fundamental ekonomi yang kuat maka perekonomian Indonesia akan bertumbuh dengan daya saing.

Kalau sudah demikian, maka Indonesia tidak perlu lagi terlalu menggantungkan investasi dari Investor Asing (PMA). Karena kenyataannya bahwa PMA tidak memberikan benefit yang memadai bagi negara dan bangsa Indonesia, jika dibandingkan (misalnya) lingkungan hidup yang mengalami degradasi yang hebat.

Memperhatikan kondisi nyata masalah investasi di Indonesia, maka untuk mencapai perspektif ekonomi Indonesia 2050 sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kebijakan pemerintah:

1. Kebijakan Pengaturan Penanaman Modal.
2. Kebijakan Ekspansi Fiskal dan Moneter.
3. Kebijakan Persaingan Usaha dan Kebijakan Restrukturisasi Infrastruktur.
4. Kebijakan Regulasi Penanaman Modal.

Tujuan kebijakan pemerintah dibidang modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia karena tercapainya tujuan:

1. Terciptanya Economic Opportunity dan Insentif lain bagi Investor.
2. Terciptanya Kondisi Investasi yang Predictability.
3. Terciptanya Stability dan Fairness.

Penjelasan resmi pemerintah pada bulan Agustus 2006 bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun tersebut mencapai 39,10 juta orang atau 17,8% dari penduduk Indonesia (Bustanul Arifin, 2006) telah menyentak kita dan menimbulkan tanda tanya apakah benar bahwa pemerintah telah menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang memihak kepada rakyat dengan mengacu pada trilogy pembangunan yaitu pertumbuhan (pro-growth), pemerataan (pro-employment) dan stability nasional (pro-poor).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering menyebutkan bahwa strategi revitalisasi pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama di pedesaan. Bustanul Arifin, 2006 menjadikan BUMN dan BUMS serta kekayaan alam memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia.

Pada akhirnya fundamental ekonomi harus tumbuh dari prinsip kemandirian dan jangan sampai terulang lagi sebagai *“bubble economy”* karena tumbuh dan berkembang akibat hutang yang berlebihan.

Fundamental ekonomi yang kuat harus menyentuh secara proporsional pada setiap sektor, baik itu sektir perbankan, sektor keuangan negara, sektor riel maupun sektor tenaga kerja.

Dengan fundamental ekonomi yang kuat hendaknya ditunjukkan dengan adanya Good Corporate Governance (GCG) Data Good Corporate Governance tingkat Asia menunjukkan bahwa untuk masalah GCG yang diberikan skor penilaian 0 -10, Indonesia berada pada level yang paling rendah yaitu peringkat 8 dengan skor 2,9 (2000) dan peringkat 9 dengan skor 3,2 (2003). Dari 10 negara di Asia tersebut hanya Indonesia yang tidak mengalami pertumbuhan dalam GCG.

Table 15

Peringkat Good Corporate Governance di Asia
Selama tahun 2000 s/d 2003

Negara	2000	2001	2002	2003
Singapore	7,5 (1)	7,4 (1)	7,4 (1)	7,7 (1)
Hongkong	7,1 (2)	6,8 (2)	7,2 (2)	7,3 (2)
Taiwan	5,7 (3)	5,3 (4)	5,8 (4)	5,8 (4)
India	5,6 (4)	5,4 (3)	5,9 (3)	6,6 (3)
Korea	5,2 (5)	3,8 (5)	4,7 (5)	5,5 (5)
Malaysia	3,7 (6)	3,7 (6)	4,7 (5)	5,5 (5)
China	3,6 (7)	3,4 (7)	4,4 (6)	4,3 (7)
Thailand	2,8 (9)	3,7 (6)	3,8 (7)	4,6 (6)
Philipines	2,9 (8)	3,3 (8)	3,6 (8)	3,7 (8)
Indonesia	2,9 (8)	3,2 (9)	2,9 (9)	3,2 (9)

Sumber: CLSA, 2003 Dalam Kajian Tengah Tahunan Ekonomi dan Bisnis, INDEF, 2003

Keterangan: () = angka yang menunjukkan peringkat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering menyebutkan bahwa strategi revitalisasi pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama di pedesaan. Bustanul Arifin, (2006) mengungkapkan bahwa kemiskinan di pedesaan menjadi sangat serius karena lebih dari 55% dari jumlah pendudukan miskin di Indonesia adalah petani dan 75% dari petani miskin itu adalah petani tanaman pangan.

Hasil sensus penduduk tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) petani di Jawa adalah petani gurem, padahal pada tahun 1993 jumlahnya hanya 5%. Dengan demikian hanya 25% petani di Jawa yang tidak tergolong miskin.

Untuk mengatasi kemiskinan di sektor pertanian, kebijakan pemerintah di bidang pertanian (*land – policy reform*) tentu saja harus dituntaskan diikuti dengan pemberdayaan masyarakat bawah yang masih aktif (*economically active poor*), peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberian akses sumber daya ekonomi guna menciptakan para petani yang berjiwa wira usaha.

Penanggulangan kemiskinan berarti upaya membuat penduduk tidak menjadi miskin dan membendung jumlah penduduk miskin agar tidak bertambah banyak. Gunawan Sumodiningrat menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah bagian dari upaya perwujudan HAM sedangkan di sisi lain HAM merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan memiliki makna yang luas, selain ketidakmampuan di bidang ekonomi juga ketidakmampuan untuk memenuhi hal-hal dasar dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Strategi nasional penanggulangan kemiskinan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004 – 2009 salah satunya adalah pemenuhan hak dasar yaitu jaminan rasa aman, dan pemenuhan partisipasi masyarakat (miskin) untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Pidato akhir tahun disampaikan Presiden SBY mengingatkan bahwa jika tidak ada hambatan eksternal yang serius, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2006 akan mencapai 6,0% atau mungkin lebih. Untuk itu strategi dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan RPJMN, yaitu:

1. Kebijakan Ekonomi Makro
 - a. Stabilitas ekonomi makro
 - b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
 - c. Perluasan kesempatan kerja
 - d. Pengurangan kesenjangan antar wilayah
2. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar
 - a. Hak atas pangan
 - b. Hak atas layanan kesehatan
 - c. Hak atas layanan pendidikan
 - d. Hak atas pekerjaan dan berusaha
 - e. Hak atas perumahan
 - f. Hak atas air bersih dan aman serta sanitasi
 - g. Hak atas tanah
 - h. Hak atas SDA dan lingkungan
 - i. Hak untuk berpartisipasi
3. Kebijakan Perwujudan Keadilan dan Kesenjangan Gender
4. Kebijakan Pengembangan Wilayah

- a. Percepatan pembangunan pedesaan
- b. Pembangunan perkotaan
- c. Pengembangan kawasan pesisir
- d. Percepatan pembangunan daerah tertinggal

Begitu banyaknya kebijakan pemerintah SBY untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, namun sampai saat ini hasilnya belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Roh pembangunan nasional yang bermakna penanggulangan kemiskinan telah menghilangkan esensi dari pro-growth, pro-employment, dan pro-poor.

Menurut ketua Persatuan Ahli Gizi dan Pangan yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Hardiansyah, hiruk pikuk otonomi daerah sejak tahun 2001 dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) membuat orang memperhatikan pembangunan kesehatan ibu dan anak. Padahal kurangnya asupan gizi pada anak balita terutama protein dalam waktu tiga bulan bisa menyebabkan kerusakan otak permanen dan menurunkan potensi kecerdasan.

Jika hal itu terjadi secara masal pada generasi muda, akan menyebabkan generasi muda yang bodoh dan lemah fisik dan berpotensi meningkatkan kemiskinan. Oleh sebab itu, saat ini terdapat tidak kurang dari 104 juta penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, yaitu hidup dengan biaya kurang dari 2 USD per hari (Atika Walujani Moejiono).

Kemiskinan dan kebodohan pada akhirnya membuat Indeks Standar ketenaga kerjaan untuk Indonesia sebesar 44,5 dan menempatkan Indonesia dibawah Thailan, Philipina, Malaysia dan India

bahkan dalam konteks global masih kalah dibandingkan dengan Argentina, Chili dan bahkan Afrika Selatan (Labor Standards Index From verite, Indef 2003).

Berdasarkan pada data dan fakta diatas maka persoalan tenaga kerja di Indonesia adalah menyangkut dimensi yang esensial yaitu beodohan dan kemiskinan. Oleh sebab itu upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, baik oleh pemerintah maupun lembaga internasional dengan tetap mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat.

Oleh karena itu Indonesia akan dapat mencapai perspektif ekonomi yang dicita-citakan pada tahun 2050, jika kebijakan pemerintah dapat merealisasikan:

1. Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional
2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan dalam APBN ($\pm 20\%$ dari nilai APBN)
3. Kebijakan Pengaturan Bidang Studi
4. Kebijakan Hubungan Antar Lembaga Baik dalam maupun Luar Negeri
5. Kebijakan yang Menyentuh Sistem Kebangsaan dan Moral

Tujuan kebijakan pemerintah tersebut adalah:

1. Menciptakan sosial benefit bagi stakeholder
2. Memberikan kesempatan kepada tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak (wajib belajar sampai tingkat SLTA)
3. Menciptakan tenaga ahli dan terampil pada tiap-tiap profesi, dan
4. Menciptakan tenaga kerja yang jujur, ikhlas, cinta tanah air dan bertakwa.

5.5 Analisis Terhadap Variabel Modal

Modal merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional. Modal untuk pembangunan nasional dapat bersumber dari dalam negeri (modal sendiri) baik yang diperoleh dari pajak, keuntungan BUMN dan benefit harga. Jika semua itu kurang terpenuhi, maka pemerintah dapat meminta bantuan negara lain dalam bentuk pinjaman (utang), SWAP maupun Hibah.

Dengan seluruh modal yang dimiliki (modal sendiri plus modal asing), pemerintah dapat mengatur pembiayaan pembangunan baik untuk pembiayaan rutin maupun pembiayaan pengembangan.

Menyangkut pembiayaan pembangunan dengan menggunakan utang luar negeri, Pomfret dalam Sritua Arief (1998) menyatakan bahwa utang luar negeri tidak akan disalurkan jikalau tidak ada keuntungan ekonomi bagi pihak pemberi utang. Keadaan pada tahun delapan puluhan dan Sembilan puluhan merupakan keadaan krisis utang (Debt-Crisis) yang ikut menguatkan pernyataan tersebut.

Persoalan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok negara berkembang yang tergolong dalam highly Indebted Countries adalah pada beban pembayaran utang luar negerinya, termasuk dalam kelompok ini adalah Indonesia.

Berakumulasinya utang luar negeri pada sebagian besar negara berkembang dapat dijelaskan dari sisi permintaan uang (Loan-Pull Theory) maupun dari sisi penawaran uang (Loan-Push Theory)

Loan Pull Theory menjelaskan bahwa pinjaman luar negeri yang merupakan repleksi perilaku korup dan mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan (moral Hazard) dalam sumber-sumber keuangan internasional akan menyebabkan Rate of Return dari hutang

luar negeri menjadi jauh lebih rendah dibandingkan Cost of Borrowingnya, apalagi jika hutang luar negeri yang memang sudah tidak realistis tersebut sebagian besar dialokasikan untuk mendanai Overvalue Currency.

Dari sisi penawaran (Loan-Push Theory) dapat dijelaskan bahwa secara substansial dorongan hutang luar negeri yang tidak rasional berasal dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang menguasai surplus petro dolar, karena berkurangnya permintaan hutang dari negara-negara maju. Menurut William Darity dan Bobbie Horn (1998) proses Recycling of Petro – Dollars telah menyebabkan banyaknya proyek ekonomi dinegara-negara berkembang dibuat tanpa perhitungan ekonomis yang dapat dipertanggung jawabkan. Kolaborasi antara pihak kreditur dengan pejabat pemerintah negara berkembang mengakibatkan hilangnya obyektifitas kelayakan ekonomis dari proyek-proyek yang dibiayai dengan utang luar negeri, bahkan terjadi mekanisme pemberian utang yang direayasa oleh pihak Loan Pusher.

Berakumulasinya utang luar negeri di negara-negara berkembang merupakan manipulasi dari Overheating of Credit dari negara kapitalis maju demi mencegah terjadinya krisis dalam system dinegara kapitalis maju setelah terlihat adanya gejala-gejala resesi yang berkepanjangan. Jadi pelemparan dana utang dari negara maju ke negara berkembang adalah dalam rangka menstimulir proses pertumbuhan ekonomi dinegara-negara kapitalis maju.

Tabel 16

Perkembangan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah, Defisit APBN dan Penarikan Utang Baru Tahun 1999 s/d 2005 (milyar USD)

Tahun	Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	Defisit APBN	Penarikan Utang Baru
1999	5,800	6,206	6,984
2000	5,313	1,682	1,857
2001	7,048	3,893	2,514
2002	7,374	3,096	2,167
2003	5,669	4,067	3,455
2004*)	6,781	2,930	1,407
2005*)	6,960	2,643	0,752

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Nopember – Desember 2003,BI

Keterangan: *) Angka Estimasi

Ada dua sisi pandangan yang berbeda bahkan berlawanan terhadap utang. Disatu sisi, utang seringkali dipandang sebagai suatu kewajaran yang dibutuhkan untuk menstimulir laju pertumbuhan ekonomi, sementara disisi yang lain utang dipandang sebagai suatu keterpaksaan untuk mencegah bangkrutnya ekonomi suatu negara.

Cyrrillus Harinowo (2002) memandang utang sebagai suatu kewajaran. Alasanya, tidak ada satu negarapun yang membangun ekonominya tanpa utang, bahkan Amerika dan Jepang yang merupakan negara industry maju ternyata menjadi penghutang terbesar didunia. Pada tahun 2001, utang Amerika 5,9 triliun USD, sementara utang

Jepang 4,8 triliun USD, dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 174,94 milyar USD (d,96% dari Amerika atau 3,64% dari Jepang).

Pandangan yang optimistik terhadap utang akan memandang utang secara positif, misalnya utang masih dianggap wajar jika porsinya kurang dari 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Debt Service Rationya kurang dari 25%. Pihak yang memandang utang sebagai suatu kewajiban akan menunjukkan data berbagai negara yang sukses membangun ekonominya dengan utang. Dengan memandang utang secara optimistik dan positif maka pengkajian utang diarahkan pada pencapaian utang yang Reasonable.

Dikutub yang lain, Hayter dalam Sritua Arief (1998) memandang utang sebagai suatu keterpaksaan, tidak ada pilihan. Pandangan yang pesimistik dan negatif tercermin dengan pernyataannya, bahwa utang tidak akan disalurkan jikalau tidak ada keuntungan ekonomi bagi pihak pemberi utang. Selain itu ditunjukkanlah betapa banyak negara berkembang yang akhirnya terpaksa terperangkap dalam utang, yang dicerminkan dengan rendahnya kemampuan membayar utang. Pandangan yang pesimistik dan negatif terhadap utang menimbulkan keinginan untuk mengurangi atau memangkas utang melalui penghapusan utang (default), serta tidak memperpanjang kontrak dengan negara-negara pemberi utang.

Dari dua sudut pandang terhadap utang, dapat ditarik garis tengah yang moderat sehingga negara dapat terhindari dari belenggu utang yang tak terbayarkan dan mampu menerima utang sebagai suatu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan, baik mengenai jumlah yang diterima maupun cara pembayarannya.

Sejak krisis nilai tukar yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 tersebut, maka masalah utang luar negeri menjadi perbincangan yang hangat, kontroversi dan sering membingungkan, bahkan satu sama lain cenderung saling menyalahkan.

Pada tahun 1998 utang luar negeri Indonesia mencapai 150,886 milyar USD dengan komposisi 67,329 milyar USD utang pemerintah dan 83,557 milyar USD adalah utang luar negeri sektor swasta. Utang luar negeri sektor pemerintah cenderung mengalami kenaikan, dan diperkirakan pada akhir tahun 2005 akan mencapai 79,576 milyar USD. Sementara itu utang luar negeri sektor swasta justru cenderung turun dan diperkirakan akan mencapai 43,957 milyar USD pada tahun 2005.

Table 17

Komposisi Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1998 s/d 2003
(Milyar USD)

Tahun	Pemerintah	Swasta	Total
1998	67,329	83,557	150,889
1999	75,862	72,236	148,098
2000	74,916	66,777	141,963
2001	71,378	61,696	133,074
2002	74,664	56,682	131,343
2003	77,930	52,795	130,725
2004*)	78,266	48,402	126,668
2005*)	79,576	43,957	123,533

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangn Indonesia, Bank Indonesia, Januari 2004

Keterangan : *) Angka Estimasi

Akumulasi utang luar negeri negara berkembang terjadi karena jumlah utang yang dibayar jauh lebih rendah dari jumlah utang baru yang diterima. Disisi lain, mempersepsikan utang luar negeri sebagai “penerimaan” ternyata telah memperlunak kewaspadaan para penguasa dinegara berkembang (termasuk Indonesia) terhadap bahaya yang ditimbulkan dengan bertambahnya utang luar negeri (crowding out effect).

Penggunaan utang luar negeri yang sebagian besar hanya untuk memperkuat cadangan devisa, telah memperlemah kemampuan membayar utang karena tidak adanya peningkatan kapasitas produksi nasional. Hal ini akan diperparah jika proyek yang dibiayai dengan utang luar negeri tidak berorientasi ekspor.

Pada tahun 1999, utang luar negeri 10 (sepuluh) negara berkembang mencapai 993,542 milyar USD. Nilai tersebut dua kali lipat dari utang luar negeri Amerika Serikat, yang saat itu mencapai 447 milyar USD. Posisi utang luar negeri Indonesia diantara kesepuluh negara berkembang tersebut berada diurutan ketiga, dengan jumlah 150,096 milyar USD (15,11%).

Peringatan terhadap bahaya utang luar negeri yang diberikan oleh pakar ekonomi yang berada di luar sistem kekuasaan, kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah Indonesia pada saat itu. Pemerintah telah terlena, karena keberhasilannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektor swasta, pertumbuhan ekspor, dan menjaga harga barang dan jasa yang didukung oleh nilai tukar rupiah yang tinggi.

Pemerintah Orde Baru pada saat itu sangat berambisi untuk menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada

pertumbuhan (Growth). Dalam kaitan itu tingkat pertumbuhan ekonomi dipacu secara paksa hingga rata-rata diatas angka 5% per tahun. Untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia meningkatkan roda perekonomian dengan melakukan berbagai deregulasi dibidang ekonomi dan perbankan, yang lebih spesifik dikenal dengan Pakto, Paknov dan Pakdes (Hamzah – Umar, 1993).

Dorongan pemerintah terhadap peran serta sektor swasta telah disambut secara antusias dan bahkan berlebihan. Perluasan dan percepatan investasi sektor swasta dengan kebutuhan dana yang besar telah memaksa sektor ini untuk melakukan utang komersil dari kreditur di luar negeri, tanpa terkendali. Hal ini terjadi karena untuk memanfaatkan utang luar negeri dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan tingkat bunga yang lebih rendah dari utang dalam negeri.

Disamping itu, kebebasan swasta dalam memperoleh utang semakin memperburuk fungsi kontrol pemerintah terhadap swasta. Pada akhirnya utang luar negeri yang pada mulanya sebagai pelengkap terhadap dana dalam negeri, ternyata menjadi sumber utama bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mengalami ketergantungan yang cukup besar terhadap utang luar negeri.

Sektor swasta yang tumbuh akibat proteksi dan pemberian fasilitas khusus, mempunyai orientasi pasar yang masih berpusat pada pasar domestik. Perusahaan swasta yang mendapatkan dana dari bank miliknya melebihi batas yang ditentukan pemerintah (10%), dan meningkatnya utang luar negeri serta prinsip penggunaan utang luar negeri yang tidak sepadan dengan prinsip pembelanjaan yang sehat, telah menimbulkan *maturity gap*. Pengelolaan unit usaha yang masih berpusat pada keluarga (*spoil system*), serta kebijakan pemerintah yang

terlalu mengejar pertumbuhan tanpa memperdulikan darimana sumber pendanaan yang digunakan, ternyata telah menghancurkan semua impian kita. Pada kenyataannya Indonesia sebuah negara dengan kemampuan ekonomi yang semu, yang hanya nampak mapan dipermukaannya saja (*bubble economy*).

Krisis nilai tukar yang diawali pada pertengahan tahun 1997, telah mengakibatkan kepanikan yang amat sangat, baik bagi pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya (swasta). Melonjaknya nilai tukar rupiah adalah awal dari terjadinya krisis. Utang luar negeri dalam bentuk mata uang asing (YEN dan USD) untuk semua sektor ekonomi telah menjadi beban berat yang tak tertanggungkan, apalagi bagi perusahaan swasta yang perolehannya dalam bentuk mata uang domestik (Rupiah).

Suatu hal yang tidak terduga sebelumnya, ternyata gejolak nilai tukar yang terjadi di beberapa negara asia disekitar bulan Januari – Maret 1997, telah menular ke Indonesia pada pertengahan Juli 1997, dampak penularan (*contagion effect*) gejolak nilai tukar tersebut pada mulanya tidak banyak mendapatkan perhatian, tetapi setelah rupiah melemah hingga mencapai titik psikologis (Rp 8.000,00) dengan cepat dan tajam, maka diawal tahun 1998 pemerintah dan ahli ekonomi di Indonesia menyadari bahwa gejolak nilai tukar tersebut telah menjadi krisis nilai tukar. Utang luar negeri yang secara cepat mengalami pergerakan yang tajam dan searah dengan perubahan struktur utang luar negeri yang sebelumnya didominasi utang pemerintah, telah menyadarkan pelaku ekonomi swasta dalam mata uang asing (terutama Yen dan Dollar) harus dikonversi dengan rupiah yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Pada saat yang bersamaan, sektor swasta tidak mampu memperoleh keuntungan usaha (Return) yang memadai. Jangankan untuk membayar utang, untuk membiayai operasi perusahaan dan membayar upah pekerja saja mereka masih berada dalam kesulitan.

Akibat tidak terbayarnya utang luar negeri sektor swasta dalam waktu yang cukup panjang, maka nilai utang luar tersebut telah menumpuk. Keadaan ini telah memberikan indikasi bahwa utang luar negeri sektor swasta merupakan faktor yang paling berperan dalam mendorong terjadinya krisis utang. Pada awalnya nampak juga kepanikan pemerintah menghadapi persoalan utang luar negeri. Akan tetapi karena kemampuan pemerintah memang jauh melampaui kemampuan swasta, maka kepanikan tersebut tidak berlangsung lama.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, perlu dipertimbangkan pendapat Sritua Arief dan Sri Edi Swasono mengenai kebijakan penyelesaian utang, yang antar lain :

Pertama. Pembayaran utang luar negeri pemerintah harus dimintakan untuk diperingan dan dikurangi dalam jumlah yang memadai, yang diikuti dengan penjadwalan pembayaran terhadap sisa utang.

Kedua, menolak penggunaan dana negara atau dana masyarakat untuk membayar utang perusahaan swasta.

Ketiga, meninjau kembali sistim pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan dengan sumber dana luar negeri data ditekan hingga titik terndah.

Berbicara tentang utang luar negeri negara berkembang, kita akan teringat dua orang ekonomi dunia terkemuka yaitu Joseph Stiglistz

dan John Perkins. Keduanya telah memberikan angin segar bagi penyadaran terhaap cengkeraman kapitalisme.

Stiglitz yang merupakan peraih nobel bidang ekonomi tahun 2007 menjelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia dibawah kendali AS dan negara barat lainnya, cenderung mendiktekan keinginan mereka dan untuk kepentingan mereka. Kepada tiap negara yang diberikan utang oleh IMF dan Bank Dunia, selalu diminta melakukan liberalisasi disemua lini dengan alasan globalisasi, dalam hal ini subsidi dilarang, bea masuk diturunkan sampai nol persen dan perusahaan asing diperbolehkan masuk diseluruh nadi perekonomian, sementara itu pada saat yang sama AS justru menghalalkan subsidi dan mencegah masuknya komoditi asing liberalisasi telah menjadikan perusahaan-perusahaan besar dan BUMN dikuasai oleh pihak asing, contoh yang paling kongkrit adalah indosat.

Pada tahun 2004, John Perkins menulis buku "*Confessions of an Economic Hitman*". Buku ini merupakan pengakuan dosanya karena selama belasan telah menjadi kaki tangan segelintir orang-orang kaya di Amerika untuk memeras membangkrutkan negara berkembang.

Perkins membuat laporan mengenai kondisi ekonomi negara berkembang dengan memberikan tekanan agar negara tersebut diberikan utang. Ketika tahun 1971 ke Indonesia, Perkins melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan percapita Indonesia naik secara signifikan, sehingga dengan bekerjasama dengan birokrat Indonesia masuklah utang luar negeri yang pada awalnya dipersepsikan sebagai penerimaan.

Pemerintahan Orde Baru (ORBA) yang korup pada akhirnya terjebak dalam perangkap utang dan secara leluasa AS memanfaatkan

Indonesia untuk kepentingannya baik secara ekonomi maupun politik. Menurut Perkins, karena pemberian utang adalah untuk kepentingan Amerika, maka negara berkembang harus diberikan utang (yang di Amerika bersifat inflator) dengan mengambil langkah-langkah :

1. Merayu dan menyatakan bahwa utang tersebut merupakan bantuan yang tidak memberatkan,
2. Memaksa dan mengancam dengan melakukan berbagai tindakan yang bahkan fatal bagi pemimpin suatu negara,
3. Melakukan aksi militer untuk menduduki wilayah yang diketahui mengandung sumber daya ekonomi dan sumber daya lain yang dibutuhkan Amerika.

Masuknya kapitalisme modern yang berkedok sebagai pemberi bantuan, pada akhirnya telah membangkitkan perekonomian Indonesia yang sejak lama dibangun dengan utang. Betapa mudahnya perusahaan asing tersebut menggaruk kekayaan alam Indonesia antara lain Emas oleh perusahaan Preefort, dan minyak oleh beberapa perusahaan Amerika lainnya.

Dengan demikian keluarnya Indonesia dari Consultative Group on Indonesia (CGI) merupakan stigma politik yang patut mendapat dukungan. Dengan keluarnya Indonesia dari CGI secara ekonomis tidak akan merugikan Indonesia karena selain jumlah pinjamannya relative sangat kecil (2005 hanya 3,4 milyar dollar AS) maka proses pencairan pinjaman itu harus dilakukan dengan biaya yang sangat mahal dan penjelasan yang panjang lebar.

Selain itu, keluarnya Indonesia dari CGI juga memberikan harapan bahwa dimasa yang akan datang, kebijakan Indonesia tidak didikte oleh pihak pemberi utang. Dalam hal ini untuk menutupi defisit

APBN, pemerintah dapat menggunakan utang dalam negeri dengan menyalurkan surat utang negara (SUN).

Berdasarkan semua hal yang diuraikan berkaitan dengan modal yang digunakan dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah yang dapat membawa perspektif ekonomi Indonesia tahun 2050 sesuai yang ditargetkan adalah :

1. Kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan secara bersamaan dan tepat (Ekspansi fiskal dan ekspansi moneter).
2. Kebijakan mendapatkan sumber modal asing yang paling ekonomis, baik dalam bentuk utang, SWAP maupun Hibah.

Dengan melakukan kebijakan tersebut diharapkan pemerintah dapat mencapai tujuan mengurangi biaya utang, yang terdiri atas biaya pemrosesan (success fee), biaya bunga (interest) dan angsuran utang. Dengan mengurangi utang luar negeri berarti pemerintah telah mencegah terjadinya moral hazard dan korupsi yang sangat mengganggu proses terciptanya Good Corporate Governance.

Selain itu pengurangan utang luar negeri juga berarti meningkatkan kesempatan bagi anak bangsa untuk mengelola potensi-potensi ekonomi yang (mungkin) selama ini masih dikelola oleh pihak asing.

5.6 Analisis Terhadap Variabel Teknologi

Daya saing perekonomian yang merupakan aspek makro suatu negara sangat tergantung dari tingkat teknologi yang digunakan dalam sektor riil. Dalam hal ini teknologi sangat dibutuhkan bagi perkembangan sektor industri, manufaktur, yang bersama-sama sektor pertanian dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Hingga saat ini, sektor industri manufaktur masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain persoalan tingkat teknologi. Lambatnya perkembangan teknologi di sektor manufaktur ini ditunjukkan dengan rendahnya daya saing industri manufaktur Indonesia terutama dari sisi teknologi.

Tabel dibawah ini memberikan gambaran betapa rendahnya daya saing teknologi dan beberapa variabel ekonomi lainnya, jika Indonesia dihadapkan pada negara-negara pesaing yang ada dikawasan regional maupun global.

Tabel 18

Peringkat Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara

Negara	Daya Saing Petumbuhan	Teknologi	Institusi Publik	Lingkungan Makro
Malaysia	27	26	33	20
Thailand	31	41	39	11
China	33	63	38	8
India	48	57	59	18
Philipines	61	52	70	32
Argentina	63	44	66	65
Vietnam	65	68	62	38
Indonesia	67	68	77	53
Nigeria	71	71	78	61
bangladesh	74	79	79	39

Sumber : World Economic forum, 2003 dalam indef, 2003 (diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa dari sisi teknologi, daya saing Indonesia hanya sedikit lebih kecil jika dibandingkan Bangladesh, Nigeria dan Vietnam, sementara itu jika dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya Malaysia, Thailand dan China, daya saing Indonesia dari sisi teknologi sangat jauh perbedaannya.

Perlu diuraikan, bahwa daya saing Indonesia bukan saja rendah, akan tetapi juga angkanya semakin menurun. Tim peneliti INDEF mengungkapkan bahwa sampai dengan tahun 1997, produk sektor industri manufaktur dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi tidak banyak bedanya jika dibandingkan pada tahun 1985, bila dihitung dari total produk industri manufaktur nilainya hanya 20%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 1985 – 1997 tidak terjadi perubahan teknologi yang signifikan. Lambatnya perkembangan teknologi di sektor manufaktur di Indonesia antar lain terkait dengan rendahnya pendidikan tenaga kerja Indonesia yang merupakan pengguna teknologi tersebut.

Peneliti INDEF mengemukakan, bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia, masih relative rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yang mencapai 60%. Dan tidak berpendidikan 24%. Sementara itu, sekitar 3,5 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi, lebih dari 300.000 orang masih menganggur.

Masalah SDM rendah yang terutama sekali menyebabkan mandegnya pengembangan teknologi di Indonesia. Dengan demikian hal ini selaras dengan hal peneliti tim INDEF bahwa yang terkait dengan sektor industri di Indonesia adalah masalah penggunaan teknologi (*Technological Deepening*).

Struktur penggunaan teknologi pada sektor industri di Indonesia jika diperinci lebih jauh adalah 48% dari total produksi menggunakan teknologi rendah (*lowtech*) dan hanya 18% yang menggunakan teknologi tinggi (*hight tech*).

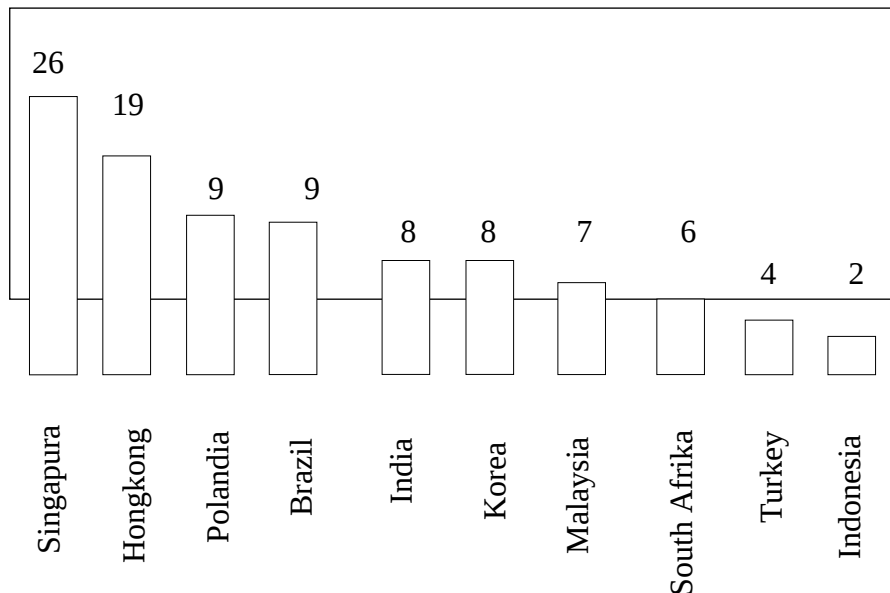
Perlu disadari bahwa dalam perkembangan ekonomi global, rendahnya penggunaan teknologi akan menyebabkan lemahnya daya saing produk ekspor Indonesia dipasar internasional. Dengan penggunaan teknologi tinggi, diharapkan perusahaan dapat menekan biaya produksi per unit.

Tidak digunakan teknologi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan industri, akan menyebabkan biaya produksi yang tinggi (*Hight Cost Production*), apalagi jika produk yang dihasilkan masih tergantung dengan bahan baku impor.

Bagi Indonesia, hal yang lebih penting adalah bagaimana mengkaitkan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya teknologi yang tepat guna agar daya saing industri Indonesia dapat bersaing ditingkat internasional.

Posisi daya saing Indonesia dalam hal produk-produk berteknologi tinggi dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Malaysia, Brazil dan Philipina. Pada grafik tersebut terlihat bahwa porsi produksi mesin dalam nilai tambah manufaktur Indonesia adalah terendah, bahkan lebih rendah dari Turkey.

Grafik Daya Saing Lingkungan Makro dari Sejumlah Negara
Tahun 2005



Rendahnya daya saing makro ekonomi Indonesia terkait dengan beberapa hal yaitu :

1. Pembiayaan yang berbasis utang membawa konsekuensi melorotnya anggaran pembangunan
2. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang masih rendah
3. Kualitas infrastruktur fisik yang masih lemah, dan
4. Persepsi pada sistem pengadilan hak cipta (intelektual) yang masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian tersebut maka perkembangan teknologi di masa depan Indonesia, baik yang bersifat penemuan baru maupun replikasi, haruslah dapat dimanfaatkan untuk menekan Hight Cost Production yang ada disektor manufaktur (industri) sektor pertanian sebagai teknologi pasca panen (teknologi pangan) yang dapat

meningkatkan keragaman penggunaan produk pertanian, teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan informasi pasar, teknologi transportasi sebagai sarana sampangnya produk dari produsen ke konsumen dengan sempurna dan teknologi konservasi lingkungan, sebagai upaya untuk melindungi kerusakan lingkungan akibat berkembangnya teknologi.

Oleh sebab itu kebijakan pemerintah yang tepat untuk menyongsong perspektif ekonomi Indonesia ditahun 2050 dari aspek teknologi adalah :

1. Kebijakan pemerintah yang dapat memberikan jaminan agar kualitas dan jenis teknologi dapat berkembang secara efisien dan efektif.
2. Kebijakan pemerintah yang mendorong diperolehnya pendanaan pengembangan teknologi dengan mengalokasikan dalam APBN (pusat) dan APBD (daerah), dengan tetap melakukan control ketat terhadap pelaksanaannya.

Dengan kebijakan pemerintah tersebut, diharapkan tercapainya Indonesia ditahun 2050 dengan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini :

1. Mendorong diperolehnya hak paten dari teknologi yang ditemukan oleh anak bangsa, secara kontinyu dan berkelanjutan.
2. Mendapatkan tingkat teknologi yang jenis dan karakteristiknya sesuai kebutuhan, dan ramah lingkungan (teknologi pangan yang tepat guna dan berhasilguna).
3. Menjadi proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan (dari teknologi lama hasil replikasi).

Akan tetapi pemerintah SBY belum tuntas dalam mengemban mandat dari rakyat Indonesia, masih ada waktu hingga akhir masa pemerintahan SBY yang akan berakhir pada tahun 2009.

BAGIAN VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

Dengan mengacu pada ide pokok tulisan ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perspektif ekonomi Indonesia tahun 2050 yang direpresentasikan dengan GDP, merupakan refleksi dari kinerja Investasi, Tenaga Kerja, Modal, dan Teknologi.
2. Analisis terhadap Investasi di Indonesia memberikan simpulan :
 - a. Daya saing investasi rendah dan cenderung menurun.
 - b. Perlindungan secara legal terhadap investor Indonesia masih rendah.
 - c. Iklim investasi di Indonesia masih buruk.
3. Analisis terhadap Tenaga Kerja Indonesia memberikan simpulan.
 - a. Daya saing Tenaga Kerja Indonesia rendah dan cenderung menurun.
 - b. Perlindungan secara legal terhadap Tenaga Kerja Indonesia masih rendah.
 - c. Kebodohan, kemiskinan, dan kelemahan fisik merupakan gambaran yang terdapat pada sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia.
4. Analisis terhadap Modal memberikan simpulan :
 - a. Penggunaan utang luar negeri telah bergeser dari tujuan semula, jika awalnya sebagai pelengkap maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu sebagai faktor utama.

- b. Implikasi sumber modal adalah pada masalah ekonomi dan politik sekaligus, sehingga keputusan terhadapnya harus dilakukan secara arif dan bijaksana.
 - c. Ada kepentingan terselubung dari lembaga-lembaga keuangan internasional dalam memberikan utang kepada negara-negara berkembang, antara lain Indonesia.
5. Analisis terhadap Teknologi memberikan simpulan :
- a. Daya saing Indonesia dari sisi Teknologi, rendah dan cenderung menurun.
 - b. Perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta di Indonesia masih rendah dan belum mendapatkan perhatian pemerintah sepenuhnya.
 - c. Perkembangan hak paten di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik karena lebih dominan hak paten yang diberikan oleh luar negeri dibandingkan yang diberikan oleh negara sendiri.
6. Jika melihat potensi dan tantangan pada variabel Investasi, Tenaga Kerja, Modal dan Teknologi di Indonesia maka sesungguhnya peluang untuk mencapai masa depan ekonomi Indonesia sebagaimana yang dipersepsikan oleh John Hawsworth masih sangat mungkin dicapai, jika pengelolaannya dilakukan secara benar.

6.2 Rekomendasi

1. Dibidang Investasi

Pemerintah sebaiknya melakukan restrukturisasi kebijakan ekonomi agar lingkungan makro ekonomi Indonesia dapat memberikan daya

Tarik yang kuat bagi investor, terutama investor domestik. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut adalah :

- a. Membuat flat-from ekonomi pertanian yang jelas dan mendorong meningkatnya nilai tambah sektor pertanian melalui pengelolaan agribisnis dan agroindustri secara modern. Disamping itu, kebijakan land-reform perlu dibenahi untuk mendorong efektivitas kebijakan pengembangan agribisnis dan agriindustri.
- b. Melakukan restrukturisasi infrastruktur agar beban investor dalam melakukan investasi tidak terlalu tinggi.
- c. Membuat undang-undang investasi atau penanaman modal yang dapat menjamin terlaksananya economic opportunity, predictability, stability dan fairness serta kepastian hukum

2. Dibidang Tenaga Kerja

Kebijakan pemerintah dibidang tenaga kerja hendaknya dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja indonesia dari sisi kualifikasi keahlian dan ketahanan fisik. Oleh sebab itu, kebijakan ini meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Ratifikasi terhadap undang-undang pendidikan sebagai upahya untuk mendorong competitiveness tiap-tiap lembaga penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta.
- b. Pemenuhan kebutuhan kualitas hidup yang meliputi perbaikan gizi, sanitasi, perumahan, dan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembangnya generasi mendatang.
- c. Memberikan jaminan kepada tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara gratis hingga tingkat SLTA.

- d. Mengintensifkan hubungan antar lembaga, dalam maupun luar negeri untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda yang cerdas dan jenius guna memperoleh pendidikan terbaik, sehingga dapat menjadi tenaga kerja ahli yang dibutuhkan dalam pembangunan.

3. Dibidang Modal

Kebijakan pemerintah dibidang permodalan harus dilakukan dalam rangka kemandirian dan mengurangi pengaruh ekonomi dan politik dari pihak asing, kebijakan ini meliputi :

- a. Kebijakan pajak progresif yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah sekaligus melakukan pemerataan pendapatan.
- b. Menggunakan Surat Utang Negara (SUN) untuk menggantikan pinjaman dari luar negeri.
- c. Kebijakan untuk mendapatkan Hibah dan SWAP jika terpaksa meminta bantuan negara lain.
- d. Meningkatkan kinerja BUMN dengan cara memberikan kebebasan profesi kepada manajemen BUMN.

4. Dibidang Teknologi

Kebijakan pemerintah dibidang teknologi sebaiknya diarahkan untuk mengembangkan teknologi baik yang ditemukan secara mandiri maupun replikasi teknologi yang sudah ada. Kebijakan ini meliputi :

- a. Pengembangan teknologi paska panen untuk meningkatkan diversifikasi penggunaan produk-produk pertanian, baik pangan maupun non pangan.

- b. Pengembangan teknologi tepat guna yang dapat menyerap tenaga kerja pada tingkat madya.
 - c. Merencanakan biaya penelitian untuk mengembangkan teknologi tersebut dan menganggarkannya dalam APBN dengan persentase yang cukup dan dirinci secara jelas.
 - d. Mendorong lembag-lembaga penelitian untuk menemukan teknologi yang tepat guna mengembangkan potensi daerah.
 - e. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menjadi *Rsearch University*.
5. Semua kebijakan yang terkait dengan ivestasi, tenaga kerja, modal, dan teknologi hendaknya dilakukan dalam suatu sistem yang menjamin adanya transparansi kegiatan, dimuli dengan transparansi anggaran yang dilanjutkan dengan transparansi pelaksanaan kegiatan, taransparansi hasil kegiatan, dan tarnsparansi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansoff. H.I and E.D Mc. Donnell.1990. *Implating Strategic Management*. Prentice-Hall International (UK) Ltd.
- Bustami. 2015. *Menuju Asean Economic Community*.
- David. Jr. 2015. *Strategic Management Concept and Cases*. Pearson. Fifteenth Edition.
- Djafar Zainuddin. 1996. *Teori Hubungan Internasional Memerlukan Paradigma Baru?*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya. Hal. 36
- Dominick Salvatore, *International Economics* (New Jersey: Prentice Hall-Gale, 1997), 321.
- Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, hal. 74-78
- ASEAN Economic Community Chartbook 2015
- Jakarta : ASEAN Secretariat, April 2016.Pdf
- Dag Einar Thorsen And Amund Lie, *What is Neoliberalism?*, Department of Political Sciencew University of Oslo.<http://folk.uio.no/daget/what%20is%20NeoLiberalism%20Final.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016
- Jiangyu Wang, “*China,India and Regional Economic Integration in Asia: The Policy and Legal Dimensions*,” (“makalah”) in Singapore Year Book of International Law (National University of Singapore, June 2006),

http://www.icrier.org/pdf/28march/28March07Afternoonday1/Wang_v1_rev30Nov06-pdf.pdf

Grant. Robert M., 1995. *Contemporey Strategy Analysis*. International Edition.

Hrebiniak. L.G. 2005. *Making Strategy Leading Effective Execution and Change*. Wharton School Publishing. New Yersey.

Kuntadi. 2005. *Peranan Pengusaha Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015*.

Nazara. S. 2015. *Perkembangan Perekonomian Indonesia*. Makalah Disampaikan Pada Kwik Gian Gie School of Business. Jakarta. Oktober. 2015.

Simanjuntak P. 2015. *Strategi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Indonesia*. Seminar Segmen Integrasi ECOSOC. Jakarta, 24-25 Februari 2015.

Stiglitz.2003. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*. Terjemahan Ahmad Lukman. Penerbit PT Ina Publikatama. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pasal 2-3.

Wangke Humphmey. 2015. *Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN- 2015*.

Ahmad Mubarik (1993), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Utang Luar Negeri Indonesia, Jakarta : CPIS.

Arief Sritua (1993), *Strategi Industrialisasi, Akumulasi Human Capital dan Kegiatan Pencarian Rente Ekonomi*, makalah yang disampaikan pada Seminar Mengenai Strategi Pembangunan

- Industri Indoensia yang Diselenggarakan oleh Forum Indonesia Berlin, Republik Federasi Jerman, 12 November.
- Arief Sritua (1998), *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, Jakarta. PT. Pustaka Cidesmindu.
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Jakarta. Berbagai edisi
- Basalim, Umar dkk (2000) *Perekonomian Indonesia, Krisis dan Strategi Alternatif*, Jakarta, UNAS Press dan Cidesindo.
- Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk Indonesia 1971, 1980, 1990 dan 2000 (1995 Intercenal Populations Census).
- Eko Laksono (2005), *Imperium III*, Jakarta, PT. Mizan Publika.
- Haz, Hamzah dan Umar Basalim (1993) *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, Jakarta, Grasindo.
- Hayter, Teresa (1971), *Aid as Imperialism, Hoarmondsworth : Penguin, dalam Sritua Arief, Teori, dan Kebijaksanaan Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Cidesmindu.
- Harinowo, Cyrillus (2002), *Utang Pemerintah, Perkembangan, Prospek dan Pengelolaanya*, Jakarta Gramedia, Pustaka Utama.
- Perkins John (2004), *Confessions of an Economic Hitman*, terjemahan Abdi Tandur.
- Sugiyanto, E., Suharyono, Digdowiseiso, K., Waluyo, T., Setiawan, H.D. 2008. *The Effects of Specific Allocation Fund (DAK) on Local Economic Development : A Mixed Method Analysis on Central Java Province, Indonesia*. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Fall, 5 (59) : 105-113

Sugiyanto, E., Digdowiseiso, K., Suharyono., Setiawan, H.D., Waluyo, T. 2008. *The Influence of Village Head's Leadership In Managing Village-Owned Enterprise : A Lesson Learned from Gisting Bawah Village*. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Fall, 6(60): 113-118

Sidik, Priadana, HM, Seminar RUU Penanaman Modal dan Proyeksi Ekonomi 2007, Jakarta 20 November 2006.

Stiglitz (2002), Globalization and its Discontents.

Tim Peneliti INDEF, *Kajian Tengah Tahun Ekonomi dan Bisnis 2003*, Penerbit Pustaka INDEF, Jakarta – Indonesia.

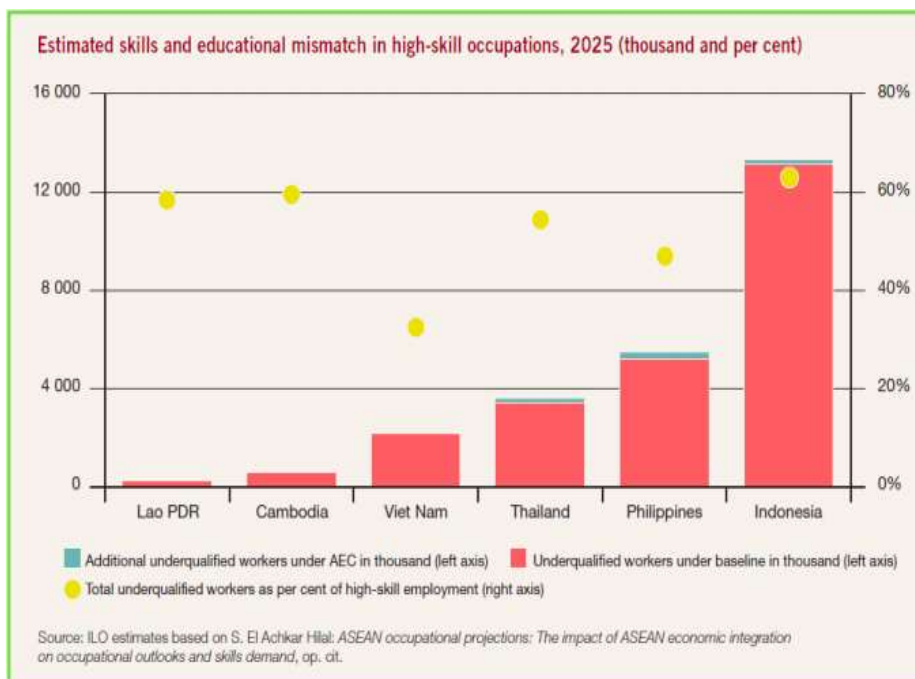
Teropong Kesehatan, Kompas 26 Januari 2007.

Undang – undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

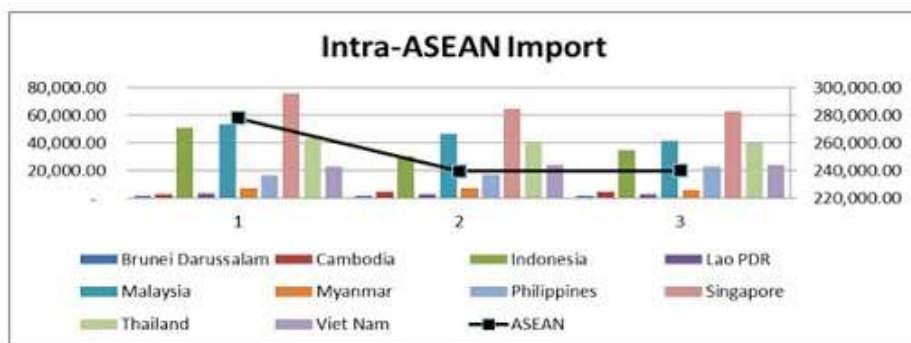
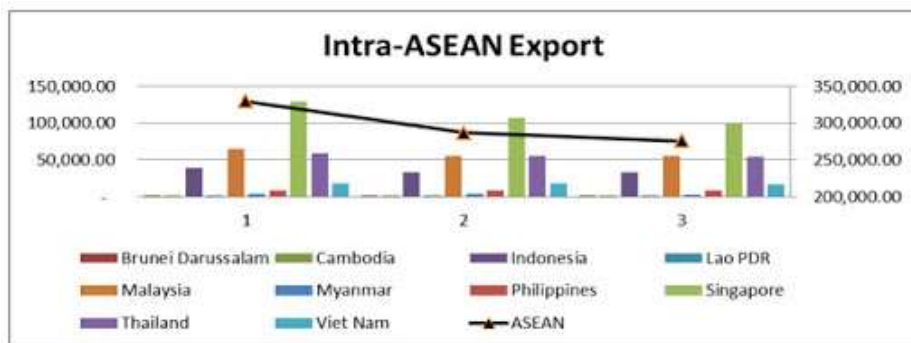
Utang Baru Melalui Format Bilateral, Kompas 25 Januari 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

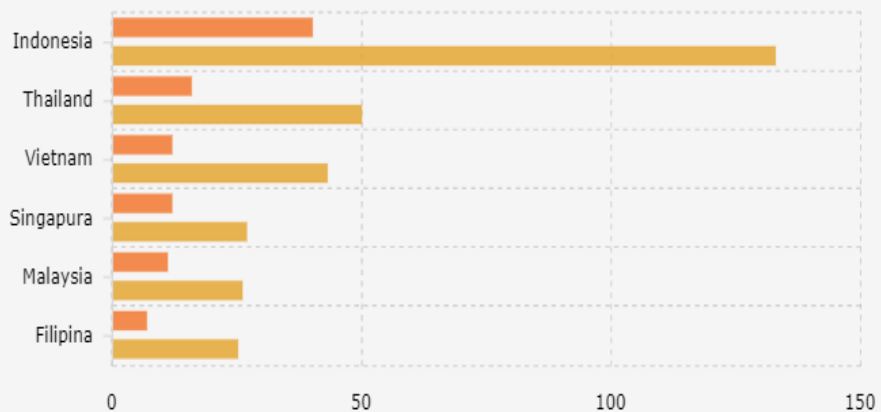




Source: ILO, ASEAN Community 2015: *Managing integration for better jobs and shared prosperity*, Bangkok, 2014.



Proyeksi Nilai Ekonomi Digital di Negara-negara Asia Tenggara 2019 dan 2025



MENJADI EKONOMI DIGITAL TERBESAR ASEAN DI 2025



Prediksi Google

Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi digital nomor satu di Asia Tenggara

USD 150 M
pada 2025



Prediksi BI

Pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 150 M atau lebih dari Rp 2.040 T, memberi nilai tambah 10% terhadap PDB



2030

135 juta penduduk menjadi konsumen dominan e-commerce



Jumlah penduduk usia produktif Indonesia di atas 60% (27% di antaranya generasi muda wirausaha industri baru)

Sektor pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia

Industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia



INDONESIA

LADANG SUBUR E-COMMERCE

Ekonomi digital Indonesia meroket, sektor e-commerce menjadi primadona. Tak hanya menjamurnya toko-toko *online* lokal, pemain e-commerce dari luar negeri juga ikutan. Mengapa?

41% masyarakat Indonesia berbelanja secara *online*

33% di antaranya memakai *mobile-commerce*

Penetrasi *mobile broadband* 65%

Total populasi lebih dari 262 juta jiwa

Pertumbuhan 155% pembeli *mobile-commerce*

INDONESIA PASAR E-COMMERCE YANG BESAR

Prediksi 2018

Pertumbuhan pembeli digital di Indonesia diproyeksikan menjadi **18,8%**
(pertumbuhan penetrasi tercepat di dunia)

b Indonesia
baik.id

Sumber: WeAreSocial/Digital 2017 Global Overview

Produksi 09-03-2018



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaikID



@IndonesiaBaikid

E-COMMERCE & STARTUP INDONESIA PRIMADONA ASEAN



Potensi Indonesia sebagai pasar ekonomi digital dunia, khususnya e-commerce sudah tak terbantahkan lagi. Karena saat ini Indonesia memimpin jumlah startup di Asia Tenggara (ASEAN)



INDONESIA SIAP MENGARAH KE INDUSTRI DIGITAL



E-Commerce bagian dari ekonomi digital Revolusi Industri 4.0



Pada 2030 ada bonus demografi



Ada peningkatan jumlah kelas menengah



Penghasilan 135 juta penduduk di atas USD 3.600 pada 2030



Internet menjangkau 52,8% populasi Indonesia

JUMLAH STARTUP NEGARA-NEGARA ASEAN



b Indonesia
baik.id

Sumber: Startupranking, Kementerian RI

Produk 12-03-2018

IndonesiaBaik.id

IndonesiaBaik.id

IndonesiaBaikID

@IndonesiaBaikid

PERSEBARAN INDUSTRI STARTUP DI INDONESIA

Saat ini, Indonesia tengah menikmati pertumbuhan industri digital yang ditandai dengan adanya **startup**

Berdasarkan laporan *Digital Creative Industry Society* jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia

MENCAPAI

992
STARTUP



Sumatera
115
STARTUP

Kalimantan
24
STARTUP

Sulawesi
34
STARTUP

Jabodetabek
522
STARTUP

Jawa Tengah
30
STARTUP

D.I. Yogyakarta
54
STARTUP

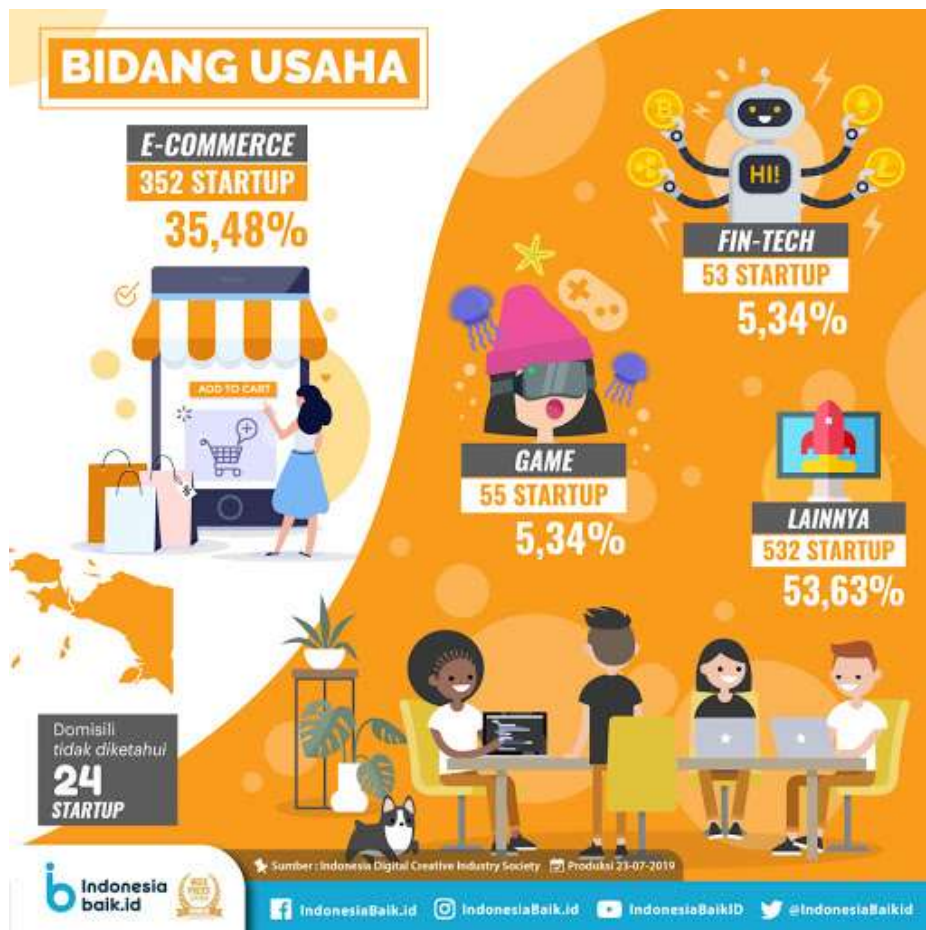
Jawa Barat
44
STARTUP

Jawa Timur
113
STARTUP

Bali dan NTB
32
STARTUP



[f IndonesiaBaik.id](#) [@IndonesiaBaik.id](#) [IndonesiaBaikID](#) [@IndonesiaBaikid](#)



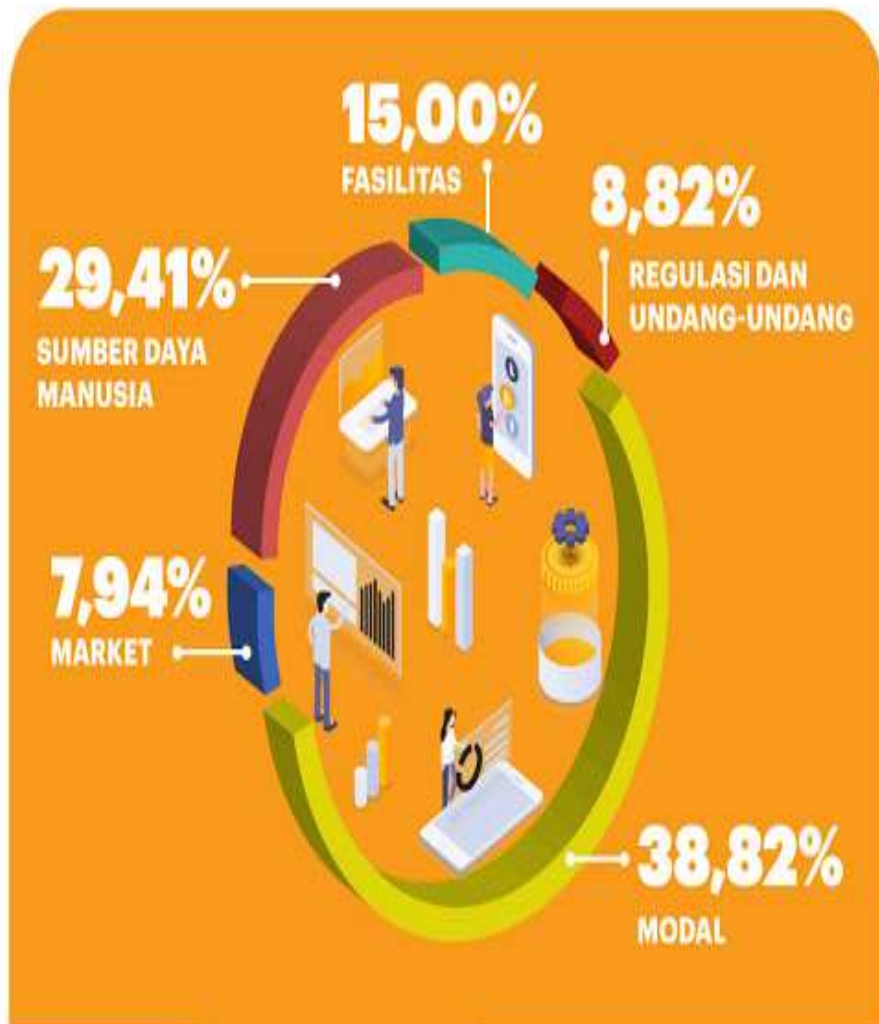
SKALA USAHA STARTUP DI INDONESIA

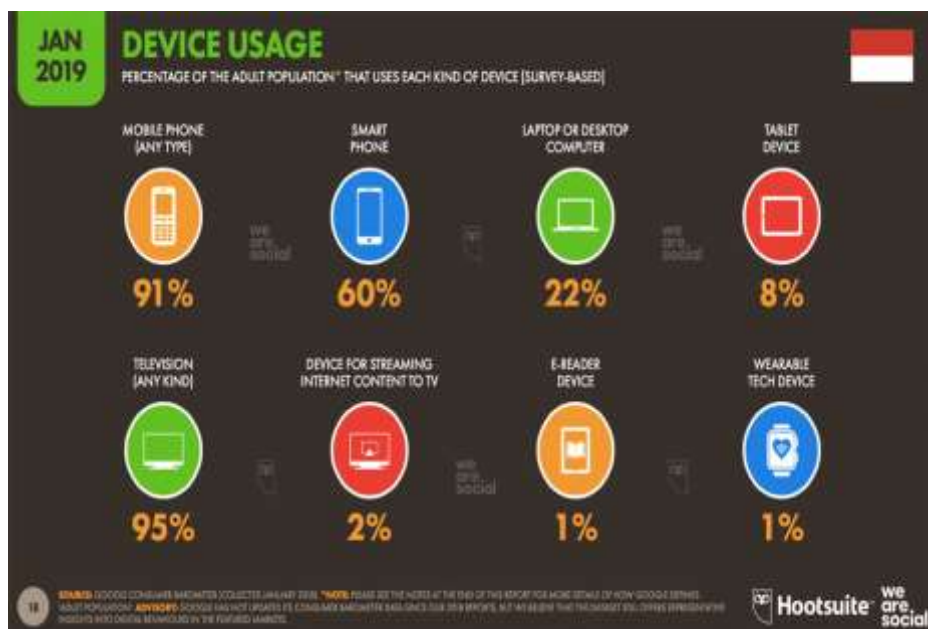
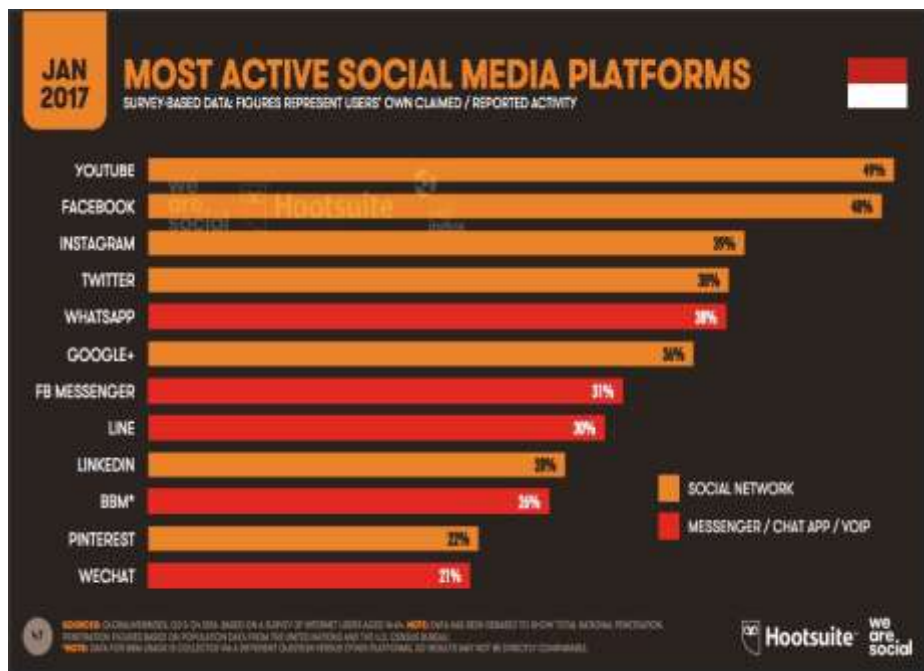
SKALA USAHA STARTUP DI INDONESIA

Sebanyak 992 *startup* yang disurvei oleh Bekraf bersama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) mayoritas masih didominasi usaha mikro & kecil



Dalam hal pengembangan skala usahanya di era digital ini, *startup* ini masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain





JAN
2016

E-COMMERCE BY DEVICE

SURVEY-BASED DATA: FIGURES REPRESENT USERS' OWN CLAIMED / REPORTED ACTIVITY



PURCHASED A
PRODUCT OR
SERVICE ONLINE
IN THE PAST 30 DAYS



we
are
social

27%

SEARCHED ONLINE
FOR A PRODUCT
OR SERVICE TO BUY
IN THE PAST 30 DAYS



Global
Web
Index

31%

VISITED AN
ONLINE RETAIL
STORE IN THE
PAST 30 DAYS



we
are
social

26%

MADE AN ONLINE
PURCHASE VIA A LAPTOP
OR DESKTOP COMPUTER
IN THE PAST 30 DAYS



Global
Web
Index

24%

MADE AN ONLINE
PURCHASE VIA A
MOBILE DEVICE IN
THE PAST 30 DAYS



20%

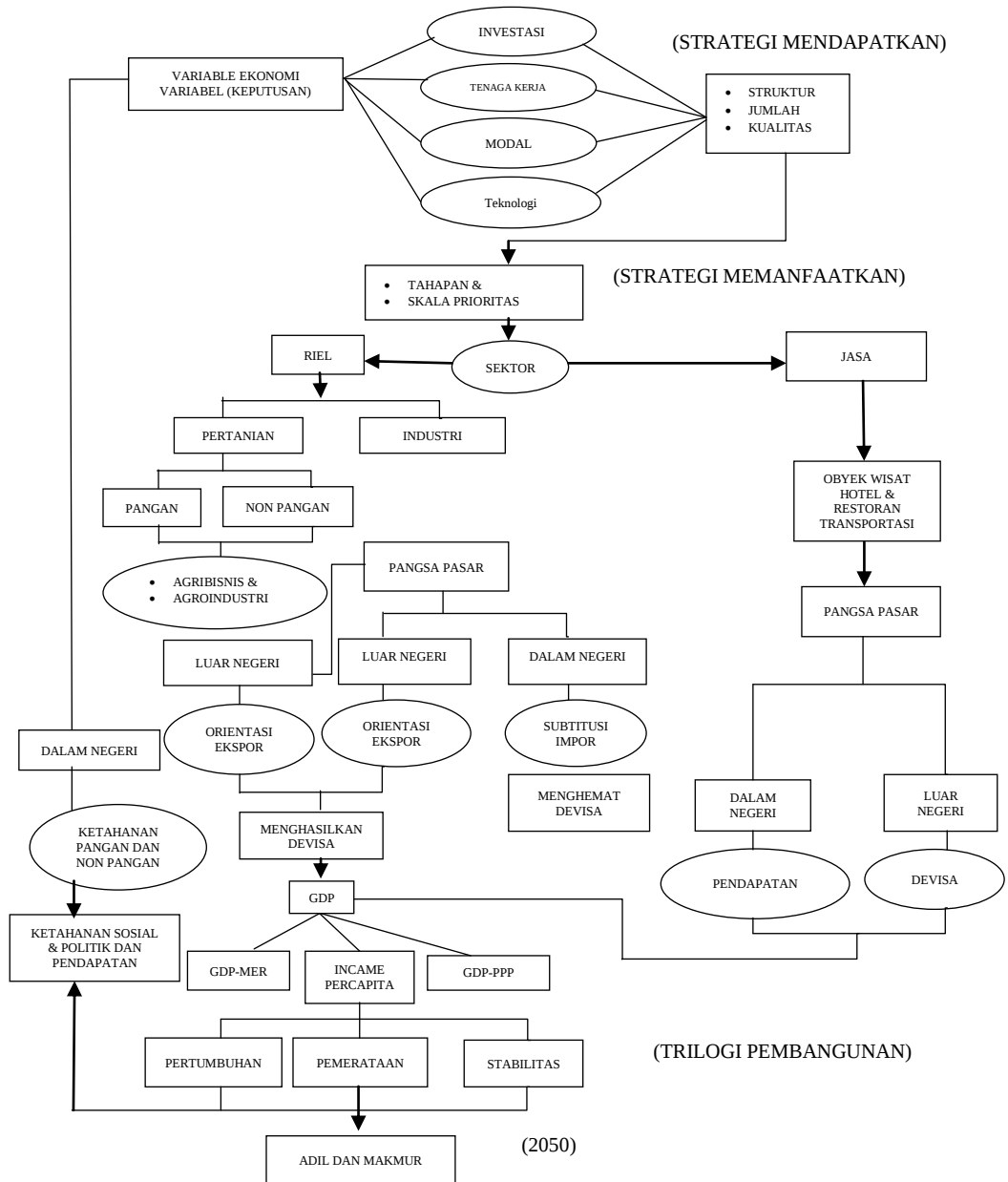
we
are
social

Source: GlobalWebIndex, Q4 2015. Based on a survey of internet users aged 16-64. Note: Data has been re-based to show national penetration.

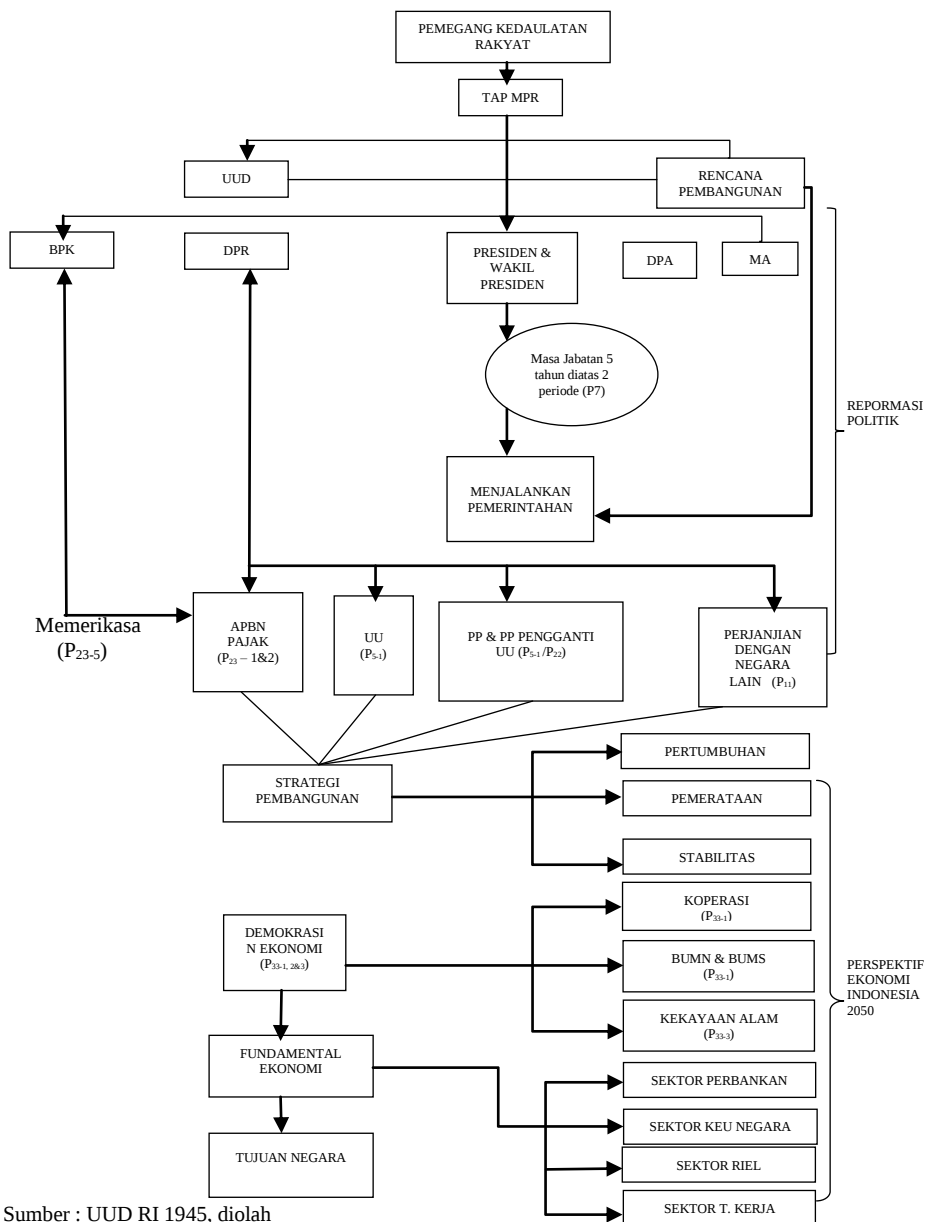
@wearesocialsg • 229

Bagan 3

Alur Strategi Mendapatkan dan Memanfaatkan Investasi, Tenaga Kerja, Modal, dan Teknologi untuk Mencapai Target GDP 2050



Alur Strategi Pembangunan Nasional Untuk Mencapai Tujuan Negara Republik Indonesia



Tabel 1

Projected Relative Income Percapita Levels in 2005 and 2050
(in Cpmstamt 2004 \$ Terms)

Country	GDP per capita at market excjamge rate		GDP per capita in PPP terms	
	2005	2050	2005	2050
US	40,339	88,443	40,339	88,443
Canada	31,446	75,425	31,874	75,425
UK	36,675	75,855	31,489	75,855
Australia	32,364	74,000	31,109	74,000
Japan	36,686	70,646	30,081	70,646
France	33,978	74,685	29,674	74,685
Jermamy	33,457	68,261	28,770	68,261
Italy	29,455	66,165	28,576	66,165
Spain	23,982	66,552	25,283	66,552
Korea	15,154	66,489	21,434	66,489
Russia	4,383	41,987	10,358	43,586
Mexico	6,673	42,879	9,939	42,879
Brazil	3,415	26,924	8,311	34,448
Turkey	4,369	35,861	7,920	35,861
China	1,664	23,534	6,949	35,851
Indonesia	1,249	23,097	3,702	23,686
India	6,74	12,773	3,224	21,872

Soure : Price Waterhouse Cooper estimates (ranked in order of GDP per capita in PPP terms in 2005) based on World Bank estimates of PPP rates for 2004 and UN population projections.

Tabel 2

Projected Relative Size of Economies in 2005 and 2050

(Indeces with USA = 100)

Country (indeces with USA = 100)	GDP at market exchange rate in US \$ terms		GDP in PPP terms	
	2005	2050	2005	2050
USA	100	100	100	100
Japan	39	23	32	23
Germany	23	15	20	15
China	18	94	76	143
UK	18	14	16	15
France	17	13	15	13
Italy	14	10	14	10
Spain	9	8	9	8
Canada	8	9	9	9
India	6	58	30	100
Korea	6	8	9	8
Mexico	6	17	9	17
Australia	5	6	5	6
Brazil	5	20	13	25
Russia	5	13	12	14
turkey	3	10	5	10
Indonesia	2	19	7	19

Soure : Price Waterhouse Cooper estimates (Rounded to nearst percentage point)

Table 3

Projected Real Growth in GDP and Income percapita:

2005 – 2050 (%p.a)

Country	GDP in US \$ Terms	GDP in Domestic Currency Or At PPP _s	Population	GDP per Capita At PPP _s
India	7,6	5,2	0,8	4,6
Indonesia	7,3	4,8	0,6	4,2
China	6,3	3,9	0,1	3,8
Turkey	5,6	4,2	0,7	3,4
Barazil	5,4	3,9	0,7	3,2
Mexico	4,8	3,9	0,6	3,3
Russia	4,6	2,7	0,5	3,3
S. Korea	3,3	2,4	0,1	2,6
Canada	2,6	2,6	0,6	1,9
Australia	2,6	2,7	0,7	2,9
USA	2,4	2,4	0,6	1,8
Spain	2,3	2,2	0,1	2,2
U.K	1,9	2,2	0,3	2,0
France	1,9	2,2	0,1	2,1
Italy	1,5	1,6	-0,3	1,9
Germany	1,5	1,8	-0,1	1,9
Japan	1,2	1,9	-0,3	1,9

Soure : Price Waterhouse Cooper GDP Growth Estimates Raounded to
Nearest 0,10%), PopulationGrwth Proyectio From the UN

Tabel 4
Investment Rate Assumptions

Investment as % GDP	2005 - 2010	From 2025
Japan	30%	25%
Germany	22%	20%
UK (Inggris)	17%	17%
France Italy	24%	20%
China	22%	20%
Spain	36%	25%
Canada	25%	20%
India	22%	20%
Korea	32%	20%
Mexico	20%	25%
Australia	24%	20%
Brazil	19%	20%
Rusia	25%	19%
Turkey	20%	20%
Indonesia	28%	22%

Note : investment rates assumed to adjust smoothly between 2010 and 2025 to long run level in final column above.

Soure : Pricewaerhouse Coorpers base case assumptions

Table 5
Results of Sensitivity Analysis

Sensitivity tests (% Changes from 2050 base case in brackets)	Chinese GDP in 2050 relative to US = 100		Indian GDP in 2050 relative to US = 100		E7 GDP in 2050 relative to G 7 = 100	
	MER	PPP	MER	PPP	MER	PPP
Base case in 2005	18	76	6	30	21	74
Base case in 2005	94	143	58	100	125	177
Applied to all economies						
Slower US Productivity Growth (1,75%)	96 (+2%)	145 (+1%)	60 (+3%)	101 (+1%)	127 (+2%)	179 (+1%)
Lower capitalshare (30%)	91 (-3%)	141 (-1%)	59 (2%)	100 (0%)	124 (-1%)	177 (0%)
Depreciaton up 1% pa to 6%	84 (-11%)	135 (-6%)	53 (-9%)	95 (-5%)	117 (-6%)	173 (-2%)
Applied to E 7 Economies only						
Working age population growth by 2% of GDP	86 (-9%)	131 (-9%)	53 (-9%)	91 (-9%)	114 (-9%)	162 (-9%)
Invesment rate up by 2% of GDP	101 (+7%)	148 (+3%)	64 (+10%)	104 (+4%)	135 (+8%)	185 (+5%)
Intial capital to output ratio up 0,2	90 (-4%)	140 (-2%)	55 (-5%)	97 (-3%)	120 (-4%)	173 (-2%)
Convergence speed down by 0,5% pa	68 (-28%)	122 (-15%)	35 (-40%)	77 (-23%)	88 (-30%)	147 (-17%)
Trend tise in average school years down 0,02 pa	84 (11%)	135 (-6%)	52 (-10%)	94 (-6%)	112 (-10%)	167 (-6%)
Lower real ezachange rate response relative to productivity growth differences (0,5 rather than 1)	56 (-40%)	143 (0%)	35 (-40%)	100 (100%)	83 (-34%)	177 (0%)

Note : E7 compries China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Turkey and Mexico.

Soure : Pricewaerhouse Coopers model estimates (these exlude knock-on effects from changes in E7 growth on OECD growth).

Table 9

Trend Pertumbuhan Daya Saing Indonesia Periode 2001 s/d 2005

Negara	2001*	2002*	2003*	2004*	2005*
Taiwan	7	3	5	4	5
Singapura	4	4	6	7	6
Australia	5	7	10	14	10
Jepang	21	13	11	9	12
NewZealand	10	16	14	17	16
Korea	23	21	18	29	17
Hongkong	13	17	24	21	28
Thailand	33	31	32	34	36
China	39	33	44	46	49
India	57	48	56	55	50
Indonesia	64	67	72	69	74
Vietnam	60	65	60	77	81

Sumber : INDEF, 2006

Keterangan : * Nilai dalam Rangking (Urutan) dari 110 Negara

Table 10
Peringkat Iklim Bisnis Indonesia, 2004 - 2005

Negara	2000 – 2004 (a)	2005 – 2009 (b)
Argentina	41	47
Australia	16	25
Brazil	35	37
China	45	41
Hongkong	5	5
India	48	43
Indonesia	43	45
Jepang	26	28
Malaysia	22	31
Philipines	36	40
Vietnam	54	50

Sumber : INDEF, 2006

Keterangan : * Angka Estimasi

(a) & (b) Rangking dari 110 Negara

Table 11

Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Melakukan Bisnis Tahun 2005

	Indonesia*	Malaysia*	Filipina*	Singapura*	Thailand	Vietnam
Kemudahan Melakukan Bisnis	115	21	113	2	20	99
Memulai Bisnis	144	57	89	5	29	82
Mengurus Ijin	107	101	91	7	8	18
Mengangkat & Memecat Pegawai	120	34	82	7	23	122
Mendaftar Hak Milik	107	53	92	144	22	39
Mendapatkan Kredit	63	6	121	8	59	106
Perlindungan Investor	58	5	132	2	33	143
Pembayaran Pajak	118	19	80	9	34	107
Perlindungan Antar Perbankan	49	36	33	6	89	83
Menerapkan Kontrak	145	61	89	11	49	102
Menutup Perusahaan	116	43	132	2	37	95

Sumber : INDEF, 2006

Keterangan : *Rangking dari 145 Negara

Table 12

Perkembangan Angkatan Kerja dan Pengangguran (Jutaan Orang)

Tahun	Angkatan	Tenaga Kerja Baru	Penduduk yang Bekerja	Lapangan Kerja Baru	Pengangguran Terbuka
1996	94,85	2,11	88,82	1,14	6,03
2000	95,65	0,94	89,84	1,00	5,80
2001	98,81	3,16	90,81	0,97	8,00
2002	100,78	1,97	91,65	0,84	9,13
2003	102,63	1,85	92,81	1,16	9,83
2004	103,97	1,34	93,72	0,19	10,25
2005	105,80	1,83	94,85	1,23	10,85

Sumber : BPS, 2006

Table 18
Peringkat Daya Saing Berbagai Negara Periode 1998 s/d 2005

Nama Negara	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005
USA	1	1	1	1	1	1	1
Singapura	2	2	3	8	4	2	3
Malaysia	12	26	28	24	21	16	28
Korea	36	29	29	29	34	35	29
Jepang	20	21	23	27	25	23	21
China	21	24	26	28	29	24	31
Thailand	41	31	24	31	30	29	27
Indonesia	40	43	46	47	57	58	59
Argentina	-	42	45	48	58	59	58
Venezuela	-	46	49	46	59	60	30
Jumlah Negara	N = 49	N = 49	N = 49	N = 49	N = 60	N = 59	N = 60

Sumber : Peringkat Daya Saing Negara, Versi World Competiveness Report (2006)

BIODATA PENULIS



Dr.Suharyono,SE.,M.Si memperoleh gelar Sarjana Muda Ekonomi tahun 1980 dan Sarjana Ekonomi tahun 1983 dari Fakultas Ekonomi Universitas Nasional (UNAS). Gelar Magister Sains diperoleh dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1996 dan gelar Doktor Manajemen Bisnis juga diperoleh dari IPB pada tahun 2010. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, maka selain pendidikan formal Dr.Suharyono,SE.,M.Si juga memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran dan penelitian, baik dari UNAS sebagai tempatnya mengabdikan, juga dari pemerintah (DIKTI dan Kopertis Wilayah III). Sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi UNAS, Dr.Suharyono,SE.,M.Si mengabdikan dirinya dengan mengajar di Fakultas Ekonomi UNAS dan di Sekolah Pascasarjana UNAS pada Program Studi Ilmu Manajemen. Selain itu, Dr.Suharyono,SE.,M.Si juga pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi lain di luar UNAS, antara lain di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) dan sampai saat ini masih mengajar di Asean Banking and Finance Institute (ABFII) Perbanas. Di luar mengajar Dr.Suharyono,SE.,M.Si juga pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang penelitian. Di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi – Akademi Nasional, Dr. Suharyono, SE.,M.Si pernah menjabat sebagai Sekretaris di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Fakultas Ekonomi UNAS, Wakil Direktur Akademi Akuntansi Nasional, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi UNAS, Manajer UPT-Marketing and Public Relations (UPT-MPR) dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan.

Penulis,

Dr. Suharyono, SE.,M.Si

ISBN 978-623-7376-34-7

